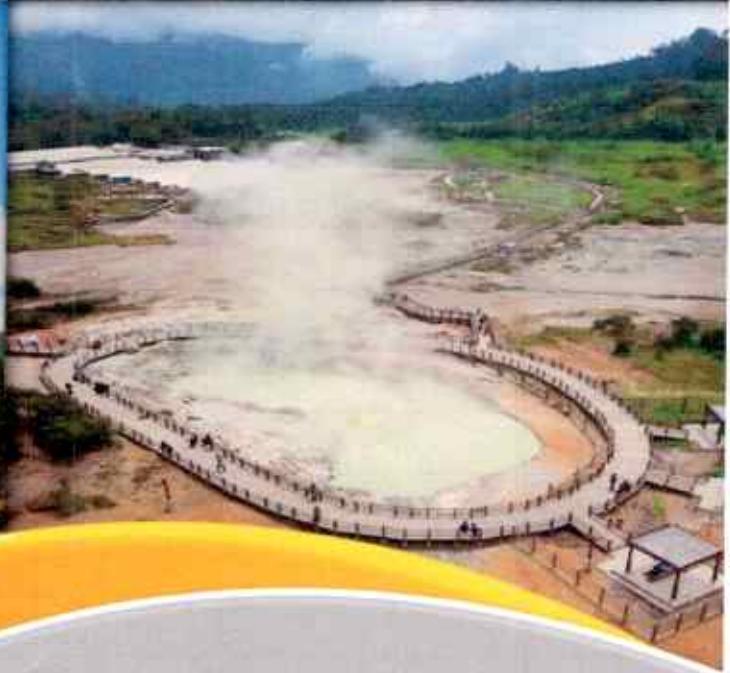
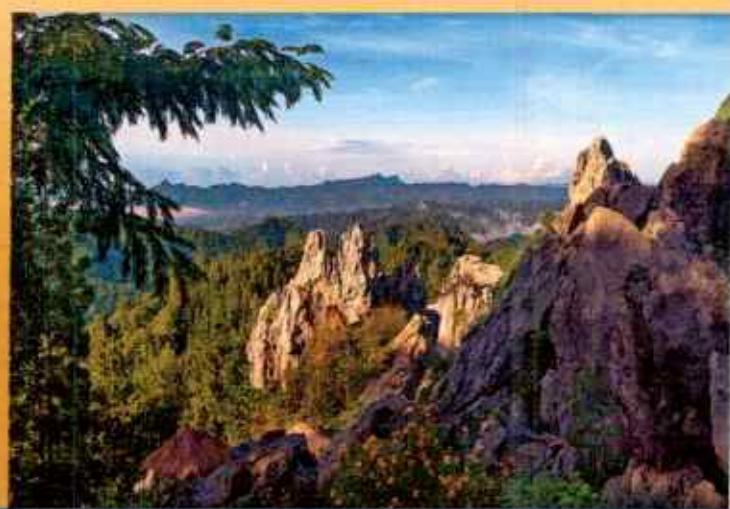


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
I N S P E K T O R A T
Jalan Dipayuda Nomor : 10 Telp. (0286) 591084, 591459
BANJARNEGARA 53415
e-mail: inspektorat@banjarnegarakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarnegara, Maret 2022

Plt. JNSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA BAKESBANGPOL

TEGUH HANDOKO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19710131 199003 1 001



KATA PENGANTAR



Dengan memanjangkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 melalui capaian yang dihasilkan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Periode Tahun 2017-2022.

Melalui media LKjIP ini diharapkan dapat digambarkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sehingga akan diperoleh umpan balik dari berbagai pihak yang berkepentingan dan langkah nyata bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, disampaikan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP sehingga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh di tahun yang akan datang agar senantiasa memegang teguh prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas yang baik, akan memberikan kontribusi pada tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju terwujudnya pelayanan prima di Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Maret 2021

PLH. BUPATI BANJARNEGARA

WAKIL BUPATI



SYAMSUDIN, S.Pd, M.Pd



DAFTAR ISI

	Halaman :
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Perangkat Daerah	2
C. Lingkungan Strategis.....	4
D. Kondisi Ekonomi	8
E. Potensi Wilayah	10
F. Potensi Sumber Daya Manusia	15
G. Permasalahan dan Isu Strategis.....	19
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	31
A. Perencanaan Strategis	31
1. Visi dan Misi.....	31
2. Tujuan, Sasaran, Setrategi dan Kebijakan.....	31
B. Instrumen Pendukung Pengelolaan Data Kinerja	39
C. Perjanjian Kinerja.....	44
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Pengukuran Kinerja	45
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	46
1. Evaluasi Capaian Kinerja	46
2. Analisis Capaian Kinerja	49
C. Realisasi Keuangan	133
BAB. IV PENUTUP	134



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja
- II. Pengukuran Kinerja
- III. Tipologi Perangkat Daerah



DAFTAR GRAFIK

Halaman :

GRAFIK 1.1.	:	Komposisi Keanggotaan Partai Politik di DPRD Kabupaten Banjarnegara Hasil PEMILU Tahun 2019	4
GRAFIK 1.2.	:	Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara (di atas permukaan laut/mdpl)	7
GRAFIK 1.3.	:	Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021 (persen)	9
GRAFIK 1.4.	:	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	10
GRAFIK 1.5	:	Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021 (Ton)	11
GRAFIK 1.6.	:	Produksi Hortikultura di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021 (Ton)	11
GRAFIK 1.7.	:	Populasi Ternak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2021 (Ekor)	12
GRAFIK 1.8.	:	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2021 (Ton)	13
GRAFIK 1.9.	:	Produksi Benih Ikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021 (ekor)	13
GRAFIK 1.10.	:	Produksi Perkebunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021	14
GRAFIK 3.1.	:	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	51
GRAFIK 3.2.	:	Persentase Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Banjarnegara	53
GRAFIK 3.3.	:	Indeks Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021	55
GRAFIK 3.4.	:	Persentase Pemilih Dalam Pemilu	57
GRAFIK 3.5.	:	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg .	58
GRAFIK 3.6.	:	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020	59
GRAFIK 3.7.	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2021	64
GRAFIK 3.8.	:	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	67
GRAFIK 3.9.	:	Strata Desa di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	71
GRAFIK 3.10	:	Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	74
GRAFIK 3.11	:	Kondisi Jalan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021 ...	75



Halaman :

GRAFIK 3.12	:	Luasan Sawah yang dialiri Irigasi Kondisi Baik Tahun 2016 – 2021	77
GRAFIK 3.13	:	Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021	81
GRAFIK 3.14	:	Nilai Tukar Petani Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 - 2021	82
GRAFIK 3.15	:	Persentase Peningkatan Kunjungan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	85
GRAFIK 3.16	:	Kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020	87
GRAFIK 3.17	:	Persentase Koperasi Sehat Tahun 2016-2021	88
GRAFIK 3.18	:	Nilai Investasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021 .	91
GRAFIK 3.19	:	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021	93
GRAFIK 3.20	:	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2021	94
GRAFIK 3.21	:	Industri Pengolahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021	96
GRAFIK 3.22	:	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 - 2020	98
GRAFIK 3.23	:	Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	100
GRAFIK 3.24	:	Inflasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2021	101
GRAFIK 3.25	:	Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020	102
GRAFIK 3.26	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	106
GRAFIK 3.27	:	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 -2021	110
GRAFIK 3.28	:	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni 2015 – 2021	117
GRAFIK 3.29	:	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	119
GRAFIK 3.30	:	Perbandingan Posisi Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten di Eks Karisidenan Banyumas dan yang berbatasan Langsung dengan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	120
GRAFIK 3.31	:	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	123



Halaman :

GRAFIK 3.32	:	Angka Usia Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021	125
GRAFIK 3.33	:	Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	126
GRAFIK 3.34	:	Persentase Penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	127
GRAFIK 3.34	:	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	128
GRAFIK 3.36	:	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2021	129
GRAFIK 3.37	:	Data Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	132
GRAFIK 3.38	:	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021	133



DAFTAR TABEL

	Halaman :
TABEL 1.1. : Data Wilayah Administratif	5
TABEL 1.2. : Panjang Jalan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021 (km)	8
TABEL 1.3. : Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2021	15
TABEL 1.4. : Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 - 2021	16
TABEL 1.5. : Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Bekerja Tahun 2016 – 2021	16
TABEL 1.6 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang (Keadaan Tahun 2017 – 2021)	18
TABEL 1.7. : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Keadaan sampai dengan 31 Desember 2021)	19
TABEL 2.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Prioritas Kebijakan Periode 2017 – 2021	32
TABEL 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja	45
TABEL 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	47
TABEL 3.3 : Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Per Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	49
TABEL 3.4 : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – 2021	63
TABEL 3.5 : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2020	66
TABEL 3.6 : Rekapitulasi Desa Tertinggal Tahun 2021	69
TABEL 3.7 : Komponen Indeks Desa Membangun	70
TABEL 3.8 : Jumlah Kunjungan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 -2021	84
TABEL 3.9 : Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	104
TABEL 3.10 : Susunan Pola Pangan Harapan Nasional	113
TABEL 3.11 : Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	114
TABEL 3.12 : Pencapaian Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021	114
TABEL 3.13 : Pencapaian Indikator Prosentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni Tahun 2015 – 2021	117
TABEL 3.14 : Realisasi Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Banjarnegara dari Berbagai Sumber Anggaran Tahun 2021	118



DAFTAR GAMBAR

Halaman :

Gambar 1.1.	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara	3
Gambar 1.2.	:	Peta Kabupaten Banjarnegara	5
Gambar 2.1.	:	Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (<i>SIPD</i>)	39
Gambar 2.2.	:	Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	40
Gambar 2.3.	:	Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (<i>SIRUP</i>)	40
Gambar 2.4.	:	Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	41
Gambar 2.5.	:	Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (<i>SIGA</i>)	42
Gambar 2.6.	:	Aplikasi Kependudukan Durenmas	42
Gambar 2.7.	:	Aplikasi E-Sakip	43
Gambar 2.8.	:	Aplikasi Sistem Peta Investasi (Simpetin)	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998 perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban yang sistematis, jelas, terukur dan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 Penyusunan LKjIP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, laporan kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui Perjanjian Kinerja (PK) disertai dengan penjelasan yang memadai atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
3. Menjadikan Kabupaten Banjarnegara akuntabel, sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.



5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Banjarnegara terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan restrukturisasi kelembagaan atau lebih dikenal dengan Penataan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

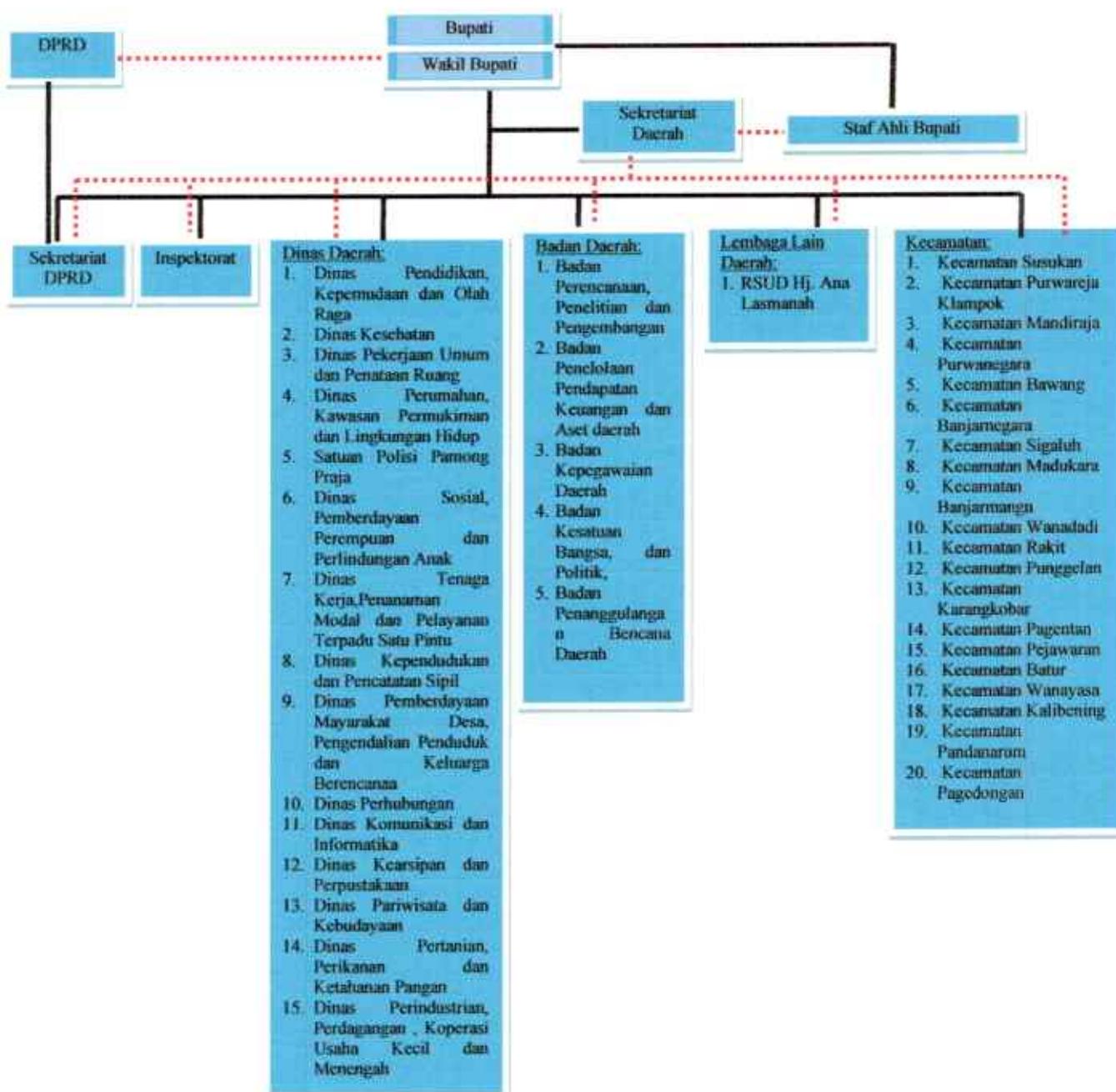
2. Susunan Organisasi

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

Gambar I.1



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten



Keterangan :

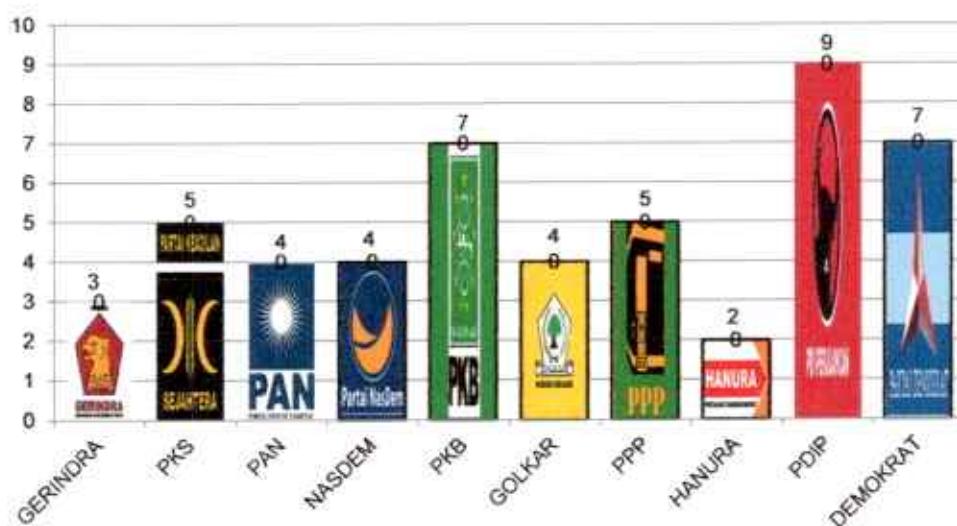
- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah 1) Sekretariat Daerah tipe B; 2) Sekretariat DPRD tipe B; 3) Inspektorat tipe A; 4) Dinas Daerah tipe A sejumlah 7 dinas, tipe B sejumlah 7 dinas dan tipe C sejumlah 1 dinas; 5) Badan Daerah tipe A sejumlah 3 badan, tipe B sejumlah 1 badan, Tipe C sejumlah 1 badan; Kecamatan tipe A sejumlah 20 kecamatan, daftar dan tipe perangkat daerah terlampir.

Berjalannya pemerintahan di daerah sangat ditentukan oleh kerja sama dan dukungan dari masyarakat yang diwakili DPRD. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Banjarnegara menurut keterwakilan Partai tahun 2021 yang ada saat ini terdiri dari 50 anggota sebagaimana grafik berikut :

Grafik 1.1
Komposisi Keanggotaan Partai Politik di DPRD Kabupaten Banjarnegara
Hasil Pemilu 2019



Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. KEADAAN GEOGRAFI

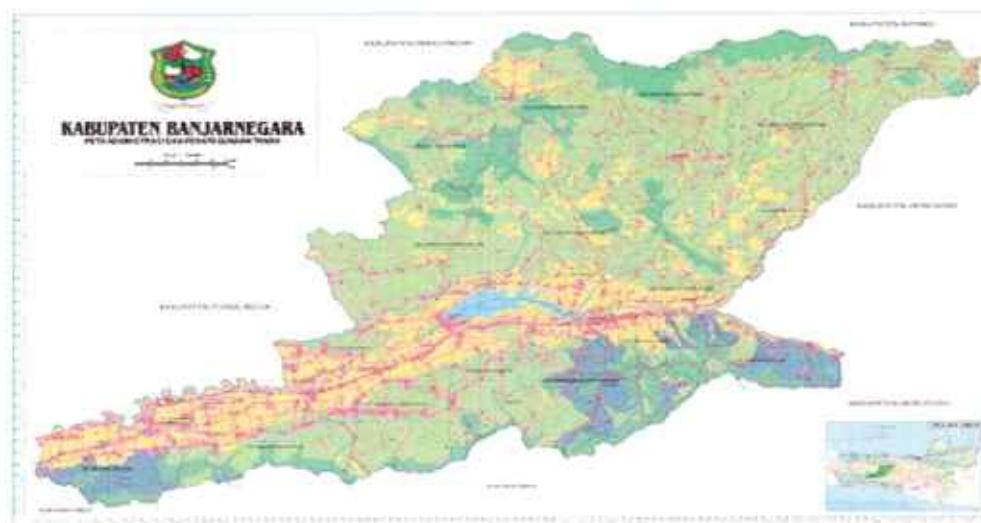
a) Letak Geografis.

Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak. diantara $7^{\circ} 12'$ - $7^{\circ} 31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 20'$ – $109^{\circ} 45'$ Bujur Timur.

b) Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Banjarnegara



c) Luas Wilayah :

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara: 106.970,997 Ha atau sebesar 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 20 Kecamatan (12 Kelurahan dan 266 Desa). Dari 20 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Punggelan merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas wilayah 10.284,01 Ha atau sebesar 9,614% dari luas Kabupaten Banjarnegara.

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Wilayah Administratif

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Susukan	52,66	15	-
Purwareja Klampok	21,87	8	-
Mandiraja	52,62	16	-
Purwanegara	73,87	13	-
Bawang	55,21	18	-
Banjarnegara	26,24	4	9
Sigaluh	39,56	14	1
Madukara	48,20	18	2
Banjarmangu	46,36	17	-
Wanadadi	28,27	11	-
Rakit	32,45	11	-
Punggelan	102,84	17	-
Karangkobar	39,07	13	-
Wanayasa	82,01	17	-
Kalibening	83,78	16	-
Batur	47,17	8	-
Pagentan	46,19	16	-



Pejawaran	52,25	17	-
Pagedongan	80,55	9	-
Pandanarum	58,56	8	-
Total	1069,73	266	12

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah

2. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

a) Klimatologi

Ditinjau dari iklim yang ada, Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Rata-rata curah hujan di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 lebih rendah yaitu $10,80 \text{ mm}^3$ dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu $12,80 \text{ mm}^3$.

b) Sumber Daya Air

Dari segi hidrologi, berbagai mata air yang ada di Kabupaten Banjarnegara merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri maupun kebutuhan lain seperti wisata arung jeram. Sumber air tersebut antara lain berupa sungai-sungai besar, air tanah yang terdapat di sekitar Gunung Brama, Gunung Kubang, Gunung Prahu, Gunung Raja, Gunung Raga Jembangan, Gunung Petarangan dan di lembah sungai Serayu dan beberapa telaga seperti Telaga Balaikambang, Telaga Sewiwi dan Telaga Merdada.

Disamping sungai, air tanah dan telaga, Banjarnegara juga memiliki waduk buatan PLTA Panglima Besar Sudirman yang dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah dan sebagai obyek pariwisata.

c) Panjang Saluran Irigasi

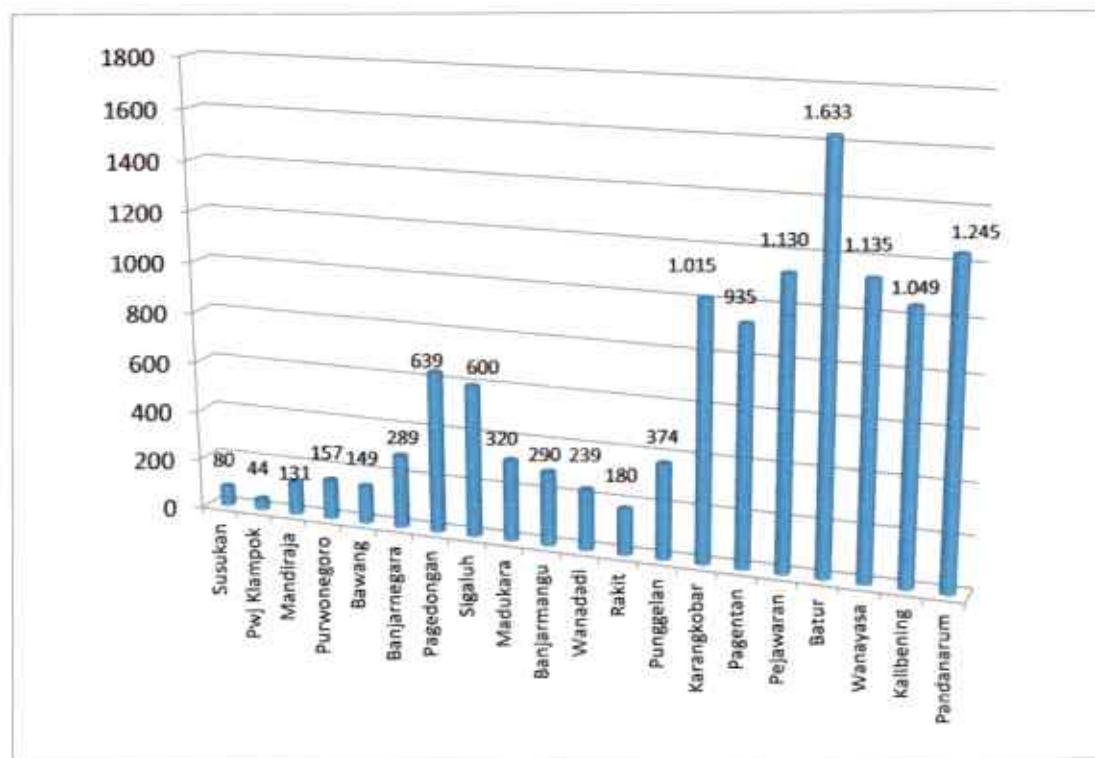
Untuk mendukung potensi pertanian dimana lahan persawahan adalah menjadi salah satu medianya, aliran sungai besar di Kabupaten Banjarnegara dimanfaatkan sebagai saluran irigasi baik irigasi primer maupun sekunder. Keseluruhan panjang saluran irigasi primer di Kabupaten Banjarnegara adalah 379.450 M dan saluran irigasi sekunder sepanjang 30.316 M. Jenis saluran primer terpanjang terletak di Kecamatan Mandiraja sepanjang 46.641 m atau 9,70% dari panjang saluran irigasi primer. Jenis saluran sekunder terpanjang di Kecamatan Madukara sepanjang 23.996 m atau 37,74% dari panjang keseluruhan irigasi sekunder, sedangkan jenis saluran tersier pada tahun 2021 tidak ada karena meningkat menjadi primer dan sekunder.



3. TOPOGRAFI

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Topografi wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beranekaragam yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan yang landai hingga curam. Ditinjau dari segi ketinggian di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Purwareja Klampok merupakan wilayah terendah yaitu 44 mdpl dan yang tertinggi adalah wilayah Kecamatan Batur yaitu 1.633 mdpl. Ketinggian wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dapat dibedakan sebagaimana tersebut dalam grafik berikut :

Grafik I.2
Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara
(di atas permukaan laut/mdpl)



Sumber Data : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021

4. ZONASI WILAYAH

Atas dasar topografi, jenis tanah, ketinggian wilayah dan keadaan hidrologi/ sumber air, wilayah Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi tiga zona wilayah sebagai berikut:

- Zona Utara: disebut Pegunungan Kendeng Utara yang berketinggian antara 600-2.500 mdpl, berbukit, curam, banyak air dan subur meliputi: Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur,



Madukara dan Banjarmangu. Komoditi: sayur mayur, jamur, teh, sapi potong, domba dan pariwisata.

- b) Zona Tengah: disebut Pegunungan Serayu Utara merupakan daerah landai yang membujur dari barat ke timur sepanjang Sungai Serayu yang mempunyai ketinggian 40-300 mdpl. Daerah ini relatif datar, banyak air/irigasi dan subur. Meliputi : sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu. Komoditi: padi, palawija, ikan air tawar, kayu, pariwisata, salak, obyek wisata dan PLTA Mrica.
- c) Zona Selatan: disebut Pegunungan Serayu Selatan merupakan pegunungan kapur, berbukit, bergelombang, curam, sedikit air dan gersang. Daerah pegunungan ini mempunyai ketinggian 300-600 mdpl, meliputi: Kecamatan Sigaluh, sebagian besar dari Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja dan sebagian Kecamatan Susukan. Komoditi: Bahan Tambang Galian C, ketela pohon, bambu, kelapa.

5. INFRASTRUKTUR DASAR

Infrastruktur dasar seperti gedung, jalan, jembatan memegang peran penting dalam merangsang dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara dalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat, sebagaimana tampak pada Tabel I.3 dibawah ini.

Tabel 1.2
Panjang Jalan di Kabupaten Banjarnegara
2016-2021 (km)

Kondisi Jalan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Baik	713,685	713,685	713,685	713,685	752,560	762,495
Sedang	104,328	104,328	104,328	104,328	75,996	78,486
Rusak Ringan	41,575	41,575	41,575	41,575	62,850	60,509
Rusak Berat	79,105	79,105	79,105	79,105	47,287	37,203
Jumlah	938,693	938,693	938,693	938,693	938,693	938,693

Sumber Data: DPUPR Kabupaten Banjarnegara

D. KONDISI EKONOMI

1. PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO

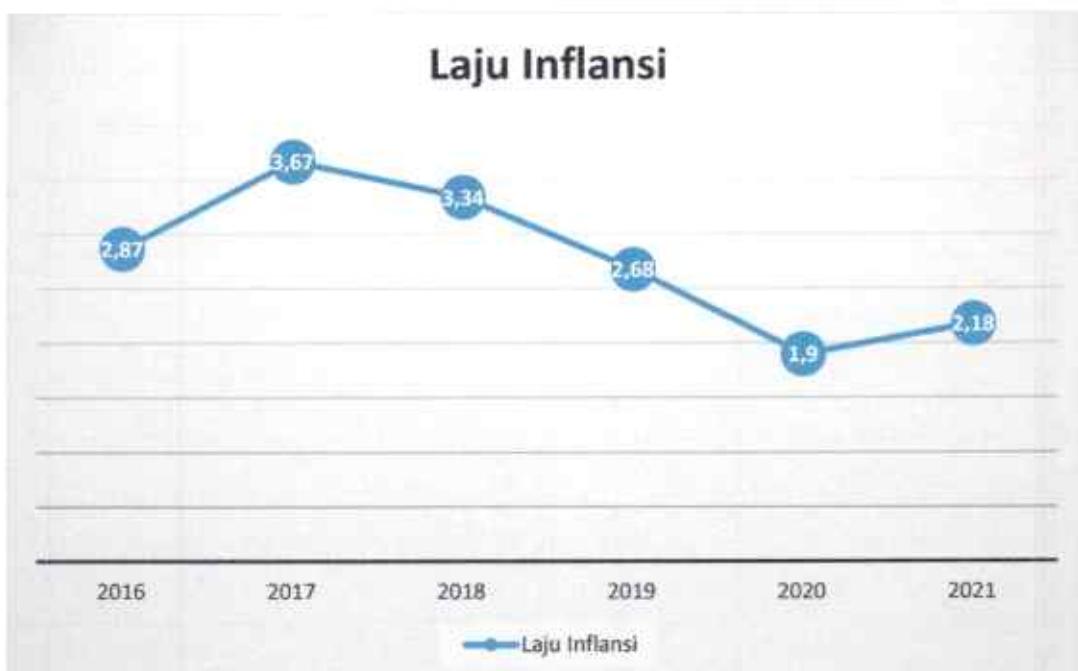
Kondisi perekonomian daerah secara umum diwujudkan dalam bentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan keberhasilan perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS Kabupaten

Banjarnegara tahun 2021, PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 22.827.887,30, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2021 sebesar Rp.15.536.477,91 megalami kenaikan dari tahun 2020, yaitu PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 21.694.338,97 sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2020 sebesar Rp.15.045.884,99.

2. LAJU INFLASI

Perubahan harga di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap angka inflasi yang merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Laju inflasi dipengaruhi oleh naik turunnya produksi barang dan jasa, distribusi serta peredaran uang di suatu daerah. Adapun laju inflasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Grafik 1.3
Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 -2021 (%)



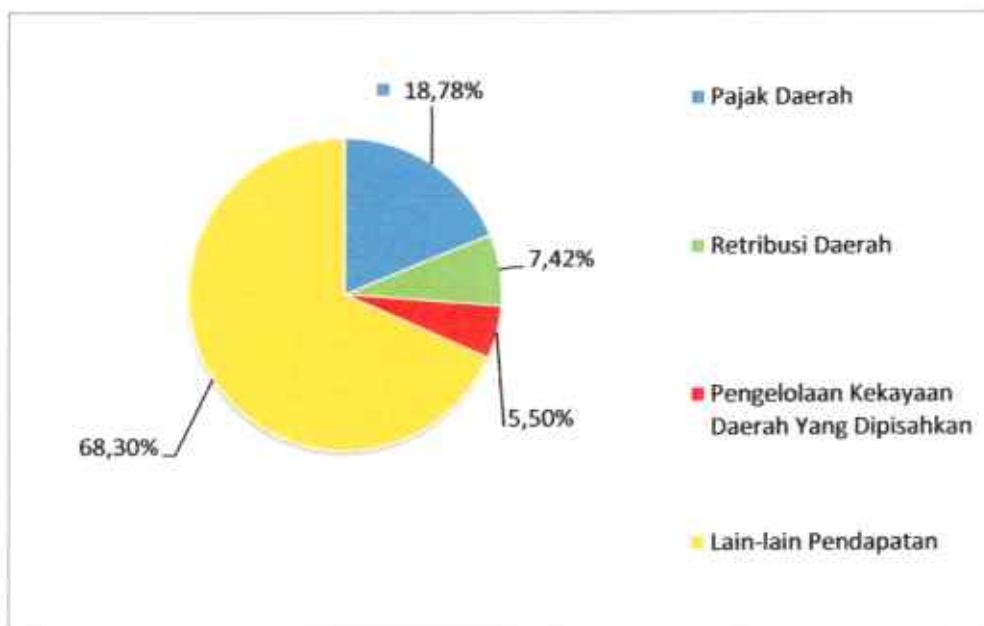
Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

3. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan cermin dari kemandirian fiskal daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Seiring dengan dilimpakkannya kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan (PBB PP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya maksimal untuk terus dapat meningkatkan derajat fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada.

Adapun komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Grafik I.4
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021



Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

E. POTENSI WILAYAH

1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a) Pertanian

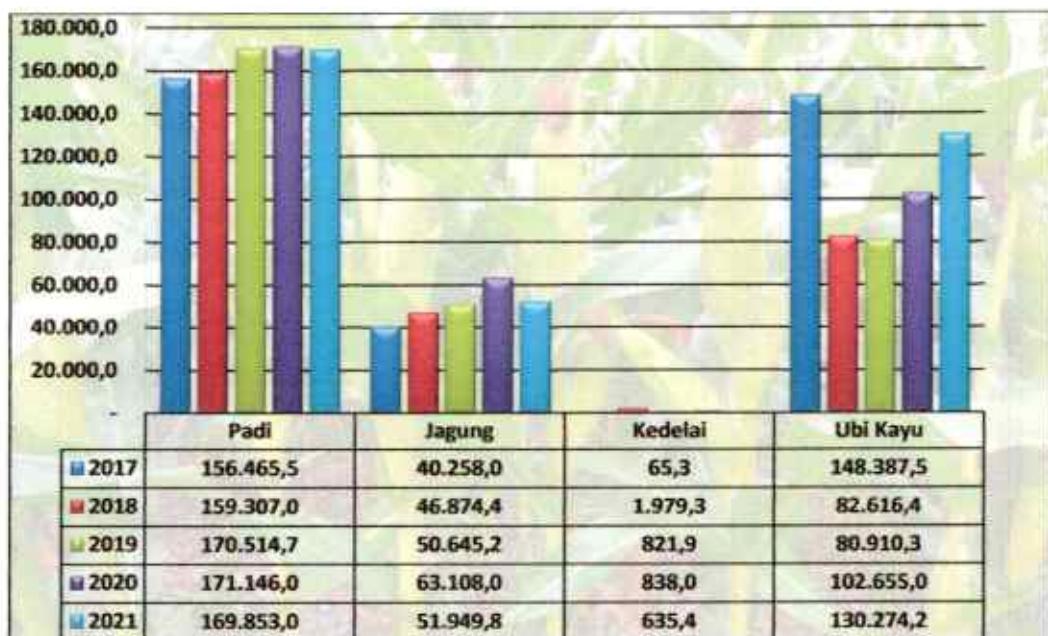
Sebagian besar potensi pertanian di Kabupaten Banjarnegara adalah pertanian bukan sawah. Kabupaten Banjarnegara dari luas lahan 106.972 Ha yang dimanfaatkan untuk pertanian bukan sawah adalah seluas 73.322,88 Ha atau 68,54%, untuk pertanian sawah seluas 13.308,58 Ha atau 12,44 % sedangkan 19.079 Ha atau 20,340,54 % merupakan lahan bukan pertanian.

Budi daya pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banjarnegara dibedakan menjadi dua, yaitu komoditas tanaman pangan dan komoditas tanaman hortikultura yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran.

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan meliputi padi, jagung dan kedelai. Sedangkan untuk hortikultura jenis buah-buahan yang dikembangkan adalah durian, salak dan pisang. Untuk hortikultura sayuran hanya kentang yang menjadi unggulan.

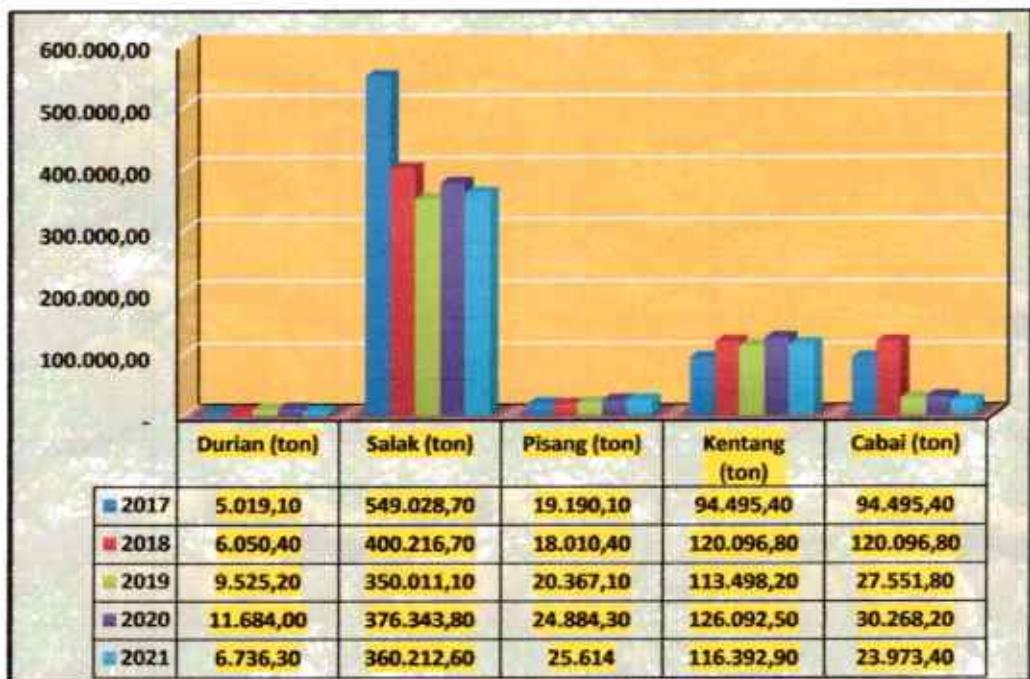
Adapun produksi padi dan hortikultura selama beberapa tahun adalah sebagai berikut:

Grafik I.5
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2021 (Ton)



Sumber Data : Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

Grafik I.6
Produksi Hortikultura Kabupaten Banjarnegara
Pada Tahun 2017-2021 (ton)



Sumber Data : Distankan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

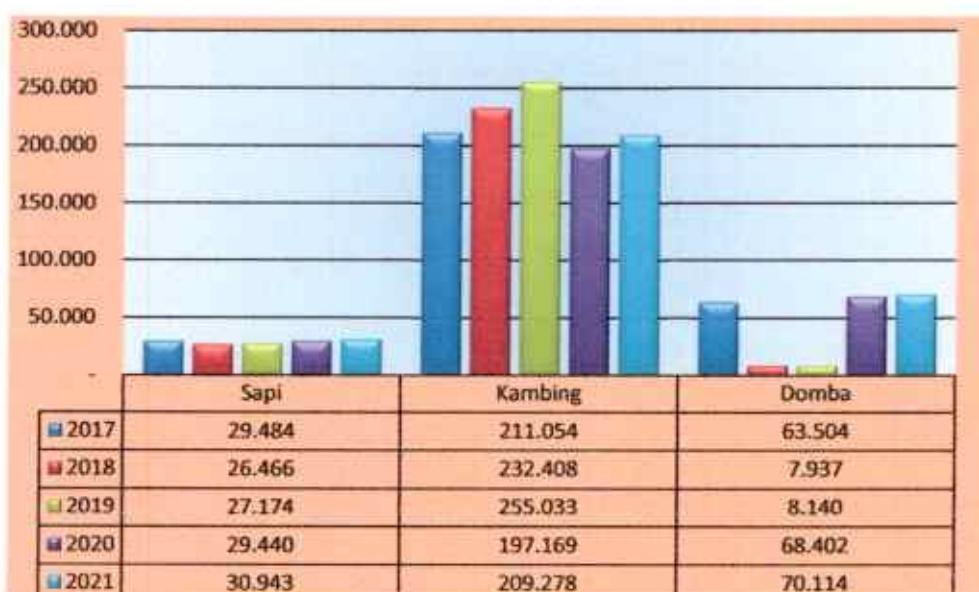
b) Peternakan

Ternak yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 3 kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk

dalam kategori ternak besar antara lain sapi, kerbau dan kuda, sedangkan ternak yang masuk kedalam kategori ternak kecil antara lain kambing, domba, babi dan kelinci sementara yang masuk dalam kategori unggas adalah kelompok ayam dan itik. Namun peternakan yang penting dan prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara adalah ternak kambing, domba dan sapi. Adapun kusus untuk populasi domba, Kabupaten Banjarnegara memiliki komoditas unggulan yaitu domba batur yang mempunyai keunggulan dibanding domba-domba yang lain. Domba Batur hanya dibudidayakan didaerah pegunungan dengan kondisi udaya yang dingin.

Adapun populasi ternak apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 1.7
Populasi Ternak Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 -2021 (Ekor)

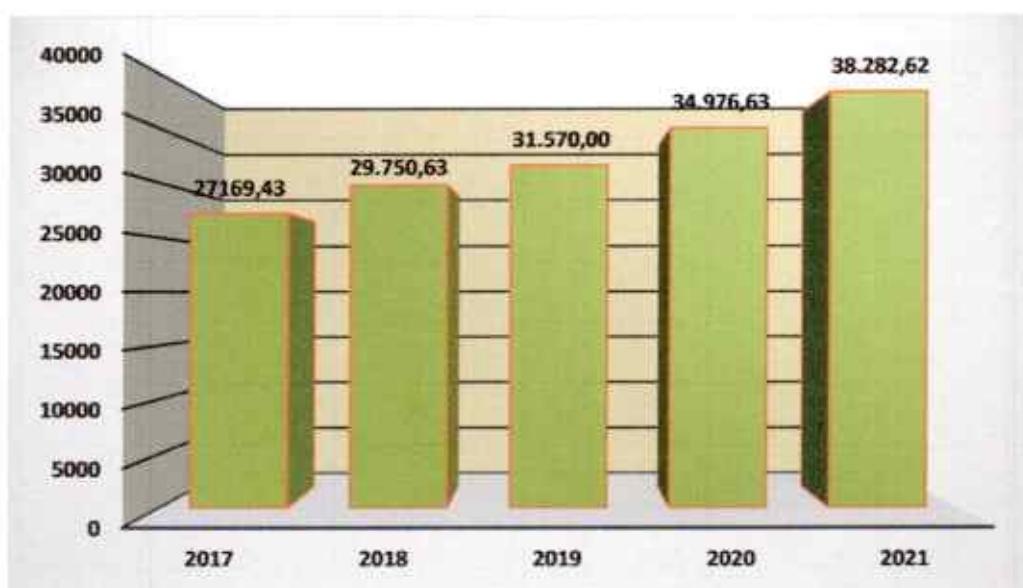


Sumber Data : Distrik dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

c) Perikanan

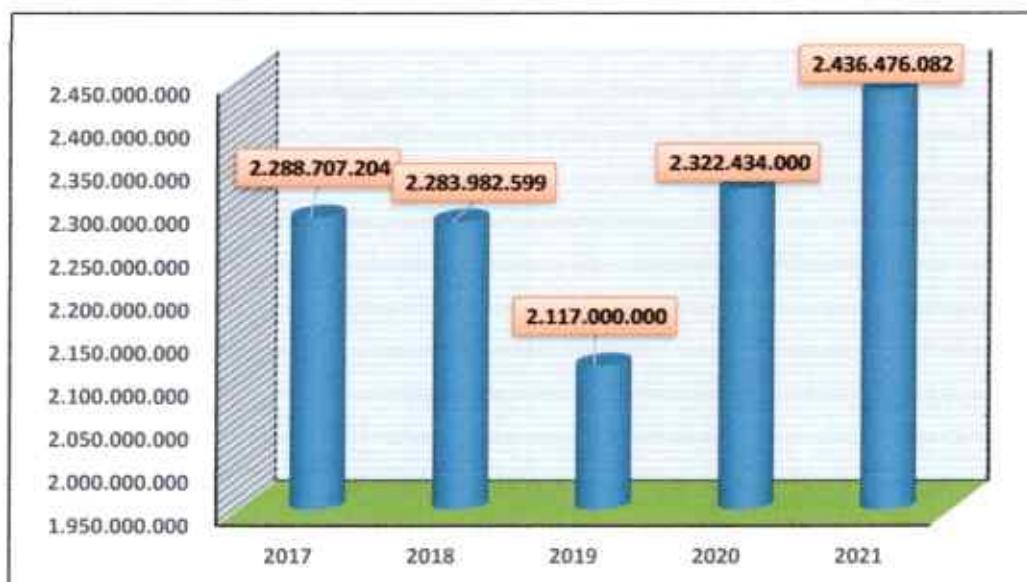
Budi daya ikan air tawar yang dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi kolam pembenihan, kolam pembesaran, mina padi, jaring apung dan perikanan sawah. Adapun jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan gurameh dan ikan nila serta ikan lele. Selain budidaya ikan, yang menjadi unggulan di Kabupaten Banjarnegara adalah produksi Benih Ikan dengan unggulannya adalah ikan nila, ikan patin dan ikan lele. Benih ikan dari Banjarnegara menjadi pemasok utama untuk mencukupi benih ikan di Jawa Tengah.

Grafik 1.8
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 – 2021 (Ton)



Sumber Data : Distangan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

Grafik 1.9
Produksi Benih Ikan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 – 2021 (ekor)

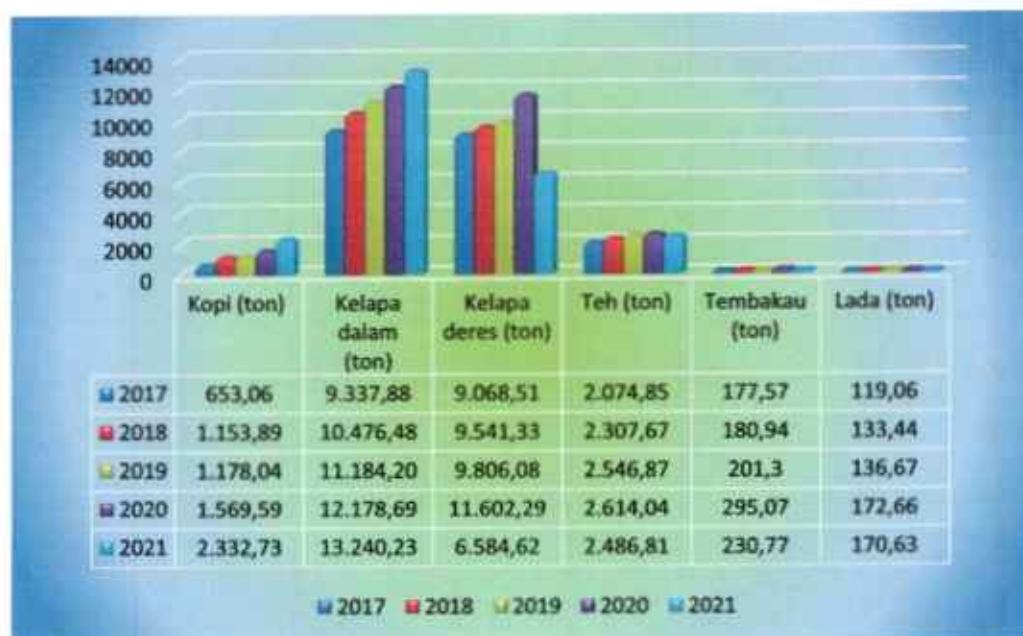


Sumber Data : Distangan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

d) Perkebunan

Tanaman perkebunan yang menjadi unggulan dan dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi kopi, kelapa dalam, kelapa deres, teh, tembakau dan lada. Selain itu di Kabupaten Banjarnegara juga dikembangkan tanaman obat-obatan seperti lada, jahe, kunyit, pohon dilem-nilam dan beberapa jenis tanaman obat lain yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.

Grafik 1.10
Produksi Perkebunan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 – 2021



Sumber Data : Distrik dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

2. POTENSI SUMBER DAYA ENERGI

Potensi sumber daya energi yang ada di Kabupaten Banjarnegara meliputi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Sudirman dengan kemampuan daya 180 Mega Watt (MW). Disamping itu juga terdapat PLTA Tulis di Kecamatan Madukara dengan kemampuan daya 12 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal (PLTG) Dieng di Kecamatan Batur dengan kemampuan daya 60 MW.

3. POTENSI INDUSTRI

Sektor industri merupakan sektor penting selain sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara. Sektor Industri dibedakan menjadi industri besar dengan nilai investasi di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), industri menengah nilai investasi Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00, dan industri kecil/mikro dengan dengan nilai investasi sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada tahun 2021 Jumlah investasi diatas 10 miliar sejumlah 16 proyek, industri menengah dengan nilai investasi Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 sejumlah 7 proyek dan industri kecil/mikro dengan dengan nilai investasi sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejumlah 1.735 proyek.

4. POTENSI PARIWISATA

Potensi wisata yang banyak dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara adalah wisata alam. Adapun obyek wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara antara lain:

- Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.



- Wisata Rekreasi Khusus Arung Jeram Sungai Serayu.
- Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas.
- Pusat Seni dan Kerajinan Keramik Klampok.
- Wisata Tirta Waduk Pangsar Sudirman.
- Taman Rekreasi Anglir Mendung Paweden.
- *Wisata Alam Curug Pitu*
- Wisata Alam Curug Sikopel.
- Wisata Alam Air Panas dan Curug Biting.
- Wisata Alam Tampomas.
- Wisata Air Panas Kali Putih.
- Curug Pletuk dikelola oleh Perhutani.
- Serayu Park.
- Surya Yudha Sport Center

F. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1. KEPENDUDUKAN

Penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,998% bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 1.029.728 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.040.008 jiwa pada tahun 2021 atau bertambah sejumlah 10.280 jiwa. Dari 1.040.008 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 529.443 jiwa atau 50,91 %, dan berjenis kelamin perempuan 510.565 jiwa atau sebesar 49,09 %. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2021

NO	Jenis Kelamin	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Laki –laki	510.395	512.082	516.192	521.256	524.380	529.443
2.	Perempuan	491.461	491.902	494.853	501.247	505.348	510.565
	JUMLAH	1.001.856	1.003.984	1.011.045	1.022.503	1.029.728	1.040.008

Sumber Data : Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 89.764 jiwa atau 8,63, % dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara atau meningkat 0,07% dari tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan



Pandanarum dengan jumlah penduduk 23.275 jiwa atau 2,24 % dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.

Untuk tingkat kepadatan penduduk tahun 2021 adalah sebesar 972,23 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Punggelan yaitu sebesar 2.766,22 jiwa per Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum 277,81 jiwa per Km².

2. KETENAGAKERJAAN

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sebesar 0,53% berimplikasi pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan. Adapun banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut jenis kelamin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel I.4
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Pencari kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tahun 2016	3.643	3.864	7.507
Tahun 2017	3.600	3.773	7.376
Tahun 2018	2.750	3.368	6.118
Tahun 2019	3.253	3.733	6.986
Tahun 2020	2.503	3.171	5.674
Tahun 2021	3.084	3.928	7.012

Sumber Data : Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara

Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan kerja pada tahun 2016 sampai 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4
Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Bekerja
Tahun 2016 -2021

No	Penempatan Tenaga Kerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	AKL	3.482	1.875	986	1.002	682	1.525
2.	AKAD	509	657	699	598	71	271
3.	AKAN	673	686	867	780	249	254
4.	INFORMAL	-		4.445	7.949	12.706	2.050
	JUMLAH	4.664	3.218	6.980	10.329	13.708	4.100

SumberData : Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara



3. MATA PENCAHARIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2021 terdapat 89 jenis mata pencaharian penduduk Kabupaten Banjarnegara. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjarnegara yang bekerja masih didominasi oleh petani/pekebun mencapai 217.218 orang atau 20,89 %, diikuti oleh penduduk belum/tidak bekerja sebesar 225.390 atau 21,67%, bekerja mengurus rumah tangga sebesar 179.906 orang atau 17,3%, Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 140.286 orang atau 13,49%, bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 65.180 orang atau 6,27% dan bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 45.638 orang atau 4,39%.

4. PENDIDIKAN PENDUDUK

Jika dilihat dari segi pendidikan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2021, sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjarnegara berpendidikan SD/MI/Sederajat. Adapun jumlah penduduk berpendidikan SD/MI/Sederajat yaitu sejumlah 379.330 orang atau 36,47%, tidak/belum sekolah sejumlah 212.970 orang atau 20,48%, SLTP/MTs/Sederajat sejumlah 164.575 orang atau 15,82%, belum tamat SD sejumlah 125.124 orang atau 12,03%, SMA/Sederajat sejumlah 123.474 orang atau 11,87%. Sedangkan jumlah penduduk berpendidikan Diploma IV/S1 sejumlah 23.011 orang atau 2,21%, Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda sejumlah 6.413 orang atau 0,62%, Diploma I/II sejumlah 4.153 orang atau 0,4%, Strata II sejumlah 915 orang atau 0,09%, dan Strata III sejumlah 43 orang.

5. KESEHATAN

Penanganan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara saat ini mengutamakan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya kesehatan. Sarana Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 meliputi pelayanan kesehatan dasar berupa Puskesmas Perawatan 15 unit, puskesmas perawatan PONED 13 Unit dan Puskesmas Perawatan Non PONED 12 unit, Puskesmas Non Perawatan 20 unit, Puskesmas Pembantu 39 unit, Puskesmas Keliling 69 unit, serta untuk pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Umum 4 unit, Rumah Sakit Khusus tidak ada, laboratorium pemerintah 1 unit, Apotek 73 unit dan posyandu 1.578. Adapun tenaga medis, keperawatan dan kebidanan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di Puskesmas, Rumah Sakit, Sarana Pelayanan Kesehatan dan Klinik sebanyak 3.948 orang yang terdiri dari dokter spesialis sejumlah 98 orang, dokter umum sejumlah 143 orang, dokter gigi sejumlah 44 orang, tenaga keperawatan sebanyak 1.009 orang, tenaga



kebidanan sebanyak 735 orang, psikolog klinis 2 orang, apoteker sebanyak 58 orang, tenaga teknis kefarmasian sebanyak 68 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 69 orang, tenaga kesehatan lingkungan sebanyak 64 orang tenaga gizi sebanyak 81 orang, tenaga keterapiam fisik 13 orang, tenaga biomedik sebanyak 35 orang, tenaga keteknisan medis sebanyak 82 orang.

6. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat tercermin dari jumlah Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan terhadap PMKS. Berdasarkan data tahun 2021 jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah 97.671 jiwa atau naik sebesar 7,55 % bila dibandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun 2020. Adapun PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2021 sebesar 59,05 % atau 54.653 jiwa.

7. KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH

Sukses tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satu faktor keberhasilan pelayanan tersebut adalah tersedianya aparatur atau Pegawai Pemerintah Daerah Otonom. Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang, maka selengkapnya kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. I.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang
(Keadaan Tahun 2017-2021)

NO	PANGKAT	GOL.	JML PEG. 31-12-2017	JML PEG. 31-12-2018	JML PEG. 31-12-2019	JML PEG. 31-12-2020	JML PEG. 31-12-2021
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	1
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	4	2	3	3	2
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	19	17	14	11	16
4.	Pembina Tk. I	IV/b	147	175	258	234	218
5.	Pembina	IV/a	2.892	2.627	2.326	2.065	1.779
6.	Penata Tk. I	III/d	850	765	799	760	684
7.	Penata	III/c	758	733	870	857	836
8.	Penata Muda Tk. I	III/b	1.164	1.115	1.434	1.398	1.362
9.	Penata Muda	III/a	977	982	812	808	1.063
10.	Pengatur Tk.I	II/d	270	297	359	336	309
11.	Pengatur	II/c	765	786	690	670	758
12.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	391	310	306	296	285
13.	Pengatur Muda	II/a	220	177	90	83	80
14.	Juru Tk. I	I/d	59	59	114	109	104
15.	Juru	I/c	155	140	79	78	76



NO	PANGKAT	GOL.	JML PEG. 31-12-2017	JML PEG. 31-12-2018	JML PEG. 31-12-2019	JML PEG. 31-12-2020	JML PEG. 31-12-2021
16.	Juru Muda Tk. I	I/b	18	7	7	7	6
17.	Juru Muda	I/a	6	3	1	1	1
	J U M L A H		8.695	8.195	8.162	7.716	7.580

Sumber Data : BKD Kabupaten Banjarnegara

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 - 2021
(keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021)

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah	%								
1	Strata 3 (S-3)	-	-	0	0.00	1	0.01	1	0,01	1	0,01
2	Strata 2 (S-2)	234	2,69	224	2.73	222	2.72	218	2,83	209	2,76
3	Strata 1 (S-1)	5.174	59,51	4.948	60,38	5.081	62,26	4.819	62,45	4.987	65,79
4	D.4	89	1,02	93	1,13	99	1,21	100	1,30	104	1,37
5.	D. III /Sarmud	951	10,94	905	11,04	942	11,54	930	12,05	1.006	13,27
6.	D. I / II	454	5,22	394	4,81	338	4,14	286	3,71	28	0,37
7.	SLTA	1.419	16,32	1.297	15,83	1.180	14,46	1.083	14,04	979	12,92
8.	SLTP	273	3,14	249	3,04	226	2,77	213	2,76	206	2,72
9.	SD	101	1,16	85	1,04	73	0,89	66	0,86	60	0,79
	Jumlah	8.695	100	8.195	100	8.162	100	7.716	100	7.580	100

Sumber Data : BKD Kabupaten Banjarnegara

G. PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS

1. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2021, APM jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 79,42%, APM jenjang SD/MI/Paket A sebesar 86,76% dan APM jenjang PAUD sebesar 75,24%.
- b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian angka rata-rata UN SD/MI yang sebesar 6,42 (2019), angka rata-rata UN SMP/MTs yang sebesar 5,13 (2019). Pada tahun 2021 Ujian Nasional SD dan SMP tidak diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
- c. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini antara lain terlihat dari rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk pada tahun 2021 untuk SD/MI sebesar 60,18 dan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk untuk SMP/MTS sebesar 20,64.

2) Kesehatan

- a. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. Hal ini antara lain terlihat dari capaian Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2021 sebesar 287,1 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 12,81 per 1000 kelahiran hidup dan masih ditemukannya balita gizi buruk capaian 0,07%, sehingga perlu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan ibu dan anak.
- b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban ganda penyakit dan penyakit degeneratif. Hal ini terlihat dari Dinas Kesehatan pada tahun 2021 kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) sebanyak 4 kasus, penemuan pasien TB 51,9% atau sebanyak 838 kasus, jumlah penderita malaria baru (API) 0,007%. HIV sebanyak 23 kasus, AIDS sebanyak 373 Kasus, Peningkatan kasus Hipertensi dan Diabetes Militus. Serta kasus penularan Virus *Covid-19* tahun 2021 tercatat 17.774 dengan rincian jumlah kasus positif 8.887 kasus, sembuh 8.350 orang, meninggal sejumlah 537 kasus.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal dan belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2021 sebesar 75,4, cakupan perilaku hidup bersih dan sehat strata utama dan paripurna 89,3%.



3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya kualitas jalan dan jembatan. Hal ini terlihat dari capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang hanya sebesar 81,229% pada tahun 2021 masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 3,964 % atau 37,203 km.
- b. Masih rendahnya sistem *drainase* akibat saluran *drainase* tersumbat, dan belum semua ruas jalan memiliki saluran *drainase/gorong-gorong*. Hal ini terlihat dari panjang jalan yang memiliki trotoar dan *drainase/saluran pembuangan air* (minimal 1,5 m) pada tahun 2021 sebesar 3,36%.
- c. Masih rendahnya persentase capaian rumah bersanitasi pada tahun 2021 sebesar 65,247%.

4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Belum optimalnya kualitas perumahan. Hal ini terlihat dari rasio rumah layak huni tahun 2021 sebesar 80 %, dan rumah tangga pengguna air bersih yang baru mencapai 95,22 %.

5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- a. Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, disebabkan keterbatasan jumlah personil, sarana prasarana dan anggaran untuk operasional patroli.
- b. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.

6) Sosial

- a. Bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2021, yaitu sebesar 97,671 PMKS, sementara cakupan penanganannya sangat terbatas. Hal ini terlihat dari persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 59,05 %.
- b. Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan PMKS. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh capaian peran serta lembaga masyarakat yang aktif tahun 2021 sebesar 27,99 % atau 103 lembaga masyarakat dan yang perorangan sebesar 27,65 % atau 339 orang.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS meliputi penanganan penyandang disabilitas, penanganan eks psikotik, penanganan korban tindak kekerasan serta penanganan korban bencana (penyediaan logistik dan psikososial).



2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

- a. Masih adanya pengangguran dan rendahnya kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 5,86 % dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2021 sebesar 69,76%.
- b. Belum semua perusahaan menerapkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2021 sebesar 59,91%.

2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak, ditandai dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga eksekutif tahun 2021 sebesar 2,13% dan legislatif sebesar 26%.
- b. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, penelantaran, eksplorasi terhadap perempuan dan anak, namun belum disertai sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai. Hal ini ditandai oleh rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2021 sebesar 0,043% dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- c. Pada tahun 2021 Kabupaten Banjarneagara telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak Pratama, namun demikian perlu dioptimalkan pemenuhan hak anak pada 6 klaster layak anak.
- d. Lemahnya sistem data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender. Hal ini nampak pada angka indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 baru mencapai 73,20 %.

3) Pangan

- a. Adanya potensi kerawanan pangan di Banjarnegara yang dipengaruhi oleh produksi pangan yang rendah, kemiskinan, kurang lancarnya distribusi pangan, dan seringnya terjadi bencana alam.
- b. Cadangan pangan daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 mencapai 169,855 ton. Sedangkan persentase penguatan cadangan pangan daerah tahun 2021 sebesar 60,65%. Kondisi ini belum sesuai dengan syarat persentase penguatan cadangan pangan daerah sebesar 80 %. Maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan persentase penguatan cadangan pangan daerah.
- c. Stabilitas harga pangan pokok belum optimal dimana capaian pada tahun 2021 baru mencapai 5,1%.
- d. Kualitas konsumsi pangan belum optimal, dengan tingkat ketergantungan konsumsi terhadap beras yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021 yang baru tercapai 89%.



e. Belum optimalnya kontrol terhadap pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya pada produk pangan segar dan bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan.

f. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pangan.

g. Potensi pangan lokal belum ditangani secara optimal.

4) Lingkungan hidup

a. Menurunnya kualitas air permukaan (air danau/waduk/embung) dan menurunnya potensi sumber daya air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh indeks kualitas air pada tahun 2021 yang baru mencapai 47,5.

b. Belum optimalnya penanganan limbah sehingga dapat memberikan dampak pada penurunan kualitas air dan udara. Hal ini ditunjukkan oleh indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sampai dengan tahun 2021 yang baru mencapai 65,24%.

c. Masih rendahnya penanganan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah persampahan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penanganan sampah pada tahun 2021 yang baru mencapai 70 %.

d. Semakin luasnya kerusakan lahan, khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng dan terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor.

e. Belum optimalnya antisipasi dampak atas pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan.

5) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Belum optimalnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini antara lain ditunjukkan sampai dengan tahun 2021 kepemilikan KTP 99,84%, kepemilikan akte kelahiran 0 – 4 tahun sebesar 14,24%, 5-9 sebesar 16,58%, 10-14 tahun sebesar 15,47% dan 15-19 tahun sebesar 12,63%.

b. Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan.

6) Pemberdayaan masyarakat desa

a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat sampai dengan tahun 2021 sebesar 36,95%.

b. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa/kelurahan. Hal ini antara lain



ditunjukkan oleh persentase perkembangan Bumdes tahun 2021 sebesar 83,80 % .

- c. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, keuangan, profil, penataan batas dan tata ruang desa.

7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi Jangka Panjang pada ibu, dimana dapat bekerja lebih efektif dalam menekan angka kehamilan.
- b. Masih tingginya Pasangan Usia Subur ber-KB tapi tidak terpenuhi (*Unmet need*) tahun 2021 sebesar 6,98%.
- c. Masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja, dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga melalui kelompok kegiatan UPPKS dalam pengingkatan pendapatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan dalam upaya mewujudkan pengendalian penduduk hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka *Total Fertility Rate* sebesar 1,94 pada tahun 2021.

8) Perhubungan

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sampai dengan tahun 2021. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh jumlah terminal bus yang hanya berjumlah 6 unit dan kurangnya sarana prasarana keselamatan jalan terutama rambu, marka, penerangan jalan umum dan guardrail yang sampai saat ini baru terpenuhi 82,22 %.
- b. Belum semua daerah pada tahun 2021 mempunyai jaringan trayek. Hal ini ditunjukkan dengan rasio izin trayek yang tersedia baru mencapai 0,046%.
- c. Kurangnya kapasitas SDM dalam manajemen keselamatan lalu lintas dan belum tersusunnya perencanaan rekayasa lalu lintas.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga fasilitas dan perlengkapan LLAJ.

9) Komunikasi dan informatika

Belum terintegrasinya jaringan dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.



- 10) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - a. Masih rendahnya kualitas koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat. Koperasi aktif sampai dengan tahun 2021 tercatat sebesar 46,32%.
 - b. Daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
 - c. Masih rendahnya sumberdaya manusia pengelola koperasi, khususnya yang berbasis masyarakat.
- 11) Penanaman modal
Nilai persetujuan investasi dan nilai realisasi investasi belum optimal yang disebabkan karena fasilitasi investasi yang belum optimal, sarana prasarana pendukung investasi yang belum memadai, dan belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi. Pada tahun 2021 nilai investasi sebesar Rp. 346.889.648.735,-
- 12) Kepemudaan dan olahraga
 - a. Belum optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.
 - b. Belum optimalnya prestasi olahraga, pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi dan sarana prasarana olahraga yang masih kurang.
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga rekreasi.
- 13) Statistik
Kurang optimalnya ketersediaan data guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah.
- 14) Persandian
Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.
- 15) Kebudayaan
 - a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian daerah karena pengaruh budaya luar.
 - b. Belum optimalnya pelestarian adat dan tradisi masyarakat.
 - c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah.
 - d. Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 baru mencapai 51,43%.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan museum sebagai daya tarik wisata.
- 16) Perpustakaan
 - a. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
Pada tahun 2021 jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 13.421



pengunjung, baik pengunjung di Perpustakaan Daerah maupun pengunjung perpustakaan digital.

- b. Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan lembaga lain.
- c. Belum ditemukannya naskah kuno dan etnis nusantara yang dibukukan.
- d. Belum adanya penguatan literasi.

17) Kearsipan

- a. Masih kurangnya kompetensi SDM pengelola karsipan dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan arsip/dokumen.
- b. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal ini ditandai oleh pengelolaan arsip secara baku sampai dengan tahun 2021 yang baru mencapai 33,32 %.
- c. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk menyerahkan arsip dinamis inaktif untuk dikelola oleh unit pengolah arsip daerah.
- d. Belum terbangunnya jaringan informasi karsipan serta pengelolaan arsip berbasis IT.

3. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan perikanan

- a. Pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan masih belum optimal.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 tercatat sebesar 38.282,62 ton.
- c. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya air untuk budidaya perikanan dengan sektor yang lain.
- d. Kurangnya kuantitas dan kompetensi petugas teknis perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan bina kelompok pembudi daya ikan pada tahun 2021 sebesar 17,1%.
- e. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dipengaruhi penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

2) Pariwisata

- a. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha dan jasa pariwisata.
- b. Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran ekonomi kreatif.
- c. Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2021 sebesar 4,41%.



3) Pertanian

- a. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2021 masih berada di angka 102,63%, dibawah target RPJMD, dimana pada tahun 2021 NTP ditarget 103 – 104 %.
- b. Produksi peternakan khususnya domba batur belum mampu mengembangkan menjadi komoditas andalan Kabupaten Banjarnegara karena populasinya yang cenderung stagnan.
- c. Berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian.

4) Perdagangan

- a. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan, terlihat dari kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB hanya sebesar 10,07% (2019).
- b. Cakupan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat rendah pada tahun 2021, terlihat dari persentase UMKM yang terfasilitasi kegiatan promosi/pameran, dari 28.218 UMKM hanya 5 UMKM yang mengikuti pameran/promosi ke luar daerah.
- c. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata. Hal ini terlihat dari cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2021 yang baru 333 orang.
- d. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih.
- e. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.

5) Perindustrian

- a. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah disebabkan oleh keterampilan SDM, penggunaan teknologi, dan akses permodalan yang masih rendah. Tahun 2021 Jumlah industri kecil menengah dan besar tercatat sebesar 22.831 unit yang terdiri dari industri kecil sejumlah 22.788 unit dan industri menengah sejumlah 35 unit dan besar 8 unit.
- b. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk.
- c. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk UKM / IKM.

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Administrasi pemerintahan



- a. Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru.
- b. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP), serta belum sepenuhnya melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- c. Belum semua perangkat daerah memberikan perhatian dalam mengoptimalkan data-data pendukung terkait kematangan kelembagaan.
- d. Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja yang disajikan Perangkat Daerah belum menggambarkan kinerja Perangkat Daerah, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun aktifitas yang dilaksanakan.

2) Pengawasan

- a. Kurangnya cakupan pemeriksaan disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM pemeriksa.
- b. Masih kurangnya kompetensi SDM pemeriksa sesuai dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- d. Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin.

3) Perencanaan

- a. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan belum optimal.
- b. Adanya amanat pemerintah kepada daerah terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan multi sektor perlu ditindaklanjuti.
- c. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

4) Keuangan

- a. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar 15,04%.
- b. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja setiap tahunnya.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, terutama aset tanah yang belum bersertifikat.

5) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

- a. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih kurang.
- b. Penempatan PNS yang kurang proporsional sesuai kebutuhan.



- c. Masih banyaknya kasus indisipliner pegawai.
- d. Jumlah PNS yang semakin berkurang karena jumlah PNS yang purna tugas lebih besar daripada penerimaan PNS.

2. ISU STRATEGIS

Rumusan isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang kurang merata

Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 16,23% dan gini rasio (ketimpangan pendapatan) merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan Indeks Gini sebesar 0,34 (kategori sedang) pada tahun 2015.

2. Perkembangan sektor perekonomian utama relatif lambat

Nilai investasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 346.889.648.735,-, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB -1,94 % (2020) produksi pertanian cenderung menurun dan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 28.218 unit.

3. Kualitas pendidikan dan derajat kesehatan belum optimal

Kondisi kualitas Pendidikan dan kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat dari angka rata-rata UN SD/MI sebesar 6,42 (2019), angka rata-rata UN SMP/MTs yang sebesar 5,13 (2019), ruang kelas SD/MI kondisi baik 57,91%, dan ruang kelas SMP/MTs kondisi baik 87,04%, guru SD/MI sederajat yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 94,08 % %, guru SMP/MTs sederajat yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 97,15%. Sedangkan derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator jumlah kasus AKI sebesar 287,1 per 100.000 KH, AKB sebesar 12,81 per 1000 KH, persentase balita gizi buruk (BB/TB) sebesar 0,07%, dan kasus stunting sebesar 22,7%.

4. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai

Walaupun persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 81,229%, namun persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) sampai dengan tahun 2021 baru sebesar 3,36%. Sedangkan persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 95,22%. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, seperti area parkir, terminal tipe c, halte, belum semua daerah mempunyai jaringan trayek, dan belum semua jaringan jalan dan daerah rawan kecelakaan memiliki fasilitas keselamatan jalan.

5. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan

Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan terutama ditandai oleh terjadinya banjir dan gerakan tanah yang berpotensi longsor, meluasnya jumlah lahan kritis, degradasi tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lahan akibat cara budidaya yang



salah. Bertambahnya jumlah industri yang menghasilkan limbah, menurunnya potensi sumberdaya air bersih, menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, menurunnya kualitas air, meningkatnya jumlah timbulan sampah akibat pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta masih rendahnya budaya dan kepedulian terhadap lingkungan juga berkonstribusi cukup signifikan terhadap penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan .

6. Belum optimalnya pemberdayaan gender

Hal ini ditandai dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Adapun IDG Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sebesar 73,20 (2020).

7. Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah baru sebesar 15,04% (APBD TA 2021), persentase Aset tanah Pemda yang bersertifikat pada tahun 2021 52,10% atau 878 bidang dari 1.685 bidang dan persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2021 sebesar 33,32 % dan tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 3, dan tingkat maturitas SPIP pada level 3.

8. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah

Hal ini ditandai oleh mulai bergesernya nilai-nilai yang hidup di masyarakat, seperti mulai lunturnya budaya gotong royong, sopan santun, konsumsi minuman keras, dan sebagainya.

9. Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana

Hal ini ditandai oleh banyaknya jenis bencana alam yang rawan terjadi yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir. Sedangkan berdasarkan wilayah administratif, sebanyak 85% wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. VISI & MISI

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi :

“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Prioritas Kebijakan Periode 2017 - 2022

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan kondusivitas wilayah	1 Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Pemanfaatan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	1 Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat 2 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1 Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggap daruratan bencana	1. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana 2. Penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel	
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan lokal	1 Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan local	Penguatan karakter yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	
kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi 3 Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	2 Meningkatkan politik masyarakat Percepatan pengarusutamaan gender	

MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Meningkatnya transparansi layanan public	1 Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau dan 2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1 Menyederhanakan prosedur layanan publik 2 Meningkatkan cakupan pelayanan hak-hak kependudukan
	2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Peningkatan kualitas perencanaan pengendalian, pengawasan dan pembangunan	1 Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan 2 Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Pembinaan dan peningkatan aparatur	1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan terintegrasi dengan seluruh aspek dan berbasis data 2 Meningkatkan kualitas perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas perencanaan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data 2 Meningkatkan kualitas perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	1 Fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM aparatur 2 Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa	1 Fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM aparatur



MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	1 Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas manajemen infrastruktur jalan dan jembatan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Membentuk Unit Penanganan Jalan 2 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan pendukung perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi	
Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	1 Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	1 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan 2 Peningkatan sumber daya dan kelembagaan pertanian dan perikanan 3 Peningkatan penanganan pasca panen	Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian
	2 Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	1 Peningkatan daya saing destinasi pariwisata 2 Pengembangan pemasaran dan kerjasama pariwisata	
3 Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	1 Peningkatan pendampingan dan pembinaan UKM 2 Peningkatan manajemen koperasi	Peningkatan kemampuan kewirausahaan	
	4 Meningkatnya jumlah investasi	Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif	Menyediakan regulasi dan prosedur perizinan yang pro investasi





Tujuan	Sasaran			Strategi	Prioritas Kebijakan
5 Meningkatnya kesempatan kerja				1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja	Fasilitasi informasi lapangan kerja
				2 Penciptaan lapangan kerja	
				3 Peningkatan kesejahteraan pekerja	
6 Meningkatnya kinerja sektor industri perdagangan				1 Pengembangan agroindustry	
				2 Peningkatan daya saing industri kreatif perdagangan	Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima
7 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan				Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan	
				Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas pemicu inflasi dan tarikan permintaan	Meningkatkan pengawasan harga komoditas
8 Meningkatnya stabilitas harga					
Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah				1 Peningkatan perhubungan antar kecamatan	Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan untuk pertumbuhan ekonomi
				2 Pengembangan pusat-pusat kegiatan local	
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan				1 Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup	
				2 Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan	
				3 Perlindungan sumber-sumber air dan mata air, khususnya di daerah hulu dan areal hutan rakyat	

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2 Meningkatnya kemandirian daerah	1 Penerapan sistem pengelolaan keuangan terpadu 2 Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Optimalisasi pengelolaan keuangan melalui integrasi e- <i>planning</i> dan e- <i>budgeting</i> 2 Penyederhanaan prosedur pengelolaan Keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal 2 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset Daerah
		Peningkatan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah 2 Ektensifikasi pendapatan asli daerah melalui pemberdayaan aset daerah



MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1 Meningkatnya ketahanan pangan 2 Meningkatnya cakupan rumah layak huni 3 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Penguatan 3 pilar ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi) 1 Fasilitasi perumahan swadaya bagi MBR yang memiliki tanah 2 Penyediaan perumahan layak huni bagi MBR yang belum memiliki tanah 3 Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Memperkuat identifikasi target sasaran bantuan RTLH
	3 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	1 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan 2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan 3 Peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu	Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan
	4 Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	1 Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas 2 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit 3 Peningkatan Upaya Promosi dan pemberdayaan Kesehatan	Meningkatkan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat





Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	1 Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan 2 Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Sosial	4 Peningkatan sarana prasarana kesehatan dalam rangka perluasan cakupan pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka Pelaksanaan strategi Penanggulangan kemiskinan

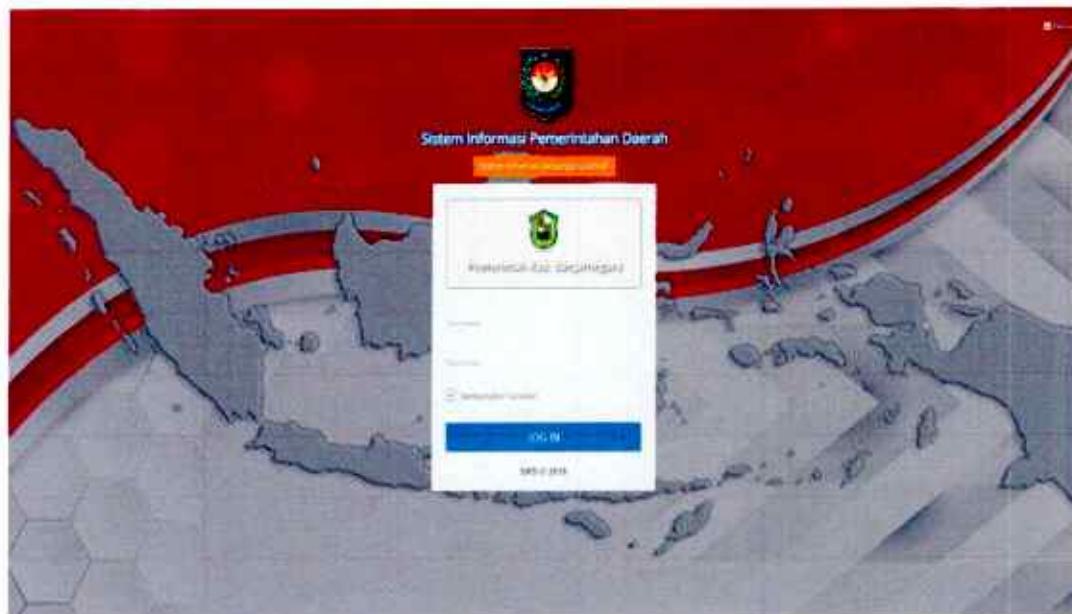


B. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA KINERJA

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah)

SIPD merupakan sistem informasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sistem informasi ini disusun untuk mendukung pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah dan mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum OPDD, Musrenbang Kabupaten, Hasil Reses DPRD dan Evaluasi RKPD. Selain itu, SIPD digunakan untuk pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, sistem ini juga digunakan sebagai sistem penganggaran dan proses penatausahaan keuangan daerah, sehingga terwujud integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Gambar 2.1.
Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)



2. Simda BMD (Barang Milik Daerah)

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi pencatatan dan penyajian data terhadap beberapa tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, penggunaan aset, penatausahaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan pengapsusan aset. Melalui aplikasi ini inventarisasi terhadap



barang milik daerah akan terhimpun dalam sebuah *data base* yang memudahkan untuk dapat diakses setiap saat.

**Gambar 2.3.
Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)**



3. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi penyajian data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada semua SKPD. Tujuan adanya SIRUP adalah dalam rangka keterbukaan informasi publik sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya dengan mudah.

**Gambar 2.4.
Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)**

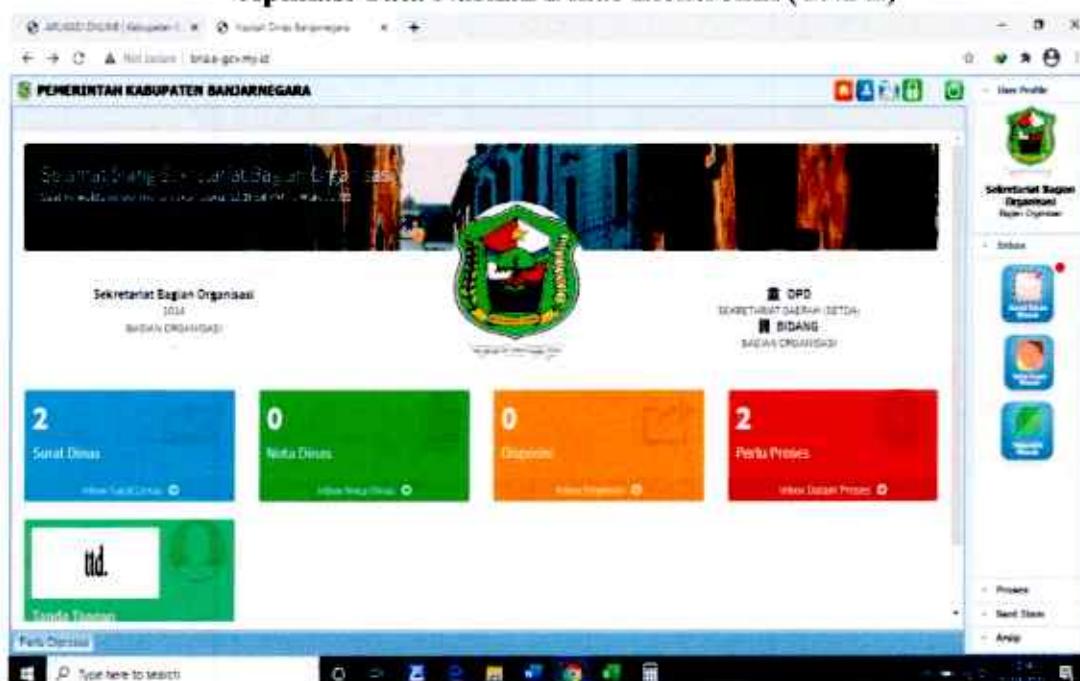




4. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)

Merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam bidang tata naskah dinas. Melalui aplikasi ini pengelolaan tata naskah dinas menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam Tata Naskah Dinas Elektronik pengelolaan surat menyurat tidak lagi melalui tatap muka secara langsung baik dari konseptor ke penandatangan maupun dari pengirim ke penerima surat, karena begitu konsep surat disetujui oleh penandatangan, maka pada saat itu juga surat tersebut terkirim dan dapat dibaca oleh penerima surat. Aplikasi ini berbasis internet, dengan adanya aplikasi ini terdapat efisiensi waktu dalam pengelolaan dan pengiriman surat.

**Gambar 2.5.
Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)**



5. SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

Merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka penyediaan data pilah gender daerah. Aplikasi ini mempermudah SKPD dalam melaporkan data pilah gender sehingga bisa digunakan secara *online*. Aplikasi ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan data pilah gender daerah.



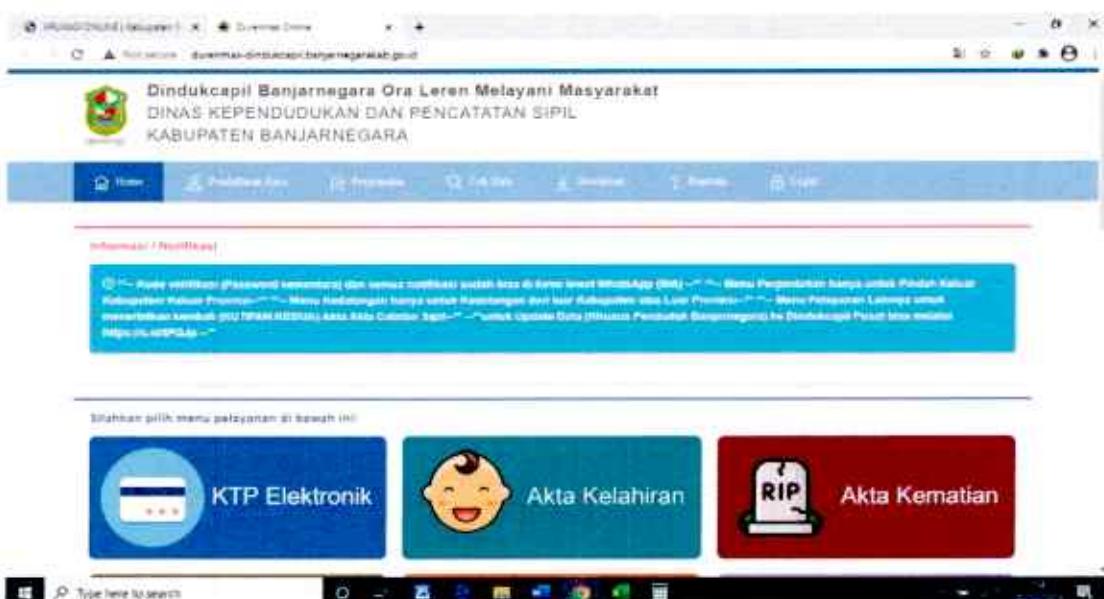
Gambar 2.6.
Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)



6. Durenmas

Merupakan sistem informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pelayanan kependudukan secara langsung di tempat domisili masyarakat, sehingga dengan sistem ini masyarakat tidak perlu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

Gambar 2.7
Aplikasi Kependudukan Durenmas

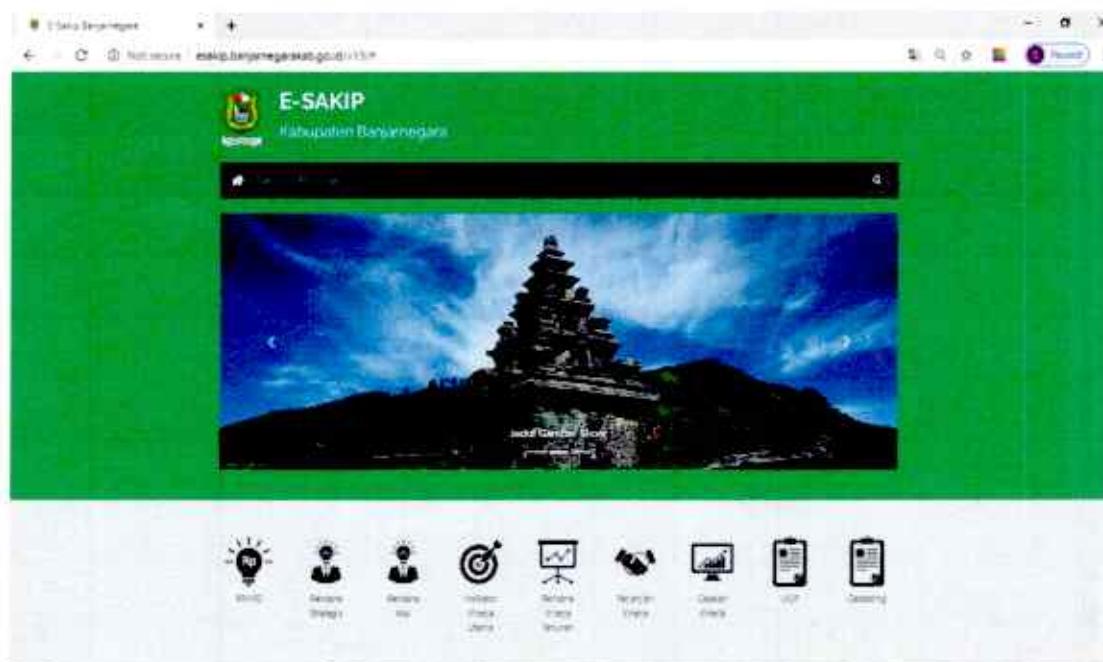




7. ESAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya.

Gambar 2.8
Aplikasi E-Sakip Kabupaten Banjarnegara



8. SIMPETIN (Sitem Peta Investasi)

SIMPETIN adalah sistem yang digunakan untuk membantu dalam mengelola informasi mengenai sektor-sektor yang berpotensi dalam investasi. Sistem ini menampilkan peta dalam format yang menarik dilengkapi dengan peta pendukung untuk membantu investor dalam menilai dan memilih sektor potensi investasi di Kabupaten Banjarnegara.



Gambar 2.9
Aplikasi Simpetin Kabupaten Banjarnegara



C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara ditetapkan 5 (lima) misi, 12 (dua belas) tujuan, 28 (dupuluh delapan) sasaran, 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2017 bila diuraikan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Bupati Banjarnegara tahun 2021 terdiri dari 5 misi dimana misi 1 berisi 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator, pada misi 2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator, pada misi ke-3 terdiri dari 12 (dua belas) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator, pada misi ke-4 terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator, sedangkan pada misi ke-5 terdiri dari 6 (enam) sasaran dan 7 (tujuh) indikator, terinci pada lampiran I.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal, yaitu :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91%≤100%	Sangat Tinggi	●
76%≤90%	Tinggi	■
66%≤75%	Sedang	▶
51%≤65%	Rendah	◆
≤ 50%	Sangat rendah	▼

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{Rata-rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

I. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 12 (dua belas) tujuan, 28 (dua puluh delapan) sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Dua belas tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kondusivitas wilayah, dengan indikator tujuan: Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dengan indikator tujuan: Persentase desa tangguh bencana.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi, dengan indikator tujuan: Indeks Kebudayaan.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik, dengan indikator tujuan: Survey Kepuasan Masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dengan indikator tujuan: Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.
7. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, dengan indikator tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita.
8. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, dengan indikator tujuan: Indeks Williamson.
9. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
10. Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan, dengan indikator tujuan: Rasio kemandirian keuangan daerah;
11. Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas, dengan indikator tujuan: Indeks Pembangunan Manusia.
12. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator tujuan: Presentase Penduduk Miskin.

Ke- 12 (dua belas) tujuan tersebut selanjutnya diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja dan 28 (dua puluh delapan) sasaran tersebut diukur dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir tahun 2021 tercapai dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kriteria sangat tinggi, 5 (lima) indikator kriteria tinggi, 3 (tiga) indikator kriteria sedang dan 4 (tiga) indikator kriteria sangat rendah.



Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sebesar 106,93 % dengan kategori sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

NO	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2020	Tahun 2021				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capaian %	Ket	
MISI : I								
T1. S1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	62,25	78,75	70	88,89	█	78,75
T2. S2.	Persentase desa tangguh bencana	%	30,26	41,05	38,97	94,93	█	52,63
T3. S3.	Indeks Kebudayaan	Angka	47,87	68,68	89,36	130	█	77,71
S4.	Persentase pemilih dalam pemilu	%	0 0	PilPres 0 PilLeg 0	76,15** 76,11**	100 100	█	PilBup 70-75%
S5.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	72,84	68,75	73,20*	106,47	█	69,25
MISI : II								
T1. S1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	82,30	79	82,56	100,31	█	80
T2	Indeks Reformasi Birokrasi (<i>Indikator Tujuan</i>)	Angka	62,54	NA	63,01	100	█	78,73
S2.	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka	B	B	B*	100	█	B
S3.	Persentase Peningkatan Desa berkembang	%	3,98	3	4,31	143,67	█	3
MISI : III								
T1.S1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	80,171	71 s.d 73	81,23	111,27	█	73 s.d. 75
S2	Luas sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	16.830	17.003	17.323	101,88	█	17.496
S3	Pertumbuhan sektor pertanian	%	3,53	2,7 s.d 3,7	3,06*	100	█	3 s.d. 4
S4	Nilai Tukar Petani (umum)	%	105,63	103 s.d 104	102,45	99,46	█	103 s.d. 105
S5	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	-42,38	3	13,92%	464	█	3
S6	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	10,07	13 - 14	10,07*	77,46	█	14 s.d. 15
S7	Persentase koperasi sehat	%	30,07	37 s.d 38	27,55	74,46	█	38 s.d. 39
S8	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	-50,7	15 s.d 17,5	22,08	147,2	█	17,5 s.d. 20
S9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86	< 4,6	5,86	72,61	█	< 4,5



NO	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2020	Tahun 2021				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capaian %	Ket	
S10	Pertumbuhan sektor industri	%	-1,94	7 s.d 8	-1,94*	-27,71	▼	7,1 s.d 8
S11	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	-4,82	8,3 s.d 9	-4,82*	-58,07	▼	8,4 s.d 9
S12	Laju inflasi	%	1,9	3 ± 1	2,18	127,33	●	3 ± 1
T2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Indikator Tujuan)	%	-1,32	5,4 – 5,75	-1,32*	-24,44*	▼	5,4 s.d 5,75
T3.	PDRB Per Kapita (Indikator Tujuan)	Rp.	21,9	>21 Juta	21,9 Juta*	104,29*	●	> 21,5 Juta
T4.S13	Indeks Williamson	Angka	0,492	0,44	0,492*	88,18	■	0,43
T5.S14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	72,78	69	62,36	90,38	■	69,25
MISI : IV								
S1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP*	100	●	WTP
T1.S2	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	11,98	9,38	15,04	160,34	●	9,48
MISI : V								
T1.	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	67,45	NA	67,86	100	●	70,32
S1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	91,6	> 93	89	95,70	●	> 95
S2	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	%	71,55	89±1	80	89,89	■	90 ± 1
S3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,74	6,57 s.d 6,65	6,75	101,50	●	6,65 s.d. 6,72
S4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,8 ± 0,2	11,63	98,56	●	11,9 ± 0,2
S5	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,18	74,01	74,28	100,36	●	74,08
T2.S6	Persentase penduduk miskin	%	15,64	15,2 s.d 14,6	16,23	88,84	●	14,6 s.d. 14
S7	Persentase Penurunan PMKS	%	6	-0,2	7,55	-35,75%	▼	-0,2
Rata – rata Capaian								
Tujuan		13					●	
Sasaran		31					●	

Keterangan :

T = Tujuan dan S = Sasaran

* 2020

**2019

Dilihat dari pengukuran kinerja diatas secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021. Adapun rata-rata capaian per misi adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Per Misi
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Misi	Jumlah Indikator		Rata-Rata Capaian		Ket
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	3	5	104,61	104,06	●
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2	3	100,16	114,66	●
3.	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	5	14	73,94	104,89	●
4.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	1	2	160,34	130,17	●
5.	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	2	7	94,42	82,07	■

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dari capaian kinerja tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis dan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka	62,25	78,75	70	88,89	78,75	88,75	Tinggi
Rata-rata Capaian			88,89			88,75		



Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan dalam tahun 2021 sebesar 78,75% terealisasi sebesar 70 % dengan rata-rata capaian 88,89 %.

Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan beberapa komponen yaitu rasio anggota linmas per rumah tangga, penegakan perda, persentase penurunan konflik masyarakat, persentase penurunan konflik agama dan persentase penurunan angka kriminalitas. Dari lima komponen tersebut semua berkontribusi positif terhadap pencapaian indeks ketenteraman dan ketertiban.

Sedangkan pada angka kriminalitas yang terdiri dari 3 komponen yaitu angka kriminalitas itu sendiri, tipiring dan gangguan trantibum. Pada tahun 2021 terdapat 142 kejadian kriminalitas dan 123 kasus kriminal sudah terungkap, 4 kasus tipiring dan terdapat 282 kejadian gangguan trantibum. Dimana angka kriminalitas dan gangguan trantibum turun dari tahun 2020. Angka kriminalitas turun dari 166 kasus menjadi 142 kasus atau turun 14,46 %, sedangkan angka gangguan trantibum dari 330 kasus menjadi 282 kasus atau turun sejumlah 48 kasus atau 14,54 %. Dari 282 kasus gangguan trantibum antara lain 53 kasus penertiban pasangan bukan suami istri, 170 kasus penertiban PKL, 2 kasus kenakalan remaja, 10 kasus penertiban minuman keras dan 19 kasus penertiban anak jalanan, 7 kasus PGOT dan 17 kasus ODGJ.

Adapun konflik masyarakat dan konflik agama, tahun 2021 terjadi 2 (dua) konflik masyarakat, yaitu di desa Kemangkon Kecamatan Susukan, yaitu konflik mayarakat terkait penolakan mayarakat terhadap dum truk pengangkut pasir yang menyebabkan kerusakan jalan di Desa Kedawung Kecamatan Susukan, Konflik kedua terjadi di Desa Kemranggon Kecamatan Susukan, yaitu adanya penolakan masyarakat terhadap rencana pembukaan tambang galian C dari sungai yang di Kelola BBWSSD Propinsi Jawa Tengah karena aktivitas penambangan akan mengakibatkan kerusakan jalan desa dan polusi udara bagi warga sekitar. Kedua konflik tersebut telah diselesaikan dengan adanya audensi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik tersebut. Sedangkan konflik keagamaan, pada tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara tidak terjadi konflik

Realisasi kinerja tahun 2021, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Grafik 3.1
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat



Sumber Data : Satpol PP dan Kankesbangpolinmas

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif. Hal ini menggambarkan Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif atas kejadian gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat, dimana ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tahun 2021 menurun. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, kebijakan yang dilakukan adalah dengan menggiatkan siskamling, meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat di setiap kecamatan dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing - masing secara intensif melaksanakan penegakan perda baik dalam bentuk pembinaan maupun penegakan dengan memberikan sanksi ringan maupun berat.

Dalam rangka menurunkan angka konflik dan angka kriminalitas dilaksanakan sosialisasi / pembinaan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pelajar serta tokoh elemen lainnya serta memberdayaka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Kominda.



Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 979.535.400,00 terealisasi sebesar Rp. 784.662.044,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 194.772.356,00 atau 19,89%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :



1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sasaran 2 :	Meningkatnya	Kualitas	Kesiapsiagaan	Dalam
Ketanggapdaruratan Bencana				

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dalam ketanggapdaruratan bencana di daerah, maka ditetapkan indikator Persentase Desa Tangguh Bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana.

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase desa tangguh bencana	%	30,26	41,05	38,97	94,93	52,63	74,05	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			94,93			74,05		

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 41,26 % telah terealisasi 38,97 % dengan capaian 94,93%.



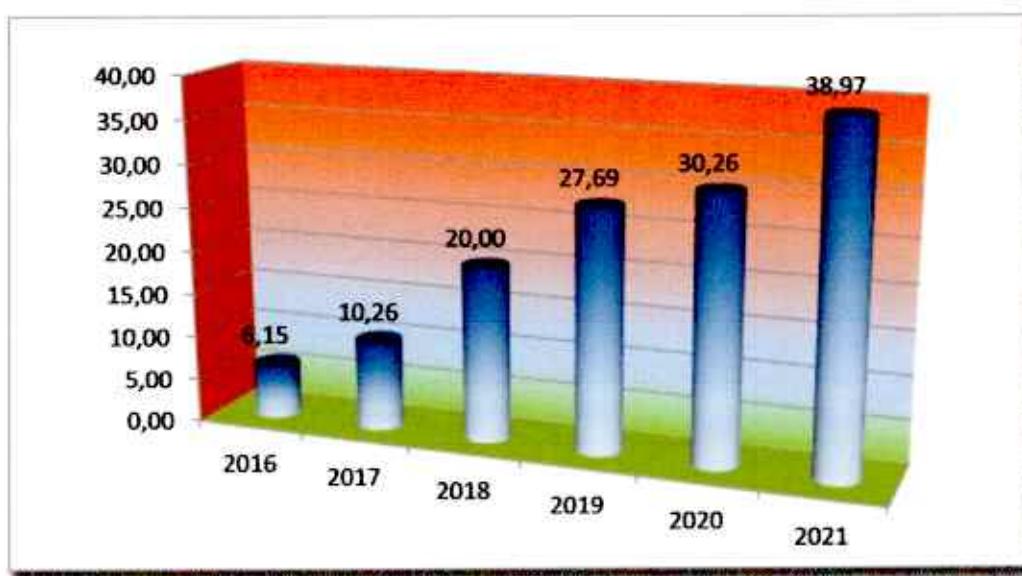
Dari 195 desa rawan bencana sampai dengan 2021 sudah terbentuk 76 desa tangguh bencana (Destana) atau 38,97% yang tersebar di 16 Kecamatan Se Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Vulkanologi Metereologi dan Bencana Geologi kondisi geografis di Kabupaten Banjarnegara 70 (tujuh puluh) % merupakan daerah rawan bencana pergerakan tanah, adapun jenis bencana lainnya yang terjadi adalah seperti tanah longsor, gas beracun, banjir, kebakaran, kekeringan dan angin kencang.

Dari 266 desa yang tersebar diseluruh kecamatan, 195 desa yang dinyatakan sebagai desa rawan bencana. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mentargetkan untuk meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana dengan target di akhir RPJMD pada tahun 2022 terbentuk 52,63% atau sejumlah 105 desa tangguh bencana.

Pembentukan desa tangguh bencana dari tahun sebelumnya maka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kabupaten Banjarnegara



Sumber Data : BPBD Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (*trend*) meningkat. Capaian yang meningkat didukung oleh beberapa hal tersebut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengurangan resiko bencana;
2. Dibangunnya jejaring kerjasama dan pendekatan antar pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha untuk lebih peduli pada upaya pengurangan resiko bencana;
3. Sudah adanya peta desa rawan bencana sehingga memudahkan dalam pemantauan;

Untuk lebih mengoptimalkan pembentukan desa tangguh bencana maka dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat sebagai pencegahan dini agar masyarakat memahami ancaman bencana yang ada di daerahnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi penanganan rawan bencana;



3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
4. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, dari kantor menjadi Badan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana didukung dengan anggaran sebesar Rp. 689.289.500,00 terealisasi sebesar Rp. 642.981.100,00 sehingga terdapat sisanya anggaran sebesar Rp. 46.308.400,00 atau 6,72%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penanggulangan Bencana.

Sasaran 3 : Meningkatnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing sub indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Kebudayaan	Angka	47,87	68,68	89,36	130	77,71	114,99	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					130	77,71	114,99	

Indikator kinerja sasaran Indeks Kebudayaan pada tahun 2021 adalah sebesar 68,68%. Dari target tersebut terealisasi 89,36%. Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka terjadi kenaikan sebesar sebesar 20,81 %.

Indeks Kebudayaan diukur dengan menggunakan 4 parameter yaitu Peningkatan even kesenian atau budaya, Persentase cagar budaya yang terpelihara, Persentase gedung kesenian yang aktif, Nilai peningkatan jumlah riset unggulan daerah inovasi yang terjaring.

Komponen dari indeks kebudayaan yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pencapaian tahun 2021 adalah pada komponen cagar budaya yang terpelihara dimana tahun 2021 dari 53 cagar budaya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

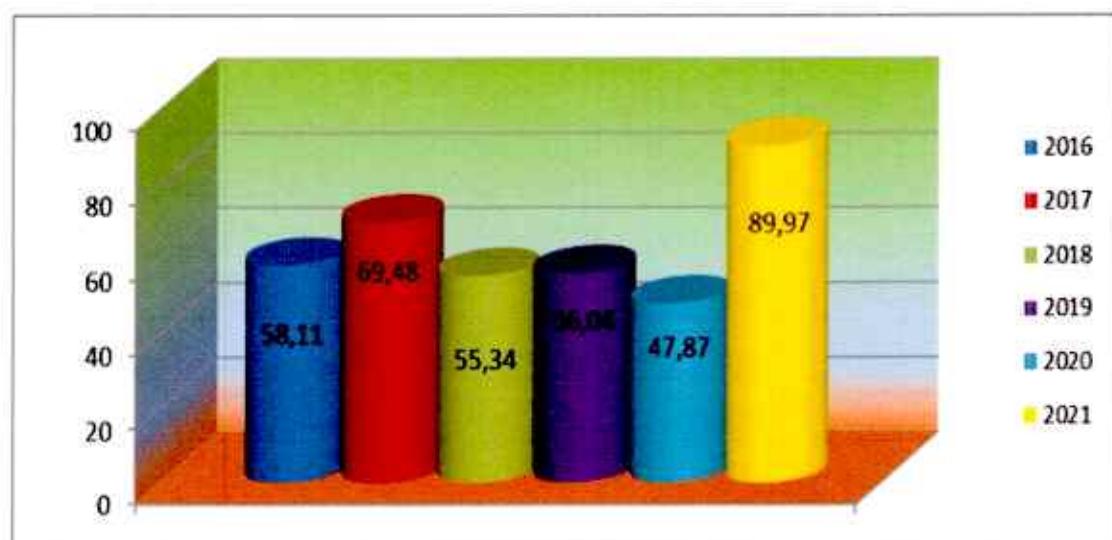


Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 430/041/parbud/2021 tentang Data Cagar Budaya Kabupaten Banjarnegara, dalam kondisi terpelihara dengan baik dan terdapat 46 usulan dari masyarakat warisan budaya untuk dijadikan sebagai cagar budaya Kabupaten Banjarnegara. Adapun pemeliharaan cagar budaya yang ada dengan melibatkan peran serta masyarakat. Disusul komponen peningkatan even kesenian atau budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sejumlah 8 even dimana untuk komponen ini terdapat peningkatan penyelenggaraan dari tahun 2020 yaitu dari 3 even kesenian atau budaya yang diselenggarakan meningkat menjadi 8 even, sedangkan komponen nilai peningkatan jumlah riset dan inovasi yang terjaring sejumlah 9 inovasi juga terdapat peningkatan 2 inovasi yang terjaring dari tahun 2020.

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten yang memiliki tradisi kebudayaan dan kesenian yang banyak telah berusaha untuk melestarikan warisan budaya tersebut melalui peningkatan even kesenian dan budaya dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan agar kesenian dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat semakin berkembang dan dikenal luas baik di lingkung Kabupaten Banjarnegara maupun di luar, sehingga kesenian dan kebudayaan yang berasal dari nilai-nilai adiluhung yang ada di masyarakat Banjarnegara bisa dilestarikan. Namun dengan adanya corona *virus disease 2019* pada tahun 2021 even-even kesenian dan kebudayaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Grafik 3.3
Indeks Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016 – 2021**



Sumber Data : Disparbud, Baperlitbang dan DinsosPPPA Kabupaten Banjarnegara



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja pada sasaran 3 yaitu Indek Kebudayaan secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (*trend*) yang fluktuatif.

Adapun untuk mencapai indeks kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan cagar budaya di seluruh Kabupaten Banjarnegara dimana sampai dengan saat ini cagar budaya yang terpelihara sejumlah 99 cagar budaya.
2. Keberadaan gedung budaya dimaksimalkan pemanfaatannya dengan menyelenggarakan berbagai even budaya, terutama untuk meningkatkan daya tarik wisata di Banjarnegara.
3. Melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok kesenian secara kontinyu dan mendorong untuk menyelenggarakan event secara mandiri.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Nilai Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal didukung dengan anggaran sebesar Rp. 541.391.100,00 terealisasi sebesar Rp. 451.868.300,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 89.522.800,00 atau 16,54%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Pengembangan Kebudayaan.
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berdemokrasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase Pemilih Dalam Pemilu	%	PilPres 76,15	PilPres 0	0	0	70 sd 75	101,53	
		PilLeg 76,11	PilLeg 0	0	0	70 sd 75	101,48	
Rata-rata Capaian					0		101,51	

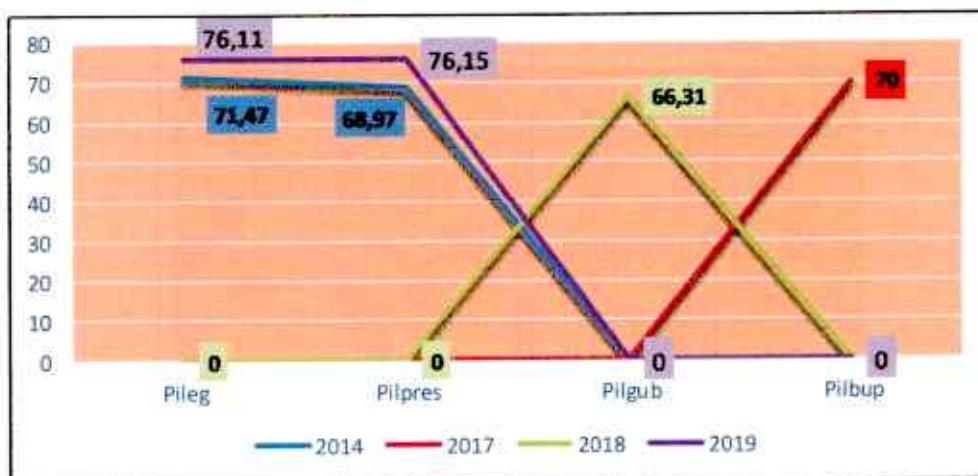
Indikator persentase pemilih dalam pemilu meliputi pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Pada tahun 2021, Kabupaten Banjarnegara tidak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Namun

demikian tahun 2019 pada pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dengan partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 76,11% untuk pemilihan legislatif dan 76,15% untuk pemilihan presiden. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Prosentase Pemilih dalam Pemilu sudah tercapai sesuai dengan yang ditergetkan. Jumlah pemilih yang terdaftar sejumlah 791.041 orang, adapun partisipasi pemilih pada pemilihan presiden sejumlah 602.380 orang sedangkan untuk pemilihan anggota legislatif adalah sejumlah 602.032 orang.

Capaian kinerja pada indikator prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan target di akhir RPJMD yaitu sebesar 75 %, maka secara kuantitatif capaian kinerja tersebut pada tahun 2019 telah melampai target yang telah ditetapkan di RPJMD.

Data terakhir menunjukkan capaian di masing – masing pemilihan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

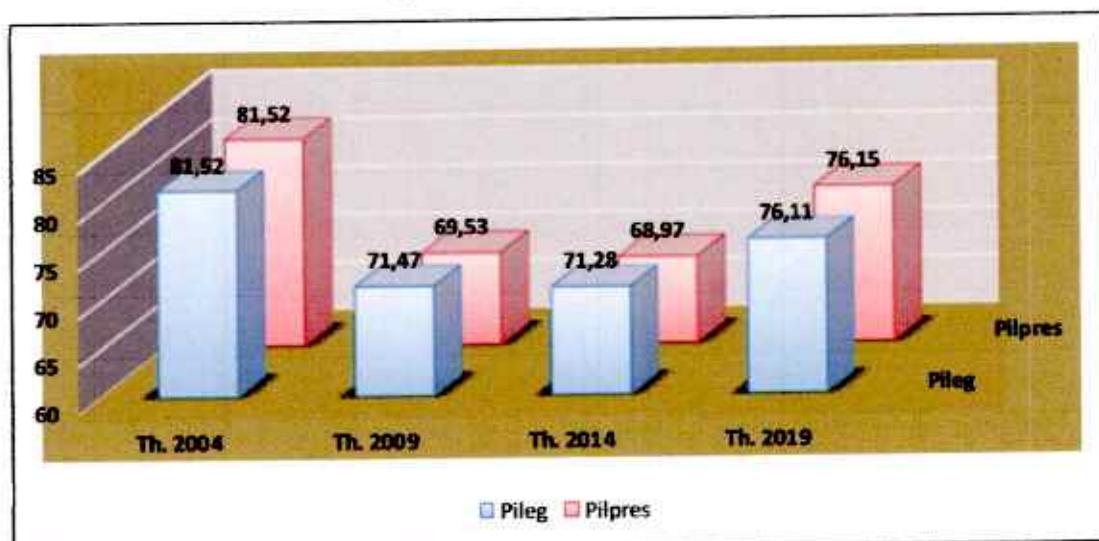
Grafik 3.4
Persentase Pemilih Dalam Pemilu



Sumber Data : Kankesbangpolinmas Kabupaten Banjarnegara

Apabila dibandingkan angka partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tahun 2014 dengan tahun 2019 terjadi kenaikan angka partisipasi pemilih sebesar 4,64 % untuk pemilihan legislatif dan 7,18 % untuk pemilihan presiden. Sedangkan, apabila angka paertisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan legislatif dibandingkan dengan pemilihan gubernur pada tahun 2018 ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden sebesar 9,82 %.

Grafik 3.5
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres dan Pileg



Sumber Data : Kankesbangpolinmas Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Grafik diatas menunjukan bahwa prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif maupun Presiden pada periode – periode sebelumnya (tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019), sebagai berikut :

- a. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu untuk Pilpres pada Tahun 2004 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat tinggi karena merupakan Pemilu lansung yang pertama, sehingga lebih menarik orang untuk hadir di tempat pemungutan suara, sedangkan pemilu tahun 2009, 2014 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif sebagaimana tersebut dalam grafik diatas.
- b. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu untuk Pileg dari tahun 2004, partisipasi masyarakat tinggi merupakan Pemilu langsung pertama sedangkan tahun 2009, 2014 sampai dengan 2019 cenderung fluktuatif.

Adapun faktor yang mendukung peningkatan partisipasi pemilih antara lain:

1. Adanya pendidikan politik dan demokrasi dengan sasaran kepada pemilih pemula dan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU, Panwas dan Kankesbangpolinmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
2. Koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana pemilu;
3. Pelaksanaan Pemilu ditetapkan sebagai hari libur nasional sehingga memberi kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berdemokrasi sebesar Rp. 29.815.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.795.000,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 20.000,00 atau 0,07%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

**Sasaran 5 : Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

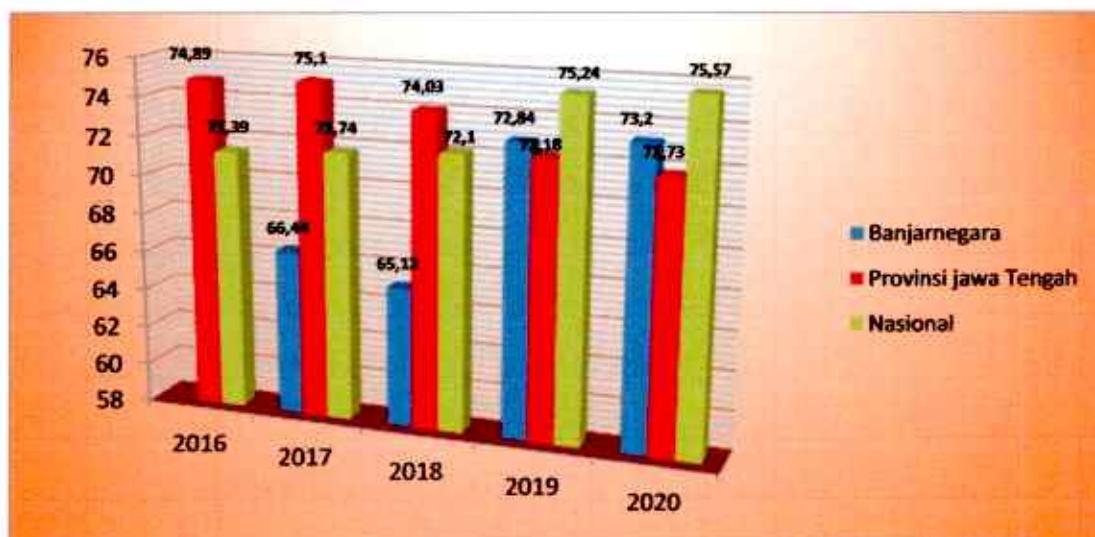
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,20	68,75	73,20*	106,47	69,25	105,57	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			106,47			105,57		

* Data Capaian Tahun 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2021 ditargetkan 68,75 terealisasi sebesar 73,20 (2020) dengan ketercapaian 106,47%. Bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah maka IDG Kabupaten Banjarnegara diatas IDG provinsi Jawa Tengah yaitu 71,73 (2020) dan nasional sebesar 75,57 (2020).

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.6
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa IDG Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan yang fluktuatif, dibawah IDG Provinsi dan Nasional.



Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi, maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG diukur berdasarkan tiga komponen yang ada, yaitu:

1. Keterwakilan perempuan dalam parlemen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 diamanatkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% dari jumlah keseluruhan anggota. Pada proses pendaftaran calon legislatif perempuan sudah memenuhi kuota 30%. Kepercayaan masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan ada peningkatan hal ini terbukti dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara naik sebesar 8,22 % yaitu pada tahun 2014 keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 17,78 % atau 9 orang naik menjadi 26 % atau 12 orang pada tahun 2019 dari total anggota parlemen sejumlah 50 orang.

2. Perempuan sebagai tenaga profesional .

Persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional di Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 sebesar 49,42 % atau turun sebesar 7,38 % dari tahun 2019 sebesar 56,80 %. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan mulai mampu bekerja pada bidang kerja yang membutuhkan keahlian khusus sebagai tenaga profesional.

3. Sumbangan pendapatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga

Sumbangan pendapatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 sebesar 28,93% atau meningkat sebesar 0,13% dari tahun 2019 yaitu 28,80%. Hal ini menggambarkan bahwa kendali ekonomi keluarga masih dipegang oleh laki-laki.

Laki-laki memang bertanggungjawab dengan roda perekonomian keluarga, sehingga peranan perempuan dalam mencari nafkah atau membantu perekonomian keluarga kurang diakui, meskipun tidak dipungkiri perempuan ada yang bekerja dengan penghasilan melebihi kaum pria.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah :



1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :
 - a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian

perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah;



- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dilakukan melalui strategi :
 - a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta
 - c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :
 - a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
 - b. Pelaksanaan *reviu* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan pengarusutamaan gender;
 - d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan pengarusutamaan gender;
 - e. Penguatan lembaga/jejaring pengarusutamaan gender di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
 - f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilih;
 - g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 89.747.600,00 terealisasi sebesar Rp. 62.239.400,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 27.508.200,00 atau 30,65%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

**MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Efektivitas Dan Transparansi Layanan Publik

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Indek Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	82,30	79	82,56	104,51	80	103,2	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					104,51		103,2	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 realisasi indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat tercapai melampaui target, dimana dari target indikator kinerja Indek Kepuasan Layanan Masyarakat yang ditetapkan sebesar 79 dapat direalisasikan sebesar 82,56 dengan capaian kinerja sebesar 104,52 %. Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka realisasi indikator kinerja tahun 2021 sedikit meningkat sebesar 0,26 poin. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target di akhir RPJMD (2022), maka capaian kinerjanya telah melampaui target sebesar 103,22 %.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten



Banjarnegara sudah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ada di semua Perangkat Daerah. Adapun hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2020 – 2021**

No	Komponen	Nilai Rata-rata Tahun 2020	Nilai Rata-rata Tahun 2021
1	Persyaratan	2,924	3,216
2	Prosedur	2,919	3,197
3	Waktu	2,910	3,148
4	Biaya/Tarif	3,377	3,751
5	Produk Layanan	2,974	3,201
6	Kompetensi Pelaksanaan	2,912	3,245
7	Perilaku Pelaksanaan	3,011	3,317
8	Sarana Prasarana	3,026	3,234
9	Penanganan Pengaduan	3,157	3,383

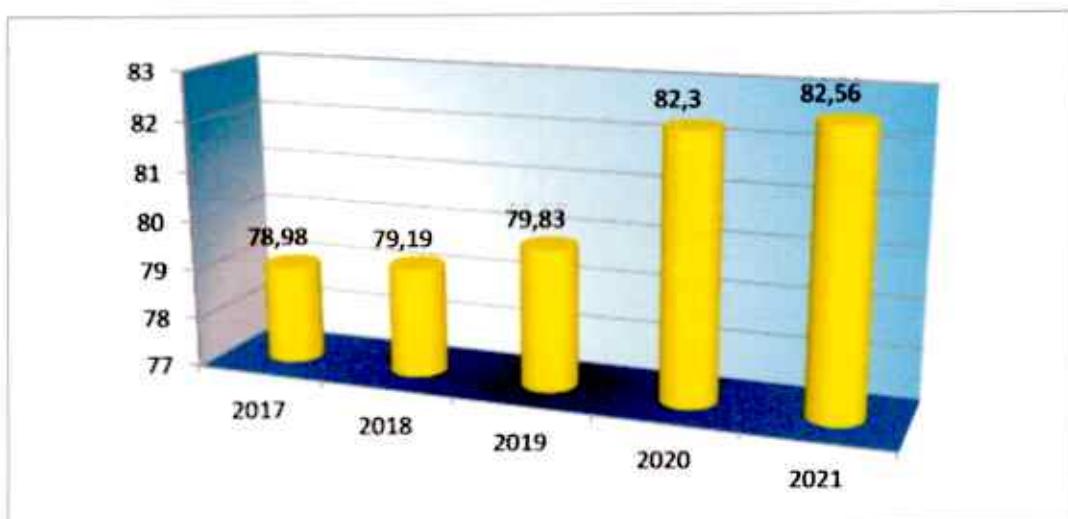
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kab. Banjarnegara

Dari 9 (sembilan) komponen Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 nilai paling rendah adalah komponen waktu pelayanan dengan nilai 3,148. Hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap prosedur pelayanan dari proses pelayanan yang diberikan, sehingga menganggap pelayanan yang diterima rumit/sulit;
2. Belum semua aparatur di perangkat daerah yang memberikan pelayanan menerapkan pelayanan sesuai dengan SOP pelayanan. Hal ini disebabkan karena belum ada evaluasi atas SOP maupun prosedur pelayanan di unit kerjanya secara berkala.
3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik belum seluruhnya memenuhi standar;

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

Grafik 3.7
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif maka terdapat kecenderungan (*trend*) yang meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Capaian yang memuaskan tersebut didukung oleh :

1. Semakin baiknya layanan yang diberikan oleh Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik (UPP);
2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik semakin aktif melaksanakan Survey dan menjadikan dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki layanannya.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi ada beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
2. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melaksanakan publikasi standar pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan dapat memahami standar pelayanan untuk masing-masing jenis layanan;
3. Mempermudah pengguna layanan untuk mengajukan keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diterima;
4. Peningkatan kinerja petugas pelayanan;
5. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana penunjang layanan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat antara lain pelaksanaan survey masih dilakukan secara manual sehingga responden masih bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Terhadap kendala tersebut langkah dan strategi yang akan dilakukan adalah dengan membangun aplikasi survey kepuasan masyarakat, menjadikan hasil survey sebagai dasar penganggaran.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Dan Transparansi Layanan Publik didukung dengan anggaran sebesar Rp. 265.841.603.343,00 terealisasi sebesar Rp. 232.707.543.822,00 sehingga terdapat



efisiensi sebesar Rp. 27.508.200,00 atau 12,46%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B	B	B*	100	B	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100			100	

* Data tahun 2020

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporean Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 belum dikeluarkan Kementerian PAN dan RB, sehingga untuk capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu nilai SAKIP menggunakan capaian kinerja tahun 2020. Hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2020 nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 pada kategori B dengan nilai 68,04. Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah 100%. Pencapaian nilai B ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan



dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah menunjukkan hasil yang baik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaianya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2020

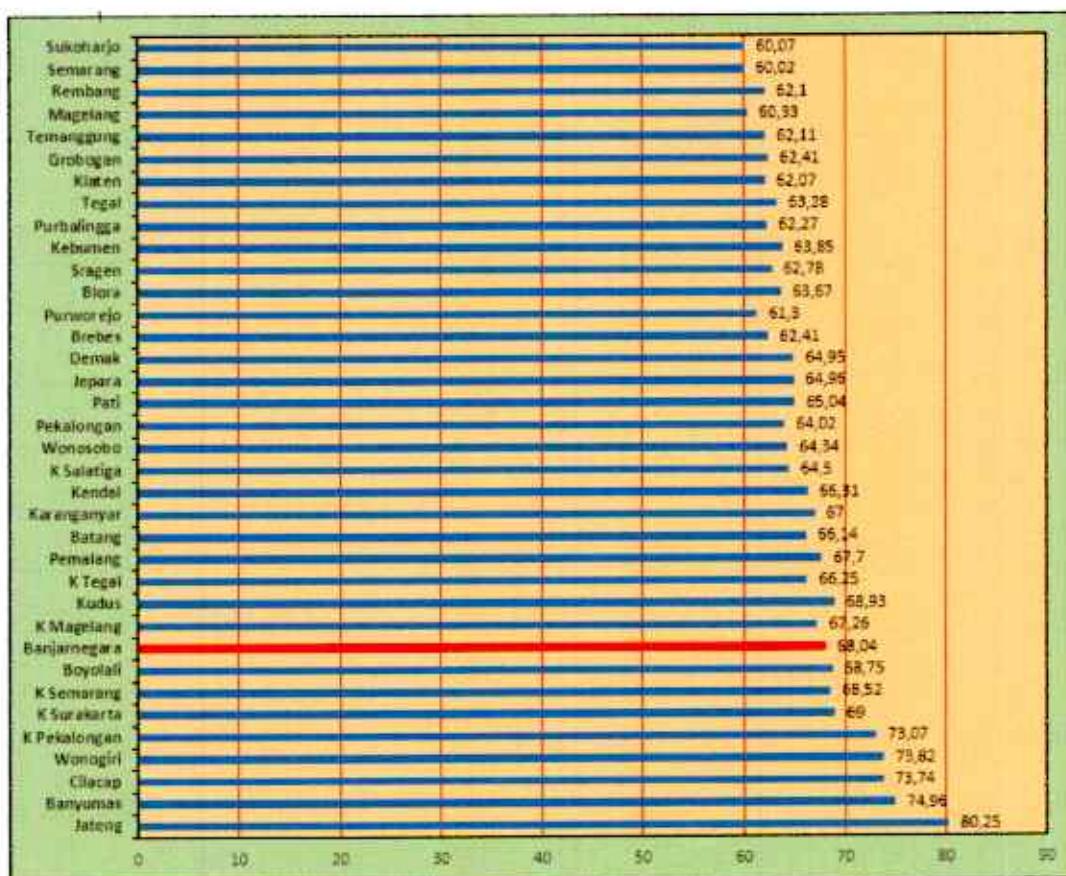
No	Komponen yang Dimilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1.	Perencanaan Kinerja	35	20,64	21,23	21,28	21,64	22
2.	Pengukuran Kinerja	20	10,34	14,95	15,84	16,17	16,76
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,55	8,48	10,24	10,56	10,73
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,21	5,76	5,78	6,37	6,53
5.	Capaian Kinerja	20	10,89	10,10	11,20	11,91	12,03
Nilai Hasil Evaluasi		100	57,63	60,52	64,34	66,65	68,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B	B	B

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya cenderung meningkat. Dari 5 (lima) komponen yang dievaluasi, kenaikan terbesar pada komponen Pengukuran Kinerja yaitu meningkat 0,59 dari tahun 2019. Peningkatan nilai ini didasarkan atas penilaian tahun SAKIP 2019 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah menyempurnakan penjabaran kinerja yang dimanfaatkan dalam penyusunan perjanjian kinerja dari tingkat penanggung jawab program dan kegiatan sehingga tercipta keselarasan pengukuran kinerja individu pegawai dengan organisasi sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Pengukuran Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menggunakan aplikasi E-Kinerja.

Apabila bila disandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.8
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020



Sumber Data : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah

Adapun nilai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2016 BB, 2017 BB, 2018 A, 2019 A, dan 2020 A (80,25). Sementara Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah sudah mulai ke nilai BB sebanyak 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Pekalongan dan Kabupaten Wonogiri, sedangkan untuk Kabupaten Banjarnegara bersama 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota mendapatkan nilai B.

Meskipun capaian realisasi sudah sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Beberapa hal yang perlu ditidaklanjuti untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala atas renstra perangkat daerah serta memanfaatkannya untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi;
2. Memanfaatkan cascading kinerja dalam penyusunan perjanjian kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan untuk pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga mendorong terwujudnya sistem merit;



3. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja sehingga dapat menciptakan *performance based budgeting*;
4. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan OPD dengan menyajikan analisis yang memadai sehingga informasi kinerja tersebut dapat diandalkan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang;
5. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di OPD, sehingga mampu memberikan rekomendasi percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
6. Melakukan review atas program, kegiatan dan komponen anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 265.841.603.343,00 terealisasi sebesar Rp. 232.707.543.822,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 27.508.200,00 atau 12,46%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase Peningkatan Desa Berkembang	%	3,98	3	4,31	143,67	3	132,6	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			143,76			132,6		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 persentase peningkatan desa berkembang telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target 3 % atau 5 desa dapat terealisasi 4,31 % atau 9 desa yang berasal dari peningkatan status desa tertinggal dan menjadi desa berkembang, sehingga sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Banjarnegara terdapat 2 desa dengan kategori mandiri, 44 desa kategori maju, 207 desa



kategori berkembang, 13 desa kategori tertinggal dan tidak terdapat desa dengan kategori sangat tertinggal. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak desa yang mulai mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Disisi lain, pembangunan desa pada tahun 2021 secara keseluruhan dipengaruhi oleh kondisi pandemi *Covid-19* termasuk prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, pemanfaatan Dana Desa juga diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*. Hal ini berdampak pada perubahan rencana kegiatan yang sudah dialokasikan pada APBDes, untuk dialihkan dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19*. Berdasarkan data Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Banjarnegara sebanyak lebih dari 50 persen Dana Desa dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan *Covid-19* (Belanja Tak Terduga Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa) dan sebesar 39 persen untuk Bidang Pembangunan. Selain berpengaruh pada dana pembangunan, pandemic *Covid-19* juga berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan berdampak pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada peningkatan strata desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Rekapitulasi desa yang masih berstatus desa tertinggal tahun 2021 tercantum pada tabel sebagai berikut .

Tabel 3.6
Rekapitulasi Desa Tertinggal Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa
1	2	3
1.	Susukan	Karangjati
2.	Purwareja Klampok	Sirkandi
3.	Sigaluh	Sawal
4.	Karangkobar	Paweden, Gumelar, Purwodadi, Slatri, Pasuruhan, Karnggondang, Ambal, Binangun
5.	Kalibening	Kalibombong
6.	Pandanarum	Sinduaji

Sumber : Data Dispermades PPKB

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016, bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kejelasan status perkembangan desa sehingga mempermudah para pelaku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dan mencapai tujuan pembangunan tersebut.



Indikator Persentase tingkat perkembangan desa mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2016. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Komponen Indeks Desa membangun sebagai berikut :

**Tabel 3.7
Komponen Indeks Desa Membangun**

No	Komponen	Dimensi
1	Ketahanan Sosial	Modal social : Solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan social
		Kesehatan : Pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan.
		Pendidikan : Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, Akses ke Pendidikan Non Formal, Akses ke Pengetahuan.
		Permukiman : Akses ke air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses ke informasi dan komunikasi
2	Ketahanan Ekonomi	Keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah
3	Ketahanan Ekologi	Keterbukaan wilayah, Potensi rawan bencana dan tanggap bencana,

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada, adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;

2. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa PraSembada, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;

3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$

Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya, adalah Desa Potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;

4. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$

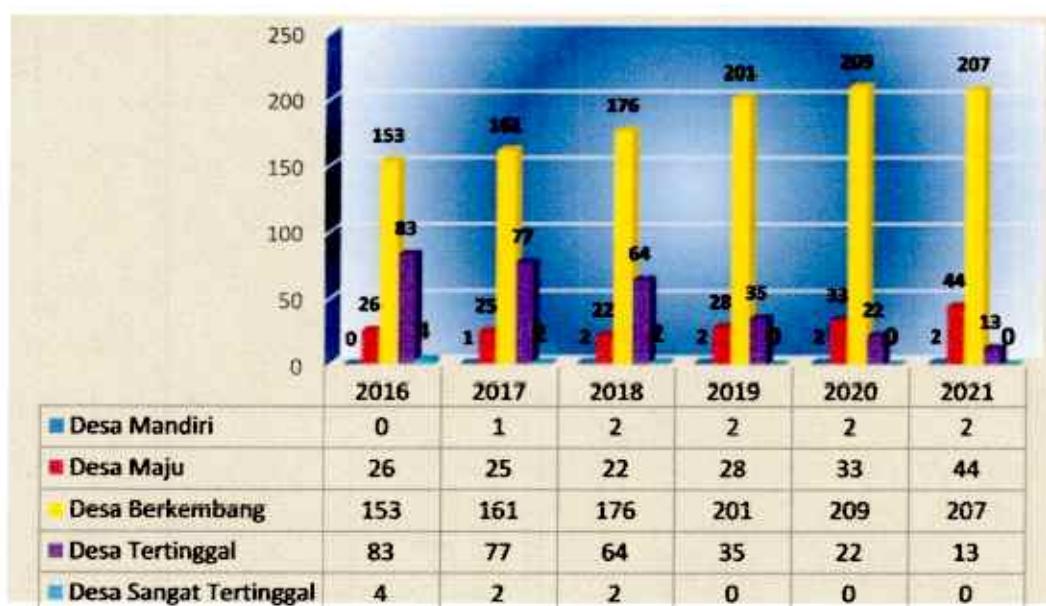
Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa PraMadya, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; dan

5. Desa Sangat Tertinggal: IDM $\leq 0,4907$

Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya strata desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat seperti pada Grafik berikut :

Grafik 3.9
Strata Desa di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021



Sumber Data: Dispermades dan PPKB Kabupaten Banjarnegara

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara umum desa berkembang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat perubahan strata desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara, dimana dari 22 desa tertinggal berubah strata menjadi desa berkembang sebanyak sejumlah 9 desa, sedangkan desa berkembang yang berubah strata menjadi desa maju sejumlah 10 desa. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ke desa berkembang dan desa maju sangat signifikan

Semakin meningkatnya status perkembangan desa menggambarkan desa semakin memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk



mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi desa meskipun belum optimal.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dukungan pemberdayaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang maju dan mandiri;
3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi serta pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur mendukung indeks ketahanan sosial pada (1) Dimensi Kesehatan : akses pelayanan kesehatan, (2) Dimensi pendidikan : tersedianya akses pendidikan formal dan informal serta akses pengetahuan, (3) Dimensi Pemukiman : tersedianya akses air bersih dan air minum layak, akses sanitasi, akses listrik serta akses informasi dan komunikasi (4) Dimensi ekonomi : tersedianya akses ke pusat perdagangan dan keterbukaan wilayah (trasportasi umum dan kualitas jalan desa);
4. Koordinasi, kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak baik Pemerintah, swasta maupun Pemerintah Desa serta masyarakat desa dalam rangka pengembangan pengelolaan potensi ekonomi dan kelembagaan ekonomi desa sebagai salah satu unsur penunjang peningkatan strata desa;

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.045.193.780,00 terealisasi sebesar Rp. 4.022.356.038,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 22.937.742,00 atau 0,56%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 3 (satu) program, yaitu :

1. Program Penataan Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian melalui optimalisasi program- program sebagai berikut :

No	Dimensi IDM	Program	Upaya yang dilaksanakan
1	Ketahanan social	Program Penataan Desa	- Meningkatkan solidaritas sosial berupa kebiasaan gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
		Program Administrasi Pemerintah Desa	- Peningkatan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan berupa pembinaan tingkat aktivitas Posyandu - Melalui bantuan keuangan provinsi kepada desa untuk peningkatan akses sanitasi diantaranya berupa jamban sehat.
2	Ketahanan Ekonomi	Program Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan,	- Mendorong keragaman produksi masyarakat desa melalui BUMDesa dan pengembangan



No	Dimensi IDM	Program	Upaya yang dilaksanakan
	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	unit usaha BUMDesa;	- Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) berupa pasar desa untuk menunjang akses pelayanan pusat perdagangan. - Akses ke lembaga keuangan dan perkreditasn melalui SPP UPK Kecamatan eks PNPM.

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pada periode jangka menengah tahun 2017-2022, peningkatan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama Pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, dengan harapan akan tercipta peningkatan perekonomian kabupaten melalui multiplier efek yang timbul dari berbagai aspek karena adanya peningkatan kualitas jalan.

Sasaran meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	80,171	71 - 73	81,229	114,41	73 s.d 75	111,27	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			114,41			111,27		

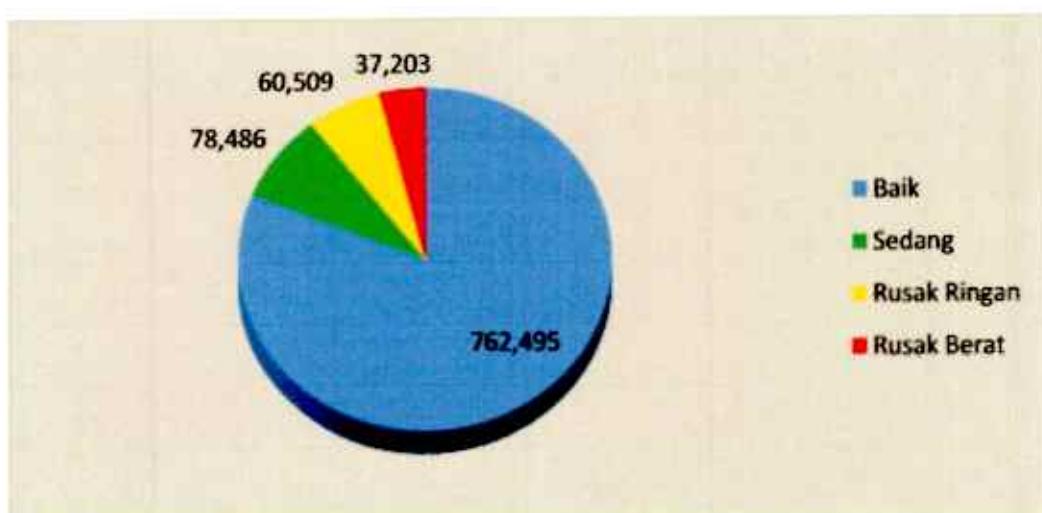
Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2021 ditargetkan 71 -73 % atau 685,246 Km dan dapat terealisasi 81,23 % atau 762,495 Km atau tercapai 114,41 %, yang terdiri dari : Rigid : 34,787 Km, Hotmik : 538,922 Km, Lapen : 293,912 Km. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka sudah tercapai dengan capaian sebesar 111,27 %.

Panjang jalan Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2021 secara keseluruhan adalah 938,693 Km, dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Kondisi baik	:	762,495 km	(81,229 %)
Kondisi sedang	:	78,486 km	(8,361 %)
Kondisi rusak ringan	:	60,509 km	(6,446 %)
Kondisi rusak berat	:	37,203 km	(3,964 %)

Jumlah	:	938,693 km.	(100 %)

Grafik 3.10
Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2021



Sumber Data : DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	58,83%	68,87%	70,104%	76,03%	80,171%	81,229%

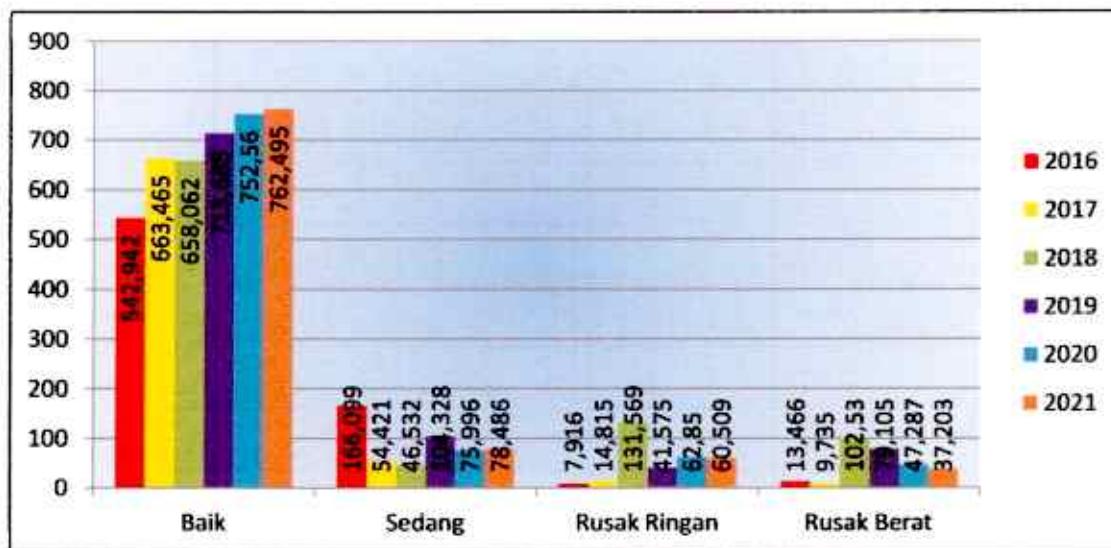
Secara kuantitatif realisasi indikator Presentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dari tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan. Kondisi ini dikarenakan penanganan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sejak tahun 2019 penanganan jalan kabupaten lebih diprioritaskan pada peningkatan struktur dengan mengurangi peningkatan kapasitas pelebaran jalan, tetapi lebih diprioritaskan kepenanganan jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, sehingga panjang jalan dalam kondisi sedang dan kondisi baik meningkat. Dimana sebelum tahun 2019





penanganan peningkatan struktur jalan lebih banyak menggunakan konstruksi fleksibel (aspal), tetapi sejak tahun 2019 penanganan peningkatan struktur jalan lebih memprioritaskan peningkatan struktur dan kapasitas jalan (konstruksi rigid beton) untuk pelebaran jalan rigid beton secara total.

**Grafik 3.11
Kondisi Jalan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021**



Sumber Data : DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Namun demikian karena pada akhir tahun 2021 masih terdapat kondisi jalan kabupaten yang rusak berat sepanjang 37,203 km (3,964 %) dan rusak ringan sepanjang 62,850 Km atau (6,695 %) yang masih membutuhkan prioritas penanganan untuk pengembangan atau konektifitas antar wilayah (kabupaten / kecamatan) dan mendukung perekonomian.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 175.198.167.800,00 terealisasi sebesar Rp. 169.692.015.872,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 5.506.151.928,00 atau 3,14%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Banjarnegara adalah petani, salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan mendorong



produktivitas petani padi melalui peningkatan kualitas jaringan irigasi, dimana peningkatan pelayanan melalui jaringan irigasi dalam kondisi baik merupakan salah satu upayanya.

Adapun pencapaian indikator luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	16.830	17.003	17.323	101,88	17.495	99,02	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					101,88		99,02	

Kondisi jaringan irigasi sampai akhir tahun 2020 :

Jumlah Daerah Irigasi	: 326 DI.
Luas Daerah Irigasi	: 24.642 Ha.
Kondisi baik	: 382.197 m ² (70,21 %)
Kondisi rusak ringan	: 104.409 m ² (19,19 %)
Kondisi rusak berat	: 60.761 m ² (11,16 %)
<hr/>	
Jumlah	: 544.367 m ² (100 %)

Pada tahun 2021 luas areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik ditargetkan seluas 17.003 Ha terealisasi seluas 17.323 Ha atau tercapai 101,88%. Hal



ini didukung oleh panjang irigasi dalam kondisi baik 382.197 m² dari panjang irigasi 544.367 m².

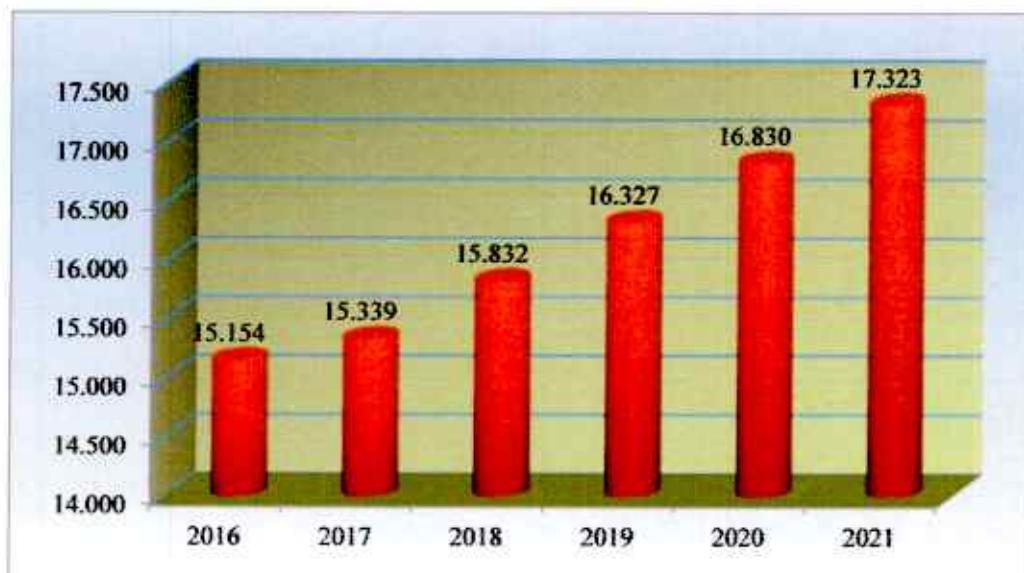
Dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2022) maka indikator kinerja Luas Areal Sawah yang Teraliri Jaringan Irigasi Dalam Kondisi baik sampai dengan tahun 2021 mencapai 101,88 % sedangkan realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 99,02%.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	15.154 Ha	15.339Ha	15.832Ha	16.387Ha	16.830Ha	17.323 Ha

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Luasan Sawah Yang Teraliri Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Peningkatan jaringan irigasi kondisi baik akan meningkatkan kinerja sistem pendistribusian air sampaia ke petak-petak tersier, sehingga meningkatkan luas areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik tiap tahunnya meningkat. Sehingga hal ini berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan.

Grafik 3.12
Luasan Sawah Yang Dialiri Irigasi Kondisi Baik
Tahun 2016 – 2021



Sumber Data : DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya dukungan jaringan kondisi baik sebesar 70,21% dari luasan jaringan irigasi yang ada;
2. Infrastruktur menjadi program prioritas pada 3 (tiga) tahun pertama periode RPJMD

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi didukung dengan anggaran sebesar Rp. 27.262.934.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.994.420.143,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.



3.268.513.857,00 atau 11,99%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
1. Pertumbuhan sektor petanian	%	3,06	2,7 – 3,7	3,06*	100	3	100	Sangat Tinggi
2. Nilai tukar petani (umum)	%	105,63	103 – 104	102,45	99,46	104	98,51	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				99,73			99,25	

*Tahun 2020

Sumber Data : Baperlitbang dan DistankahKP Kabupaten Banjarnegara

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2021 tercapai dengan rata-rata capaian 99,73%. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2022 tercapai sebesar 99,25%. Apabila capaian kinerja 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja 2021 mengalami penurunan sebesar 1,55 %, dimana realisasi kinerja Pertumbuhan Sektor Pertanian memakai realisasi tahun 2020, karena realisasi Pertumbuhan Sektor Pertanian tahun 2021 belum dikeluarkan dari BPS. Sedangkan realisasi indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 3,18 %.

Adapun komoditas yang diukur antara lain komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada komoditas tanaman pangan yang mengalami kenaikan pada komoditas ubi kayu sebesar 27.619,21 ton, yaitu dari 102.655 ton tahun 2020 menjadi 130.274,21 ton tahun 2021 atau naik 26,90%. Sedangkan komoditi padi, jagung dan kedelai mengalami penurunan dari tahun 2020. Tahun 2020 produksi padi sebesar 171.146 ton turun menjadi 169.853 ton pada tahun 2021 atau turun 0,76 % sedangkan produksi jagung tahun 2020 sebesar 63.108 ton menjadi 51.949,82 ton pada tahun 2021 atau turun 17,68 %. Sedangkan untuk produksi kedelai pada tahun 2020 sebesar 838,40 ton turun menjadi 635,44 ton pada tahun 2021 atau turun 24,21 %.



Penurunan produksi tanaman pangan pada tahun 2021 dipengaruhi oleh ketersediaan bibit unggul yang kurang pada tahun 2021 serta curah hujan yang sedang pada tahun 2021.

Adapun untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan yang telah dilakukan antara lain :

1. Mengupayakan kepada kelompok tani untuk menggunakan bibit unggul dan tahan hama penyakit tanaman khususnya padi dan pemupukan berimbang.
2. Menggunakan mekanisasi pertanian seperti traktor untuk pengolahan tanah, alat tanam, alat panen untuk percepatan produksi dan meningkatkan indeks pertanaman.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pengelolaan sumber-sumber air seperti air, embung, dam parit dan long storage.
4. Melakukan pendampingan oleh petugas pertanian kepada kelompok tani untuk melaksanakan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar.
5. Melakukan sosialisasi kepada kelompok tani agar tetap membudidayakan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan palawija serta membantu informasi pasar.
6. Melakukan budidaya tanaman tumpangsari untuk menekan kerugian dari salah satu komoditas baik apabila harganya jatuh. Tumpang sari tanaman pangan dapat dilakukan seperti padi gogo dengan ubi kayu, padi dengan jagung, padi dengan kedelai, jagung dengan ubi kayu, jagung dengan kedelai, kedelai dengan ubi kayu.

Produksi tanaman hortikultura buah dan sayur (pisang, durian, salak, kentang dan cabai) juga penurunan yang signifikan dari tahun 2020. Adapun tanaman hortikultura yang mengalami kenaikan hanya komoditas pisang. Pada produksi pisang pada tahun 2020 sebesar 24.884,3 ton meningkat menjadi 25.614 ton pada tahun 2021, atau meningkat 2,93 %.

Produksi durian 2020 sebesar 11.684 ton turun menjadi 6.736,3 ton pada tahun 2021 atau turun 42,35 %, produksi cabai 2020 sebanyak 30.268,2 ton turun menjadi 23.973,4 ton pada tahun 2020 atau turun 20,80 %, produksi kentang pada tahun 2019 sebesar 126.092,5 turun menjadi 116.392,9 ton atau turun sebesar 7,69 % dan produksi salak pada tahun 376.343,8 turun menjadi 360.212,6 atau turun sebesar 4,29%. Penurunan pada komoditas hortikultura lebih dikarenakan cuaca yang kurang mendukung produksi komoditas hortikultura, dimana curah hujan kategori sedang dan fluktuasi harga salak yang cenderung menurun sehingga petani salak beralih ke komoditas lainnya yang lebih menguntungkan

Adapun upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi kentang dan durian telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan perbenihan varietas kentang lokal baru yang memiliki daya tahan terhadap penyakit/jamur kentang, seperti Tedjo MZ, kentang merah, kentang hitam, dan kentang vega;



2. Pengembangan varietas unggul lokal seperti simemang dan sambeng;
3. Membangun kawasan durian sebagai wahana agrowisata.

Sedangkan pada produksi tanaman perkebunan pada (kopi, kelapa dalam, kelapa deres, teh, tembakau dan lada) pada tahun 2021 mengalami fluktuasi, dimana untuk komoditas kopi, kelapa dalam mengalami peningkatan, sedangkan komoditas kelapa deres, teh, tembakau dan lada mengalami penurunan.

Tanaman kopi mengalami peningkatan dari 1.569,59 ton pada tahun 2020 menjadi 2.332,73 ton tahun 2021 atau naik 48,62 %, komoditas kelapa dalam mengalami kenaikan dari 12.178,69 ton menjadi 13.240,23 ton atau naik 8,72 %, sedangkan komoditas kelapa deres turun dari 11.602,29 ton menjadi 6.584,62 ton atau turun 43,25 %, komoditas teh turun dari 2.614,04 ton menjadi 2486,81 ton atau turun 4,87%, sedangkan pada komoditas tembakau meningkat dari 295,07 ton menjadi 230,77 ton atau turun 21,79% dan pada komoditas lada turun dari 172,66 ton menjadi 170,63 ton atau turun 1,18%.

Peningkatan pada produksi tanaman perkebunan didukung oleh :

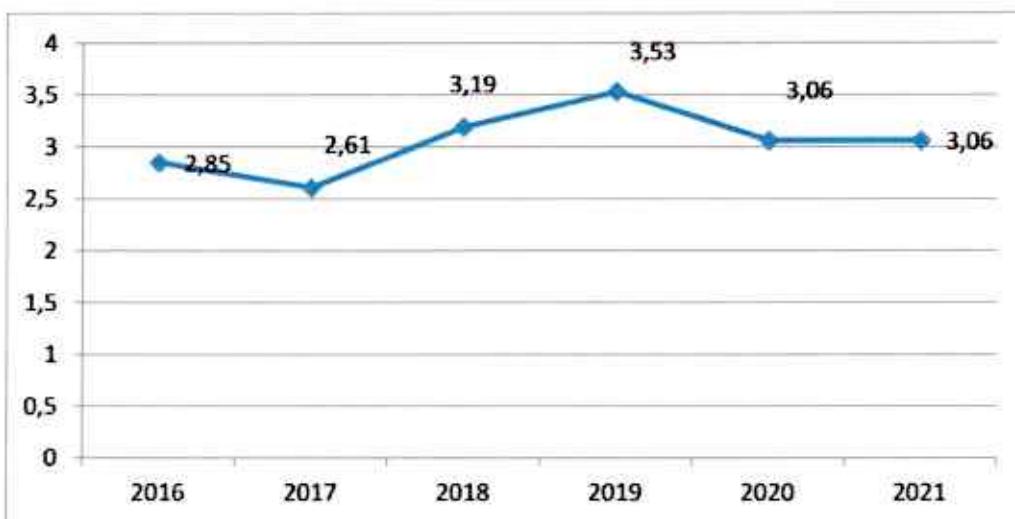
1. Meningkatnya permintaan kopi Banjarnegara sehingga meningkatkan minat petani untuk memperluas lahan tanam kopi;
2. Merupakan keberhasilan dari peremajaan kelapa yang dilaksanakan pada beberapa tahun sebelumnya;
3. Adanya pemberian bantuan benih lada;

Pada tahun 2021, produksi perikanan mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi benih ikan tahun 2020 sebesar 2.323.434.000 ekor menjadi 2.519.655.019 ekor pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 8,49 %, perikanan budidaya mengalami kenaikan dari 34.976,63 ton pada tahun 2020 menjadi 38.282,62 ton pada tahun 2021 atau terjadi peningkatan 9,45 % dan pada perikanan tangkap juga mengalami penurunan dari 1.384,05 ton menjadi 1.253,238 ton atau turun 9,45 %. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah petani pembudidaya ikan yang membudidayakan ikan dikarenakan pengaruh cuaca.

Populasi ternak mengalami kenaikan pada populasi sapi, kambing domba sedangkan pada populasi domba batur stagnan. Populasi sapi tahun 2021 sebesar 30.943 ekor meningkat dari tahun 2020 sebesar 29.440 ekor pada tahun, atau meningkat sebesar 5,1 %, populasi domba tahun 2020 68.402 naik menjadi 70.114 ekor pada tahun 2021 atau naik 2,5 %, sedangkan populasi kambing tahun 2020 197.169 ekor naik menjadi 209.278 pada tahun 2021 atau naik sebesar 6,1 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator pertumbuhan sektor pertanian sebagai berikut :

Grafik 3.13
Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS, Baperlitbang dan Distankar Kabupaten Banjarnegara

Meskipun demikian Pemerintah Kebupaten Banjarnegara terus melaksanakan upaya peningkatan produksi pertanian, mengingat Kabupaten Banjarnegara memiliki kekhususan antara lain pada keunggulan beras batur, salak, durian, kentang dan juga kopi yang memiliki kualitas unggul. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian;
2. Fasilitasi bibit unggul, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan dan perikanan;
3. Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian secara bijaksana;
4. Pendampingan intensif oleh tenaga ahli di bidangnya masing-masing;
5. Sertifikasi pohon induk untuk menjaga komoditas yang akan dikembangkan;

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 di targetkan sebesar 103 – 104 % dan terealisasi sebesar 102,45% atau tercapai 99,46 %. Hal ini menggambarkan tingkat pendapatan petani di Kabupaten Banjarnegara mengalami surplus. Dimana biaya produksi lebih rendah dari nilai jual produknya sehingga pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya NTP Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.14
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Banjarnegara

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Pertanian dan Perikanan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.238.692.900,00 terealisasi sebesar Rp. 6.137.843.366,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.100.849.534,00 atau 15,21%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 8 (delapan) program, yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian
5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteiner
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata

Selain sektor pertanian, salah satu potensi unggulan Kabupaten Banjarnegara adalah sektor pariwisata. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara diukur melalui indikator :



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	-42,38	3	13,92	464	3	464	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					464		464	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran meningkatnya kinerja sektor pariwisata dengan indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu sebesar 464% dari target yang ditetapkan sebesar 3% dan dapat terealisasi 13,92%.

Pada tahun 2020 sektor pariwisata Kabupaten Banjarnegara mengalami dampak yang sangat berat karena penyebaran *corona virus disease 2019* yaitu menurunnya pengunjung ke destinasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.

Penyebaran mulai awal tahun 2020 yang menjadi bencana nasional, sehingga menyebabkan pemerintah pusat membuat beberapa kebijakan terkait penanganan *corona virus disease 2019*. Salah satu kebijakan yang diberlakukan secara nasional adalah penutupan total seluruh destinasi wisata selama 5 (lima) bulan kemudian kebijakan pemerintah pusat dirubah dengan membuka tempat-tempat wisata namun dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah pembatasan jumlah pengunjung pada obyek wisata sampai dengan awal tahun 2020 dengan memperhatikan protokol Kesehatan yang berlanjut sampai dengan tahun 2021, kunjungan ketempat-tempat wisata tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun realisasi kunjungan wisata tahun 2021 pada obyek dan even wisata di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Kunjungan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2020 – 2021

No	Obyek Wisata	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Dieng	543.988	700.381
2	Mrica	-	-
3	Curug Pitu	5.702	6.214
4	TMRS Serulingmas	96.692	116.677
5	Paweden / Anglir Mendung	8.200	7.771
6	Serayu Adventure Indonesia	-	-
7	Pikas Banyuwoong	6.202	5.200
8	Surya Yudha Park	35.038	36.875
9	MICE + SYCC	48.124	53.018
10	Arung Jeram Serayu	2.628	2.633
11	Serayu Park	3.460	-
12	Surya Yudha Sport Center	8.519	12.558



No	Obyek Wisata	Tahun 2020	Tahun 2021
13	d'Qiano Dieng	41.003	1.436
14	Curug Pletuk	-	6.806
15	Curug Kasinoman	-	9.702
16	Kalianget Mangunan	-	24.827
17	Bukit Ares Pawinihan	-	4.383
18	Bukit Asmara Situk	-	1.694
19	Bukit Cinta Kemantran	-	405
20	Tikako	-	29.670
21	Tampomas	26.598	21.839
22	Kali Onggok /Rakit	18.829	10.479
23	Cangkringan / Sigaluh	41.240	26.411
24	Tirta Panaraban/Wanayasa	-	30.540
25	Tirta Sumbereja	6.600	15.758
26	Kolam Renang Cinta Petuguran/Punggelan	-	7.111
27	Kolam Renang Gondang Ria	-	23.219
28	Pulas Garden / Banjarmangu	-	9.627
	D'Jos Rafting	1.204	-
29	Dieng Culture Wisata	300	3.400
30	Festival Serayu Indonesia	-	-
31	Kuduran Wanayasa, Nyadran Gede	-	-
32	Desa Wisata	79.577	-
33	Event Wisata	2.500	-
34	Hotel	45.654	47.900
35	Prosesi Hari Jadi Banjarnegara ke-449	12.500	-
36	Gelar Seni HUT Banjarnegara ke-449	7.000	-
37	Gelar Wayang Kulit HUT Banjarnegara ke-449	2.000	-
38	Banjarnegara Berdzikir HUT Banjarnegara ke-449	7.000	-
39	Expo HUT Banjarnegara ke-449	20.000	-
40	Event Budaya	-	3.040
	JUMLAH	1.070.558	1.219.574

Sumber data : Disparbud Kab. Banjarnegara

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir RPJMD, persentase kunjungan wisata tercapai sama dengan capaian pada tahun 2021 yaitu 464%. Meskipun masih dalam kondisi pandemik corona *virus disease 2019*, Pemerintah Kabupaten berupaya tetap pengembangan destinasi pariwisata untuk tetap mempertahankan jumlah kunjungan wisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

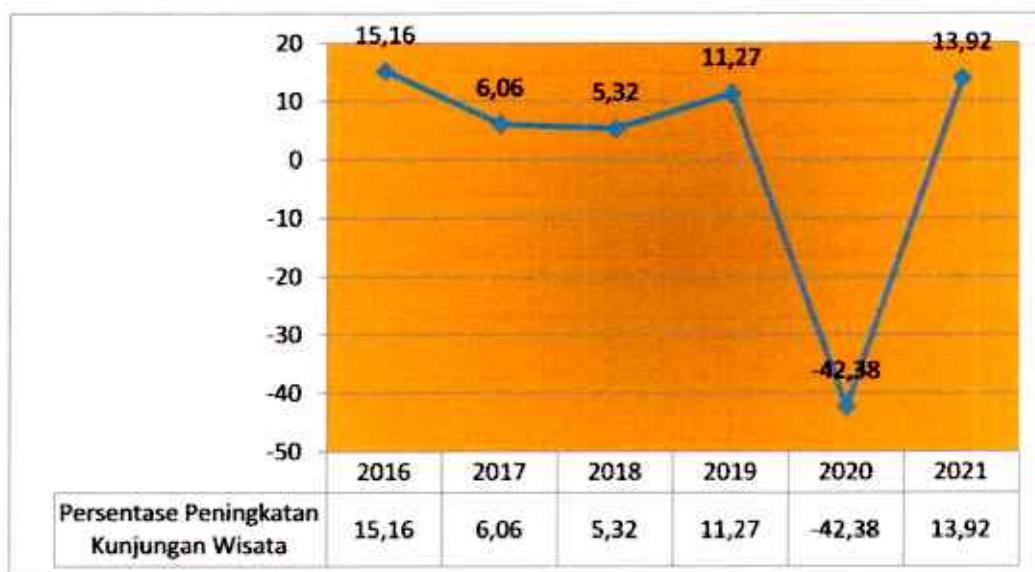
Adapun upaya pendukung tercapainya target persentase kunjungan wisata antara lain :

1. Secara intensif melakukan promosi baik internal kabupaten, antar kabupaten, antar provinsi bahkan antar pulau maupun melalui media cetak dan elektronik;
2. Menyelenggarakan even pariwisata secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

3. Melakukan kerjasama dengan pengelola pariwisata.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.15
Persentase Peningkatan Kunjungan Pariwisata
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021



Sumber data : Disparbud Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisatawan cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun pada tahun 2019 mulai terjadi peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Banjarnegara sebesar 11,27 %.

Pada tahun 2020 bersamaan dengan terjadinya wabah *Corona Virus Disease 2019* indikator kinerja persentase peningkatan kunjungan wisata mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -42,38%, tahun 2021 meningkat lagi menjadi 13,92%. Hal ini menunjukkan bahwa mulai kebangkitan sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.

Agar dapat mempertahankan kunjungan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai menginisiasi munculnya desa wisata dengan kekhasan masing-masing wilayah. Dengan semakin beragamnya sajian yang dapat dinikmati wisatawan, diharapkan kunjungan wisatawan akan pulih seperti tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata didukung oleh alokasi APBD Kabupaten Banjarnegara Rp. 678.618.900,00 terealisasi Rp. 559.962.898,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 118.656.002,00 atau 17,48 % melalui 2 (dua) program, yaitu program pemasaran pariwisata dan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

**Sasaran 5 :****Meningkatnya Kinerja UKM dan Koperasi**

Sasaran meningkatnya kinerja UKM dan Koperasi diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
1. Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	10,07**	13 - 14	10,07**	77,46	14-15	71,93	Tinggi
2. Persentase koperasi sehat	%	30,07	37-38	27,55	74,46	38-39	72,50	Sedang
Rata-rata Capaian					75,96		72,22	

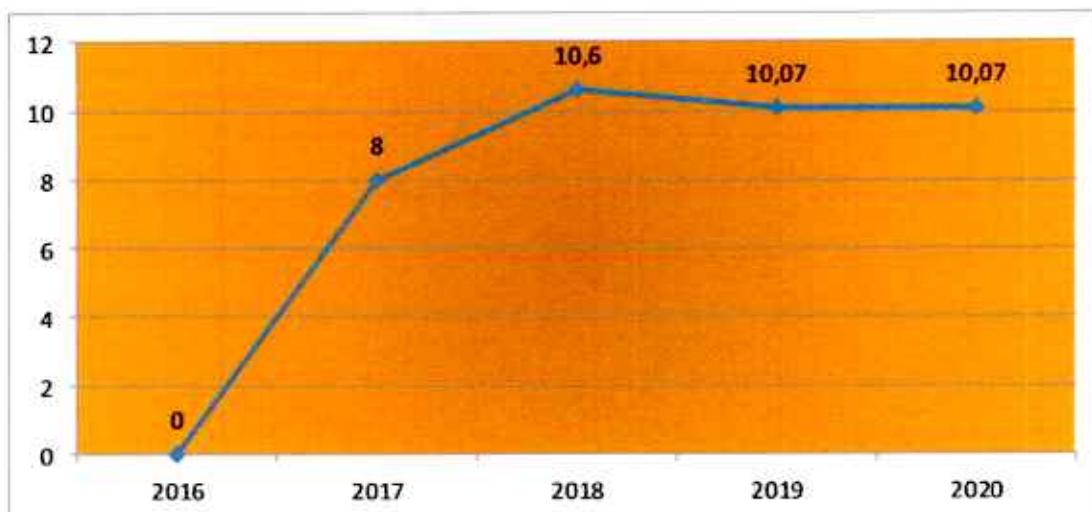
**Capaian tahun 2019

Sasaran meningkatnya kinerja UKM dan Koperasi tercapai dengan rata-rata 77,46 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka tercapai dengan rata-rata 71,93%.

Pada tahun 2021 indikator kontribusi UKM terhadap PDRB ditargetkan target 13 - 14% namun realisasi kinerja baru mencapai 10,07% (2019), atau realisasi masih dibawah target. Kontribusi UKM terhadap PDRB belum dapat dihitung akibat pandemi *Covid-19*. Apabila melihat berdasarkan capaian tahun 2019, maka menggambarkan bahwa pada tahun 2021 usaha kecil dan menengah belum maksimal memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.16

Kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020

Sumber Data: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara mengalami fluktuatif kontribusinya. Pada tahun 2017 dan 2018 kontribusi UKM terhadap PDRB mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi pada 2019 mengalami penurunan sebesar 0,53 %. Salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi di tahun 2021 adalah pertumbuhan usaha kecil dan menengah, dimana untuk usaha kecil dan menengah tidak mengalami perubahan dari tahun 2020, yaitu jumlah usaha kecil 2.791 unit, usaha menengah 231 unit, sedangkan usaha mikro mengalami kenaikan sebesar yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 1,08% atau dari 24.926 unit menjadi 25.196 unit ditahun 2021.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDRB, antara lain :

1. Mendorong pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki ijin usaha;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil menengah melalui pelatihan, peningkatan inovasi produk;
3. Mendorong pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki hak paten produk;
4. Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan di bank;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan industri rumah tangga , industri kecil dan industri menengah baik dengan anggaran Kabupaten Provinsi maupun pusat.

Sesuai Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi koperasi sehat adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. Kriteria koperasi sehat adalah :



1. Perangkat organisasi koperasi berjalan dengan baik melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), ada pengurus dan pengawas koperasi;
2. Sehat administrasi (semua transaksi tentang perkoperasian tersusun dengan tertib);
3. Adanya Peningkatan usaha (aset, omset dan Sisa Hasil Usaha);
4. Pelayanan kepada anggota meningkat.

Pada indikator persentase koperasi sehat dari target 37 – 38 % terealisasi sebesar 27,55% atau tercapai sebesar 74,46 %. Apabila bandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai 72,5 %.

Di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 terdapat sejumlah 421 koperasi dimana 116 koperasi dinyatakan sebagai koperasi sehat, sedangkan koperasi aktif sejumlah 195 dan koperasi yang tidak aktif sejumlah 226 koperasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase koperasi aktif dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.17
Persentase Koperasi Sehat Tahun 2016- 2021



Sumber Data : Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, koperasi sehat terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif, setelah mengalami peningkatan tahun 2016, kemudian menurun 2017 dan stagnan tahun 2018 kemudian menurun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kondisi penurunan persentase koperasi sehat tahun 2021 disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. sebagian besar koperasi tidak bisa menyelenggarakan RAT dikarenakan kebijakan penanganan Covid-19, yang membatasi untuk melakukan aktifitas berkumpul masyarakat dalam jumlah yang banyak. Sehingga tahun 2021 banyak koperasi aktif yang tidak melaksanakan agenda RAT.
2. Penambahan jumlah koperasi baru yang belum mempunyai kewajiban RAT karena koperasi baru yang diwajibkan untuk melaksanakan RAT adalah koperasi yang



telah mempunyai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI selama 1 tahun.

3. Terdapat 8 koperasi yang wilayah keanggotaanya sudah ditarik ke provinsi Jawa Tengah.

Sehingga pada tahun 2021 hanya terdapat dari 116 koperasi yang telah melaksanakan RAT secara *luring* maupun *daring*.

Adapun untuk mencapai capaian kinerja tersebut dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT setiap tahun;
2. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola koperasi, pengawas beserta kadernya;

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja UKM dan Koperasi didukung dengan anggaran sebesar Rp. 167.411.500,00 terealisasi sebesar Rp. 157.554.900,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.856.600,00 atau 5,89%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Serta
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
5. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Sasaran 6 : Meningkatnya Jumlah Investasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	-50,7	15 – 17,5	22,08	147,2	17,5	126,17	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			147,2			126,17		

Indikator persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional tahun 2021 ditargetkan 15 – 17,5 % terealisasi 22,08 % atau tercapai 147,2 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 72,78 % atau dari -50,7 % tahun 2020

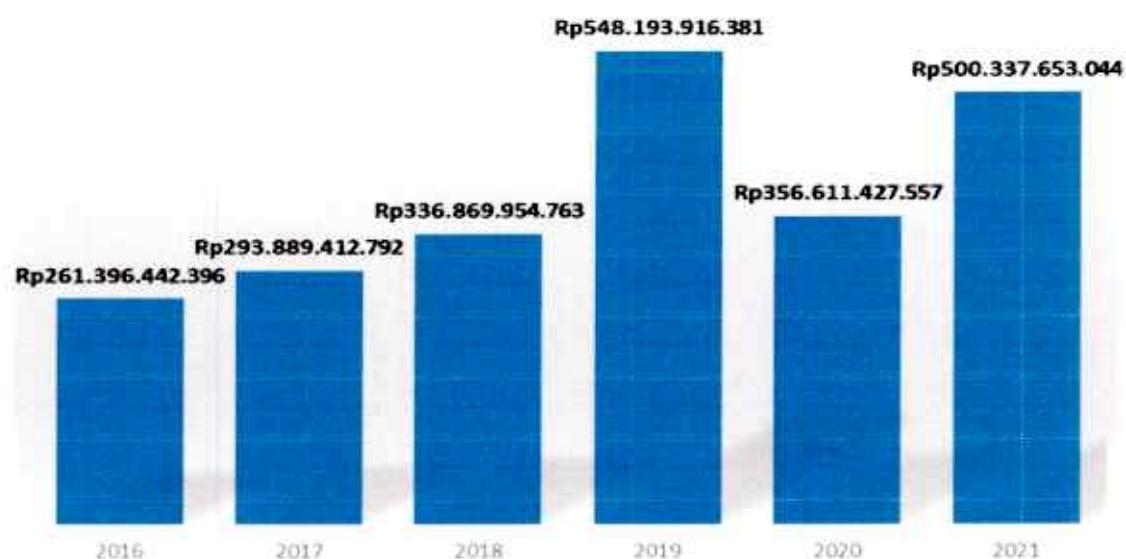
menjadi 22,08 % pada tahun 2021, atau nilai investasi berskala nasional tahun 2020 sebesar Rp. 270.307.861.092,- naik menjadi Rp. 346.889.648.735,- pada tahun 2021. Jika realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan akhir RPJMD maka capaian kinerjanya telah mencapai 126,17 %.

Adapun jumlah total investasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 500.337.653.044,- Sedangkan jumlah investasi berskala nasional sebesar Rp. 346.889.648.735,- atau sebesar 69,30%, sedangkan jumlah investasi berskala mikro sebesar Rp. 81.691.918.309,- atau sebesar 16,36 % dan jumlah investasi berskala kecil sebesar Rp. 71.756.086.000,- atau sebesar 14,34 %.

Dari nilai investasi tahun 2021 Rp. 500.337.653.044,- telah menyerap tenaga kerja 6.409 orang, turun sebesar 964 orang dari tahun 2020 sejumlah 7.373 orang dengan jumlah total usaha sejumlah 1.792 usaha yang terdiri dari usaha mikro sejumlah 1.735 usaha dengan nilai total investasi Rp. 81.691.918.309,- menyerap tenaga kerja sebanyak 5.170 orang, usaha kecil sejumlah 34 usaha dengan nilai total investasi sebesar Rp. 71.756.086.000,- menyerap tenaga kerja 403 orang, usaha menengah sejumlah 7 usaha dengan total nilai investasi Rp. 33.316.045.176,- menyerap tenaga kerja sebanyak 23 orang dan usaha besar sejumlah 16 usaha dengan total nilai investasi Rp. 313.573.603.559 dan menyerap tenaga kerja 813.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 3.18
Nilai Investasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021**



Sumber Data : Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara

Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara cenderung fluktuatif dimana pada periode tahun 2016-2019 nilai investasi terdapat peningkatan, tetapi tahun 2020 terjadi penurunan nilai investasi. Adapun



penurun nilai investasi tahun 2020 salah satu faktornya adalah karena dampak pandemik *covid-19* dimana para investor/calon investor menahan investasinya untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya di Kabupaten Banjarnegara, kemudian pada tahun 2021 seiring dengan penguatan ekonomi selama pandemi dan kebijakan penanganan pandemi yang pro terhadap pengembangan dunia usaha, maka tahun 2021 mulai ada peningkatan nilai investasi, walaupun nilai investasinya belum setinggi tahun 2019.

Adapun satu faktor untuk mendorong peningkatan nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara adalah adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dituangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031. Dimana diatur bahwa usaha industri harus berada pada Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Banjarnegara adalah :

1. Intensif melakukan promosi baik secara langsung maupun melalui website;
2. Melakukan penyusunan profil investasi di Kabupaten Banjarnegara melalui Sistem Peta Investasi (Simpetin) yang memudahkan para investor untuk melihat peluang investasi di Kabupaten Banjarnegara;
3. Dilaksanakannya perijinan online yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui OSS (*online single submission*);
4. Dilaksanakannya program JITU (Jaringan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang digunakan untuk perijinan lokal diluar OSS secara *online*;
5. Meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan substansi sepanjang jalan nasional dan provinsi kiri kanan lebar 200 meter dari jalan, dapat digunakan untuk perdagangan dan industri;

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Investasi didukung dengan anggaran sebesar Rp. 475.932.000,00 terealisasi sebesar Rp. 303.488.200,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 172.443.800,00 atau 36,23%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Pengendalian Penanaman Modal,
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

**Sasaran 7 :****Meningkatnya Kesempatan Kerja**

Meningkatnya kesempatan kerja merupakan salah satu indikasi berkembangnya perekonomian daerah. Peningkatan kesempatan kerja diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86	< 4,6	5,86	72,61	≤ 4,5	69,78	Sedang
Rata-rata Capaian				72,61			69,78	

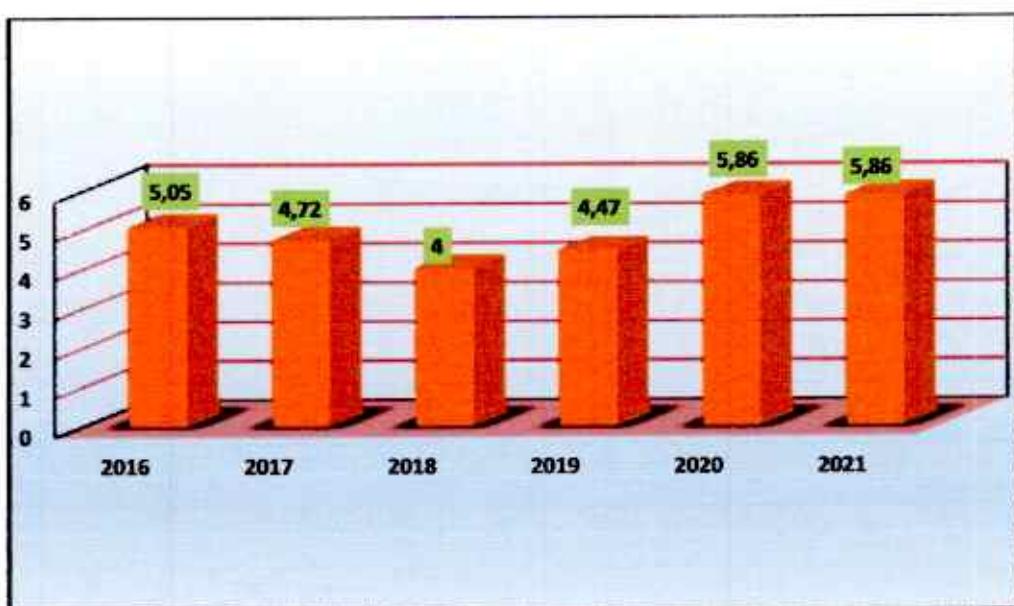
Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara *mengalami peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* dari target 4,6 % terealisasi 5,86 % atau capaian kinerjanya 72,61 %. Tingkat pengangguran terbuka sama dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari perusahaan untuk tidak menambah karyawan baru atau perusahaan menutup usahanya untuk mengurangi beban perusahaan. Pengurangan atau penutupan usaha sebagai dampak dari menyebarnya wabah *virus corona-19*.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dengan perusahaan yang memiliki lowongan kerja;
2. Semakin banyaknya publikasi lowongan kerja melalui media online yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat;
3. Adanya perbaikan tata kelola program penanganan tingkat pengangguran terbuka;
4. Adanya komunikasi, kemitraan, publikasi dengan stakeholder melalui optimalisasi sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Grafik 3.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016 – 2021



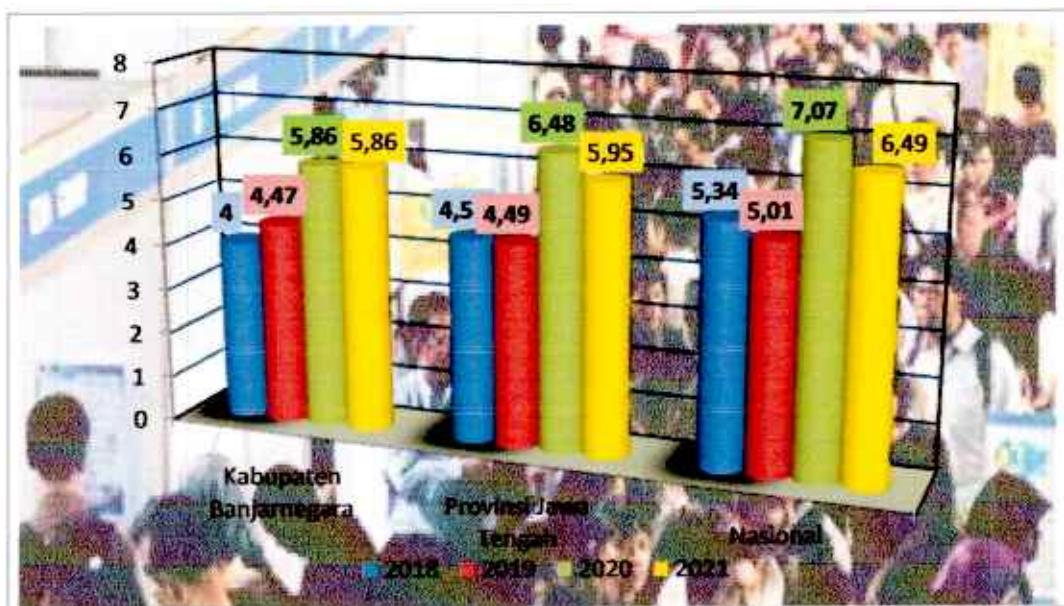
Sumber Data : BPS Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, capaian indikator kinerja cenderung fluktuatif, dimana dalam kurun waktu tahun 2016 – 2018 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, namun tahun 2019 dan 2021 dan terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang signifikan yaitu sebesar 1,39 %. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain kasus PHK pada perusahaan karena dampak dari pandemi *covid-19*.

Apabila dibandingkan target RPJMD tahun 2022 dengan realisasi tahun 2021, maka dicapai sebesar 69,78 %. Pencapaian ini mengindikasikan trend negatif terhadap upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, sehingga program kegiatan yang berkaitan langsung dalam upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka harus terus didukung dengan kebijakan disemua lini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 berhasil dibawah TPT tingkat Provinsi Jawa Tengah dan TPT Nasional. Apabila dibandingkan dengan nasional maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjarnegara lebih rendah 0,63%, sedangkan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Banjarnegara lebih rendah 0,09%.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja didukung dengan anggaran sebesar Rp. 248.582.600,00 terealisasi sebesar Rp. 227.364.700,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.217.900,00 atau 8,54%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

Sasaran 8 : Meningkatnya Kinerja Sektor Industri

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Pertumbuhan sektor industri	%	-1,94*	7 – 8	-1,94*	-27,71	7,1 - 8	-27,32	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian					-27,71		-27,32	

*Realisasi tahun 2020

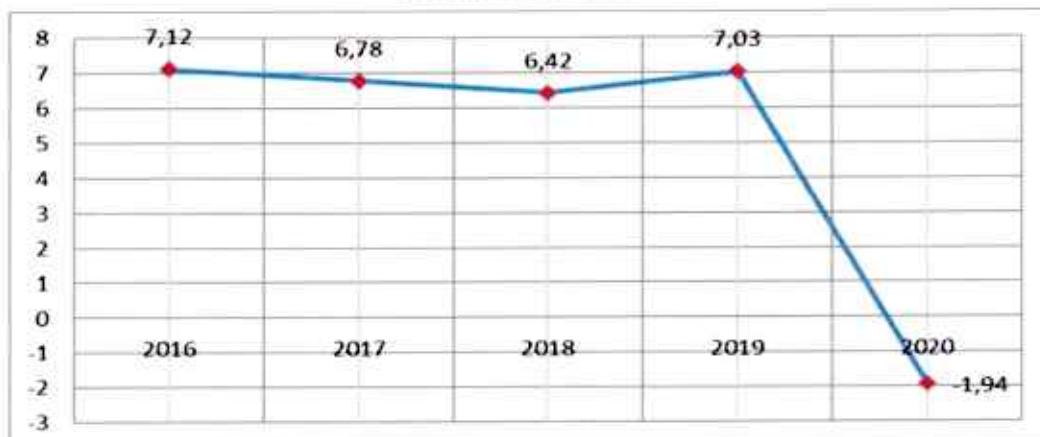
Sektor industri merupakan salah satu sektor dalam PDRB yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan nilai produknya. Indikator Pertumbuhan Sektor Industri dari target 7 – 8 terealisasi -1,94% (2020) atau tercapai -27,71%.

Sektor usaha dalam kategori industri pengolahan merupakan penyumbang utama sektor sekunder dalam perekonomian Banjarnegara. Sebagai salah satu dari tiga sektor terbesar dalam perekonomian, sektor industri pengolahan juga menjadi salah satu akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Setidaknya dalam satu lustrum terakhir, sektor industri pengolahan selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Meski terus mengalami koreksi semenjak tahun 2017, namun pertumbuhan lapangan usaha pada kategori industri pengolahan kembali mengalami percepatan pada tahun 2019. Adapun capaian indikator Pertumbuhan Sektor Industri pada tahun 2021 masih menggunakan capaian kinerja tahun 2020 karena hasil pengukuran indikator tersebut pada tahun belum dirilis BPS Kabupaten Banjarnegara.

Apabila dilihat dari capaian indikator kinerja Pertumbuhan Sektor Industri pada tahun 2020, maka capaian kinerjanya dibawah target yang ditetapkan yaitu pada angka 7 – 8 %. Dengan realisasi pertumbuhan sebesar -1,94% (2020) maka angka pertumbuhan sektor industri sangat jauh dari target dengan capaian sebesar -27,71%. Share dan pertumbuhan sektor industri ini juga mempengaruhi besaran tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor ini.

Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Grafik 3.21
Industri Pengolahan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016 – 2021



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Pertumbuhan sector industri di Kabupaten Banjarneagra kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 – 2020 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan sektor industri pada tahun 2016 sebesar 7,12 menurun menjadi 6,78 pada tahun 2017 dan menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 6,42. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 menjadi 7,03 dan menurun lagi menjadi -1,94 pada tahun 2020.

Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Banjarnegara, antara lain :

1. Karena adanya pandemi *covid-19* mulai tahun 2020;
2. Tingkat sumber daya manusia pada industri kecil menengah yang masih rendah dan kurangnya penguasaan terkait penggunaan teknologi;
3. Menurunnya daya beli konsumen terhadap produk industri kecil menengah sehingga berpengaruh terhadap kontinuitas produksi.

Berdasarkan penghitungan dari Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, pertumbuhan sektor industri mengalami percepatan di tahun 2019. Pertumbuhan sektor industri mencapai 7,03% lebih cepat 0,61% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang baik ini didukung oleh sub sektor industri makanan dan minuman, yang selama 5 (lima) tahun selalu tumbuh di atas sektor industri pengolahan.

Adapun upaya untuk meningkatkan sektor ini, beberapa hal perlu dilakukan terutama berkaitan dengan kemudahan berusaha dan efisiensi dalam rantai nilai proses industri terutama dalam peningkatan daya saing produk manufaktur di era revolusi industri 4.0, atau di era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru.

Tantangan ke depan bagi Kabupaten Banjarnegara adalah menjaga pertumbuhan sektor ini. Sehingga sektor ini dapat terus menyerap produksi sektor primer dan memberi nilai tambah pada output yang dihasilkan.



Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Industri didukung dengan anggaran sebesar Rp. 931.744.900,00 terealisasi sebesar Rp. 610.053.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 321.691.300,00 atau 34,53%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.
4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

Sasaran 9 : Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Pertumbuhan Sektor perdagangan	%	-4,82*	8,3 s d 9	-4,82*	-58,07	8,4	-57,38	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian					-58,07		-57,38	

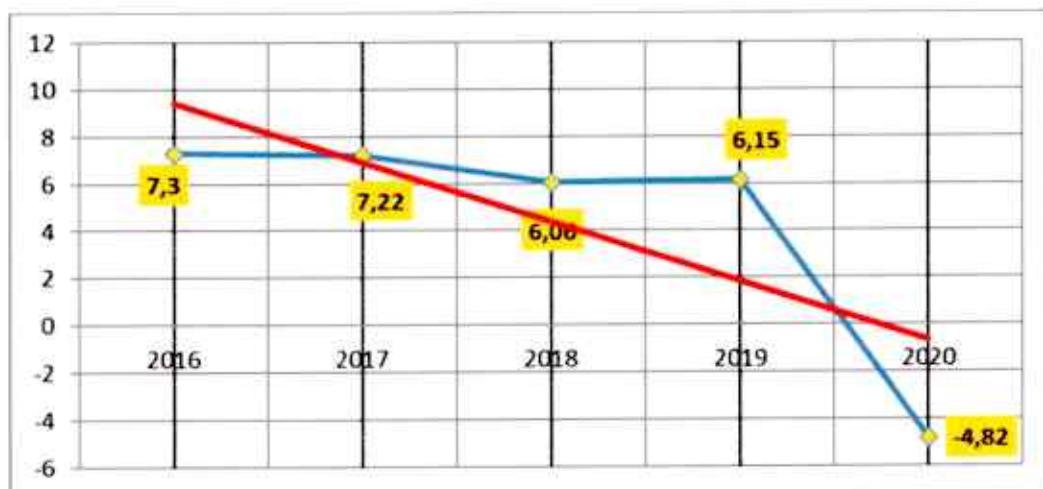
*Realisasi tahun 2020

Capaian indikator kinerja pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2021 menggunakan data capaian kinerja tahun 2020, karena pengukuran terhadap indikator ini pada tahun 2020 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Banjarnegara. Adapun realisasi tahun 2021 yang memakai realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target tahun 2021 maka capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar -58,07%. Dimana realisasi tahun 2020 sebesar -4,82% sedangkan target kinerja tahun 2021 sebesar 8,3 – 9 %. Sedangkan realisasi 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya adalah sebesar -57,38

Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Banjarneagra selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan trend menurun kecuali pada tahun 2019 yang sedikit meningkat. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2016 sebesar 7,30% menurun menjadi 7,22% pada tahun 2017, menurun lagi menjadi 6,06% pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 6,15% pada tahun 2019 lalu turun sangat drastis pada tahun 2020 menjadi -4,82%

Berikut ini disajikan pertumbuhan sektor perdagangan selama kurun waktu 5 tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

Grafik 3.22
Pertumbuhan Sektor Perdagangan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Sektor perdagangan merupakan lapangan usaha terbesar dalam sektor tersier yang membentuk struktur perekonomian daerah. Karena sifat usahanya yang berupa kegiatan-kegiatan dalam lingkup men-delivery barang dan jasa (non ekstraktif dan non manufaktur), maka sektor tersier memang secara alamiah memiliki nilai tambah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren munurun kecuali pada tahun 2019 yang sedikit meningkat. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2016 sebesar 7,3% menurun menjadi 7,22% pada tahun 2017, menurun lagi tahun 2018 menjadi 6,06, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 6,15% dan menurun sangat tajam pada tahun 2020 yaitu menjadi -4,82.

Secara empiris, sub sektor yang menjadi penyumbang terbesar dalam sektor perdagangan adalah pada perdagangan secara grosir maupun eceran. Selain itu, sub kategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya juga memiliki andil yang cukup besar dalam perekonomian di daerah. Pada sektor perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan diperlukan agar terjadi keseimbangan distribusi tanpa menimbulkan gejolak inflasi dengan tetap mempertimbangkan marjin perdagangan yang diperoleh pelaku ekonomi.

Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Banjarnegara, antara lain :

1. Karena adanya pandemi covid-19 mulai tahun 2020;



2. Dengan adanya pandemi *covid-19* mengakibatkan daya beli masyarakat turun, distribusi barang ke pengecer terlambat;
3. Pelaku usaha mengurangi volume barang dagangannya karena keterbatasan pemasaran produk.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.043.443.750,00 terealisasi sebesar Rp. 1.767.697.315,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 275.746.435,00 atau 13,49%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 5 (lima) program yaitu :

1. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan.
3. Program Pengembangan Ekspor.
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

Sasaran 10 : Meningkatnya Stabilitas Harga

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Laju inflasi	%	1,90	3 ± 1	2,18	127,33	3±1	127,33	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			127,33			127,33		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2021 target kinerja indikator laju inflasi ditetapkan sebesar 3 ± 1 , adapun realisasi kinerjanya sebesar 2,18 % dengan capaian kinerja sebesar 127,33 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah maka tercapai dengan rata-rata capaian 127,33%.

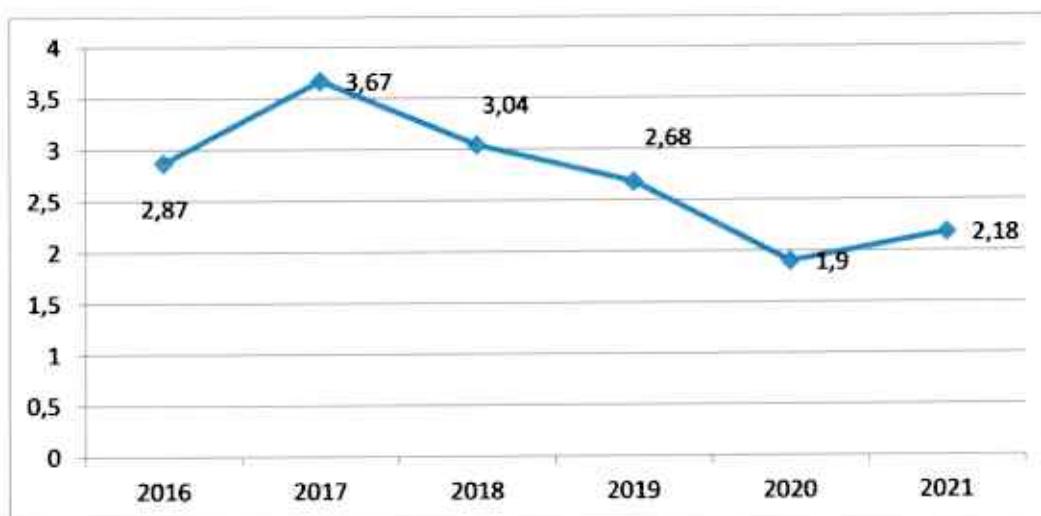
Selama tahun 2021 terdapat 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, sedangkan 2 pengeluaran lainnya mengalami deflasi ((kelompok pengeluaran disusun berdasarkan klasifikasi dalam *The Clasification of individual Consumption by purpose – COICOP*). Komoditas yang mengalami inflasi meliputi, komoditas makanan, minuman dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

rumah tangga; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; Kesehatan transportasi; rekreasi, olahraga dan budaya; penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi tertinggi terjadi pada komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi tertinggi terjadi pada komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 6,05% serta komoditas rekreasi, olah raga dan budaya dengan inflasi 3,35%. Sedangkan komoditas deflasi meliputi komoditas Pendidikan (-3,36 %) serta komoditas informasi, komunikasi dan jasa keuangan (-0,12%).

Laju inflasi Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sebesar 2,18 % naik 0,28 % dari inflasi pada tahun 2020. Faktor yang sangat mendasar berupa turunnya permintaan masyarakat, khususnya yang disebabkan oleh *pandemic Covid-19* secara umum menjadi penyebab menurunnya laju inflasi selain faktor lainnya, seperti pengaruh musiman (panen, bulan ramadhan dan hari raya). Beberapa hal sudah dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain melalui pemberian intensif tunai secara langsung, baik bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak, maupun intensi yang bersifat tunai seperti subsidi listrik.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

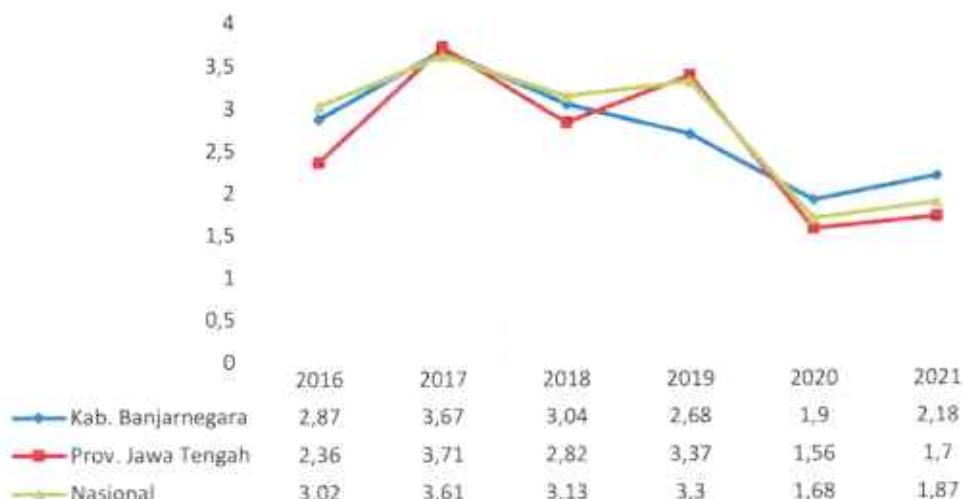
**Grafik 3.23
Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021**



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Adapun perkembangan laju inflasi kalender Kota Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3.24
Inflasi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dari pada laju inflasi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Dimana laju inflasi Kabupaten Banjarnegara sebesar 2,18 %, angka ini naik 0,28 % dari tahun 2020 yang sebesar 1,90 %. Sedangkan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,70 dan Nasional 1,78.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Stabilitas Harga didukung dengan anggaran sebesar Rp. 671.711.650,00 terealisasi sebesar Rp. 452.462.015,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 219.249.635,00 atau 32,64%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (lima) program yaitu :

1. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran 12: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



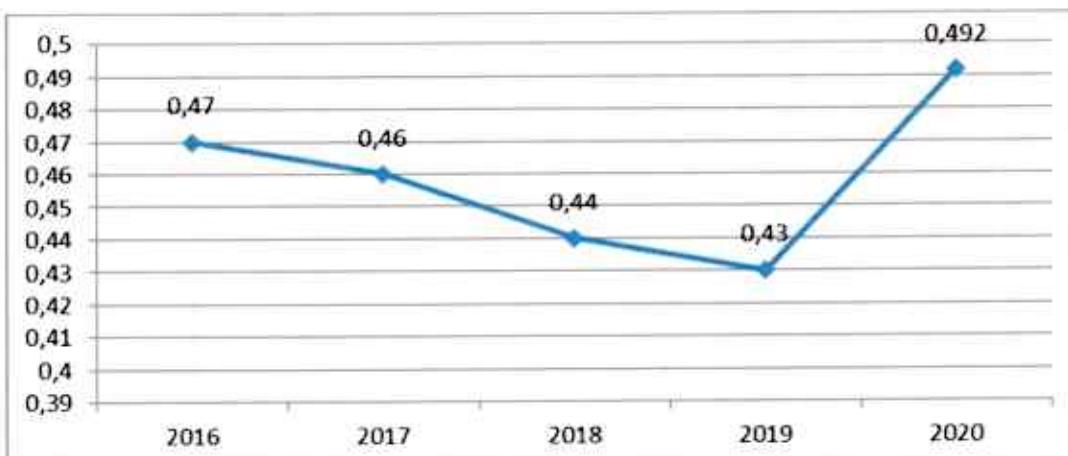
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Williamson	Angka	0,492	0,44	0,492*	88,18	0,43	85,58	Tinggi
Rata-rata Capaian					88,18		85,58	

*realisasi tahun 2020

Indeks williamson merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah khususnya antar wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Indeks Williamson akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol yang menandakan tidak ada kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukan adanya kesenjangan antar kecamatan atau pertumbuhan ekonomi antar kecamatan tidak merata.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.25
Indeks Williamson
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2020**



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Realisasi Indeks Williamson pada tahun 2021 masih menggunakan realisasi tahun 2020 karena Indeks Williamson tahun 2021 belum di rilis BPS Banjarnegara.

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 didapat nilai bahwa angka Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara berada pada posisi antara 0,43 sampai dengan 0,492. Indeks Williamson ini mempunyai maksud bahwa ada ketimpangan pendapatan penduduk antar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Dari Grafik tersebut juga terlihat antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ada kecenderungan mengalami penurunan kesenjangan tingkat pendapatan penduduk antar kecamatan namun pada tahun 2020 ada kenaikan



yang sangat signifikan dari 0,43 naik menjadi 0,492, walaupun kenaikan ini masih dalam kondisi ketimpangan yang berkategorikan sedang dengan kata lain pendapatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara semakin mendekati kesetaraan.

Memperhatikan kondisi pendapatan penduduk berdasarkan nilai dari Indeks Williamson selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, memberikan indikasi bahwa masih perlu ditingkatkan inovasi dalam mengelola kekayaan karakteristik di tiap wilayah, sehingga dapat dioptimalkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran penduduk.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.279.247.900,00 terealisasi sebesar Rp. 1.269.906.900,00 sehingga terdapat sisanya anggaran sebesar Rp. 9.341.000,00 atau 0,73%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi Kualitas Udara, Kualitas Air Sungai, dan Tutupan Lahan

Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban dalam menangani urusan lingkungan hidup merupakan satu urusan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan amanat Undang Undang No. 32 Tahun 2004. Urusan ini diserahkan karena lingkungan hidup mempunyai keterbatasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga perlu dikelola.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, menjadikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai salah satu indikator utama mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai dan tutupan lahan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	72,78	69	62,36	90,38	69,25	90,05	Tinggi
Rata-rata Capaian					90,38		90,05	

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 69% terealisasi sebesar 62,36% atau tercapai 90,38%. Jika dibandingkan tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan yang signifikan sebesar 10,44 %, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai sebesar 90,05%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 memiliki angka sebesar 62,36. Hal ini menunjukkan bahwa status lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 berada dalam kondisi Sedang. Menurunnya angka IKLH pada tahun 2021 akibat adanya kerusakan lingkungan hidup yang diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah air, udara dan kerusakan ekosistem dan kerusakan lingkungan akibat proses alam antara lain kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan faktor alam. Kerusakan ini terjadi secara alami tanpa campur tangan atau peranan manusia, misalnya tanah longsor, curah hujan yang sangat tinggi yang sering kali terjadi pada wilayah dataran tinggi atau pegunungan.

Sesuai RPJMN 2020-2024, untuk tingkat Kabupaten/Kota, IKLH dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKLH = 0,405 \times IKU + 0,376 \times IKA + 0,219 \times IKL$$

Kategori nilai IKLH 2020-2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.9
Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Penghitungan IKLH dengan menggunakan tiga parameter meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan.



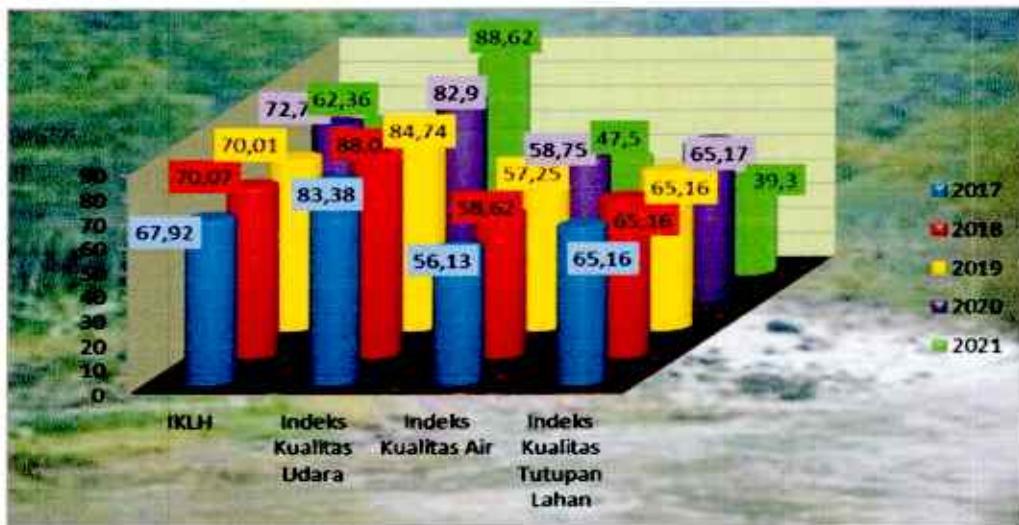
Indeks kualitas air merupakan indikator derajat kualitas air yang ditentukan dengan pengukuran 6 (enam) parameter pencemar. Penghitungan indeks kualitas air telah diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2013. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Banjarnegara dilakukan pada 8 sungai (Sungai Pekacangan, Sungai Ligung, Sungai Sapi, Sungai Dolog, Sungai Blimbingsari, Sungai Palet, Sungai Urang, dan Sungai Merawu) dengan menggunakan 36 lokasi titik sampling dan dilakukan secara periodik dua kali setahun agar mendapatkan angka indeks yang mewakili kualitas air Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan. Indeks Kualitas Air Tahun 2021 untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara mencapai 47,5 atau berada pada kategori buruk. Angka ini turun sebesar 11,25% dari tahun 2020 yang mencapai angka 58,75, dan kategori IKA turun dari tahun 2020, kenaikan indeks kualitas air ini juga dipengaruhi oleh intensitas hujan pada tahun 2021 yang menyebabkan parameter turunkan sehingga indeks kualitas air menjadi turun.

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas udara yaitu *pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999*, pemantauan kualitas udara melalui metode *Passive Sampler* dilakukan di 4 titik lokasi tetap yang mewakili wilayah pemukiman, industri, padat lalu lintas dan perkantoran. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Secara umum kualitas udara di Kabupaten Banjarnegara utamanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Dari penghitungan indeks kualitas udara tahun 2021 didapatkan angka 88,62 atau kategori baik. Angka ini naik sebesar 5,72 dari tahun 2020 yang mencapai angka 82,9.

Indeks kualitas tutupan lahan didapatkan dengan menjumlahkan luasan tutupan lahan pada suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Namun pada tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup masih menggunakan data luas tutupan hutan sebagai data utama dengan hasil perhitungan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 mencapai 39,3 atau kategori buruk. Indeks kualitas tutupan lahan tahun 2021 turun sangat signifikan dari tahun 2020 sebesar 25,87 menjadi 39,3. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara penghitungan indeks kualitas tutupan lahan yang masih sama dengan sebelumnya hanya meliputi wilayah hutan saja.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 - 2021



Sumber Data : DPKPLH Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, IKLH Kabupaten Banjarnegara terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif, pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Permasalahan/kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat/pelaku industri yang membuang sampah maupun air limbah tanpa pengolahan ke sungai sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai;
2. Dalam penghitungan indeks tutupan lahan, selain data luas hutan, baru tersedia data ruang terbuka hijau dan tutupan lahan di wilayah perkotaan. Perlu dilakukan inventarisasi data tutupan lahan yang ada di luar wilayah perkotaan;
3. Regulasi dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara belum lengkap;
4. Perubahan iklim;
5. Menurunnya kualitas udara terutama akibat pertambahan industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya;
6. Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu daerah rawan bencana alam tanah longsor.

Solusi pemecahan masalah :

1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
2. Melakukan inventarisasi data tutupan lahan/vegetasi yang ada diluar wilayah perkotaan;
3. Menyusun regulasi yang menjadi dasar untuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;



4. Pemantauan dan pembinaan terhadap masyarakat serta pelaku industri tentang pengelolaan limbah;
5. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terhadap generasi muda melalui wadah saka kalpataru dan pendidikan di sekolah untuk lebih peduli dan berbudaya lingkungan;
6. Pembinaan pada kampung iklim yang berorientasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
7. Pembinaan pada kampung iklim yang berorientasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
8. Perlu adanya pemasangan papan himbauan dan papan peringatan di lokasi yang strategis dengan tujuan menyadarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi Kualitas Udara, Kualitas Air Sungai, dan Tutupan Lahan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.123.661.850,00 terealisasi sebesar Rp. 712.717.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 410.944.050,00 atau 36,57%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 6 (enam) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
-------------	--



Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP*	100	WTP	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			100			100		

*) Tahun 2020

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian indikator opini WTP adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan selama lima tahun berturut-turut tercapai sesuai yang diharapkan, tahun 2016 atas audit LKD tahun 2015, tahun 2017 atas audit LKD tahun 2016, tahun 2018 atas audit LKD tahun 2017, tahun 2019 atas audit LKD tahun 2018, tahun 2020 atas audit LKD Tahun 2019 dan tahun 2020 atas audit LKD Tahun 2020. Adapun tahun 2022 atas audit LKD Tahun 2021 sampai dengan laporan ini disusun masih dalam proses pelaksanaan audit pendahuluan dan akan dilanjutkan sampai dengan bulan April, sehingga capaian yang disajikan menggunakan data tahun sebelumnya dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara optimis dapat mempertahankan opini WTP.



Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan pengelolaan keuangan secara online;
2. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dengan basis online;
3. Indeks satuan harga dapat diakses melalui media online;
4. Secara bertahap diimplementasikan transaksi non tunai;
5. Sedang direncanakan pengintegrasian antara perencanaan dan sistem pengelolaan keuangan.

Walaupun Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berhasil mempertahankan Opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut, namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya penyajian laporan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya laporan yang cepat, tepat dan akurat.
3. Masih adanya ketidak jelasan keterangan / dokumen yang mendukung aliran dana masuk ke Kas Umum Daerah.
4. Masih dibutuhkannya peningkatan kemampuan / pengetahuan / keahlian dari Sumber Daya Manusia dalam menjalankan fungsi akuntansi / penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan inventarisasi serta pencatatan terhadap aset-aset yang ada.
2. Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA Barang), Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) melalui Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di semua Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi atau melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan pengelolaan APBD baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan melalui bintek/diklat.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.595.632.050,00 terealisasi sebesar Rp. 2.325.503.650,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 270.128.400,00 atau 10,41%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Daerah**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

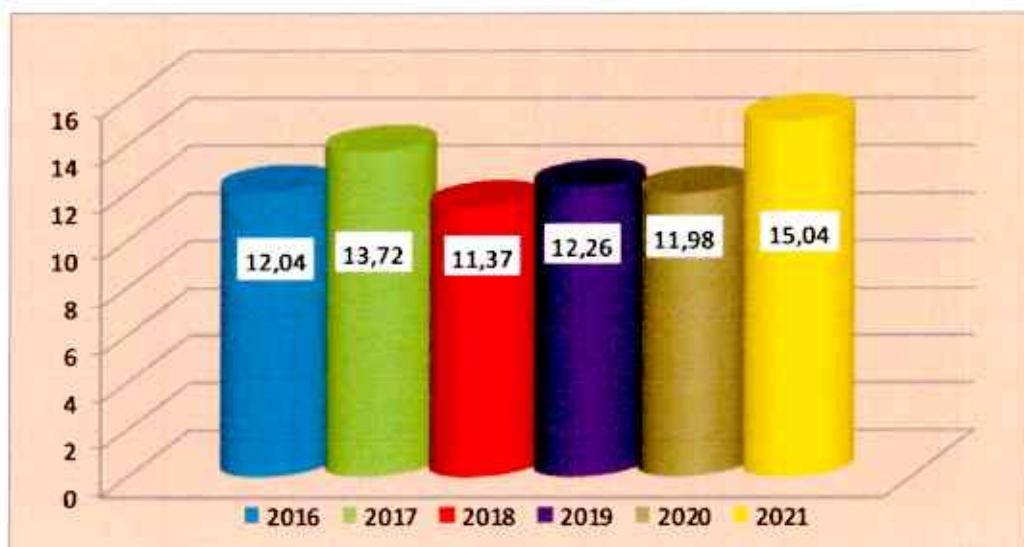
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Rasio kemandirian keuangan daerah	%	12,26	9,38	15,04	160,34	9,48	158,65	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			160,34			158,65		

Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan besar kecilnya pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (bantuan pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin rendah rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.

Tahun 2021 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara dari target 9,38, % dapat terealisasi 15,04% atau tercapai 160,34%. sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai 158,65%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Grafik 3.27
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016-2021**



Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Banjarnegara



Dilihat *trend* selama lima tahun cenderung fluktuatif, dimana realisasi pada tahun 2019 sebesar 12,26% menjadi 11,98 % tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,28%. kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 15,04% atau mengalami kenaikan sebesar 3,06%.

Formulasi pengukuran indikator ini adalah dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah. Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu dari target 9,38% atau sebesar Rp. 295.321.105.282,- mampu direalisasikan sebesar 15,04 % atau Rp. 313.782.512.197,- dan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.086.319.894.926,862. Apabila target dan realisasi PAD tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi kenaikan sebesar 3,06 %, dimana pada tahun 2020 target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 236.446.681.466,- terealisasi sebesar Rp. 238.651.037.812,- dan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.994.352.744.689,-.

Pada tahun 2021 persentase rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 15,04% mengalami peningkatan dari tahun 2020 (11,96%) sebesar 3,06%. Hal ini karena realisasi PAD tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 75.131.474.385,-. Kenaikan tersebut didominasi oleh kenaikan PAD dari sumber lain-lain PAD yang sah.

Kenaikan PAD ini mengindikasikan bahwa daerah telah dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik. Namun demikian, persentase rasio kemandirian keuangan daerah apabila dibandingkan dengan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat rendah yaitu 0-25%, yang artinya bahwa pemerintah pusat masih dominan pada keuangan daerah.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Daerah sebesar Rp. 2.270.569.400,00 terealisasi sebesar Rp. 2.093.807.400,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 270.128.400,00 atau 10,41%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR



Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :**Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Mendasari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang.

Menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pasokan pangan dalam suatu negara hingga titik terkecil yaitu perorangan agar hidup dengan sehat maupun aktif berkelanjutan ke depannya.

Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan pada misi ke 5 pada sasaran strategis 1, yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan indikator Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Mengacu pada standar pola pangan harapan, pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok pangan meliputi : padi-padian, ubi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan kelompok lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumbar, mrice, pala, asam, bumbu masak, teh dan kopi.).

Menghitung total Skor Pola Pangan Harapan adalah jumlah dari 9 (sembilan) kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai kelompok lain-lain tersebut di atas.



Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan (Permenkes No 75 Tahun, 2013). Kebutuhan ideal masing-masing jenis makanan yang harus dikonsumsi per-orang/hari menurut Widya Karya Pangan dan Gizi Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.10
Susunan Pola Pangan Harapan Nasional *)**

No	Jenis makanan	% AKG (FAO RAPA)	Gram	Pola Pangan Harapan Nasional			
				Energi (k kalori)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	40 – 60	275	1075	50	0,5	25
2	Umbi-umbian	0 – 8	100	129	6	0,5	2,5
3	Pangan hewani	5 – 20	150	258	12	2	24
4	Minyak dan lemak	5 – 15	20	215	10	0,5	5
5	Buah biji berminyak	0 – 3	10	64	3	0,5	1
6	Kacang-kacangan	2 – 10	35	108	5	2,0	10
7	Gula	2 – 15	30	108	5	0,5	2,5
8	Sayur dan buah	3 – 8	250	129	6	5,0	30
9	Lain-lain	0 – 5	-	64	3	0,0	0
TOTAL				2150	100		100

Sumber : *) Harmonisasi PPH, Badan Ketahanan Pangan, 2015

Adapun pencapaian target dari indikator PPH Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Tar get	%	
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	91,6	>93	89	95,70	>95	93,68	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					95,70		93,68	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui capaian Skor PPH Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 ditargetkan >93 dapat direalisasikan sebesar 89 dengan capaian kinerja sebesar 95,7 %. Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2020, yaitu sebesar 2,6 %. Apabila realisasi Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian skor PPH baru mencapai 93,68 %.

Dibandingkan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Jawa Tengah tahun 2021, maka pencapaian skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi yaitu 89, sedangkan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Tengah



sebesar 86,7. Perhitungan skor pola pangan harapan Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.11
Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	1280,7	56,7	0,5	25
2	Umbi-umbian	78,1	3,46	0,5	1,5
3	Pangan hewani	206,5	9,15	2	17,2
4	Minyak dan lemak	241,5	10,7	0,5	5
5	Buah biji berminyak	40	1,77	0,5	0,2
6	Kacang-kacangan	76,7	3,39	2,0	9,2
7	Gula	125,7	5,57	0,5	2,0
8	Sayur dan buah	155,1	6,87	5,0	28,9
9	Lain-lain	52,4	2,32	0,0	0
	Total	2256,6	100		89,0

Sumber : Distankan KP Kab. Banjarnegara

Apabila indikator pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dibandingkan selama 6 (enam) tahun terakhir tahun 2016 - 2021, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12
Pencapaian Pola Pangan Harapan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016 – 2021**

No	Kelompok/Jenis Pangan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-Padian	25	19,6	21,7	25	25	25
2	Umbi-umbian	1,2	1	0,9	1,8	1,3	1,5
3	Pangan Hewani	19,9	24	23,4	19,2	20,4	17,2
4	Minyak dan Lemak	5	4,7	4,7	5	5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,6	0,8	0,8	0,9	0,5	0,2
6	Kacang-kacangan	10	10	10	7,1	7,0	9,2
7	Gula	0,8	1,2	1,3	2,5	2,4	2,0
8	Sayur dan Buah	27,4	24,3	23,1	30	30	28,9
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0
	Skor PPH	90	85,7	85,9	91,5	91,6	89,0

Sumber : Distankan dan KP Kab. Banjarnegara

Berdasarkan tabel diatas pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Banjarnegara pada tahun 2016 - 2021 menunjukan pencapaian yang fluktuatif.

Dari hasil analisis PPH diketahui bahwa kelompok pangan yang mencapai skor PPH maksimal adalah kelompok padi-padian, minyak/lemak, gula dan sayur/buah. Sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimal adalah kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, biji berminyak, dan kacang-kacangan. Upaya



diversifikasi pangan perlu ditingkatkan sehingga penganekaragaman pangan dapat terwujud. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat masih belum beragam dan bergizi seimbang. Kontribusi energi terbesar berasal dari konsumsi padi-padian (beras, jagung, gandum dan olahannya).

Sedangkan konsumsi masyarakat yang masih rendah pada umbi-umbian. Sehingga perlu ada upaya meningkatkan konsumsi sumber energi yang berasal dari umbi-umbian pangan lokal dan menurunkan konsumsi sumber energi dari beras.

Kontribusi protein terbesar berasal dari konsumsi padi-padian (protein nabati). Bioavailibilitas protein nabati hanya sekitar 30% dari total protein yang dikonsumsi, sehingga perlu peningkatan konsumsi protein dari hewani (daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, susu dan olahannya), agar tubuh mendapatkan asupan protein yang dapat diserap dengan baik.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan skor PPH masyarakat Banjarnegara adalah :

1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan melibatkan lintas sektor terkait terutama Dinas Kesehatan, Disdikpora, TPPKK dan Organisasi Masyarakat.
2. Meningkatkan diversifikasi pangan dengan cara pengembangan pangan lokal
3. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Menyusun kebijakan yang mendukung ketahanan pangan
6. Perkuat kerjasama yang efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan kemandirian bidang pangan dan gizi.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan sebesar Rp. 404.484.180,00 terealisasi sebesar Rp. 311.968.380,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 92.515.800,00 atau 22,87%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sasaran 2 :**Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni**

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Demikian halnya di Kabupaten Banjarnegara



pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dari perencanaan pembangunan. Salah satu sasaran strategis RPJMD adalah meningkatnya cakupan rumah layak huni dengan indikator persentase MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang menghuni rumah layak huni.

Adapun capaian indikator tersebut pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

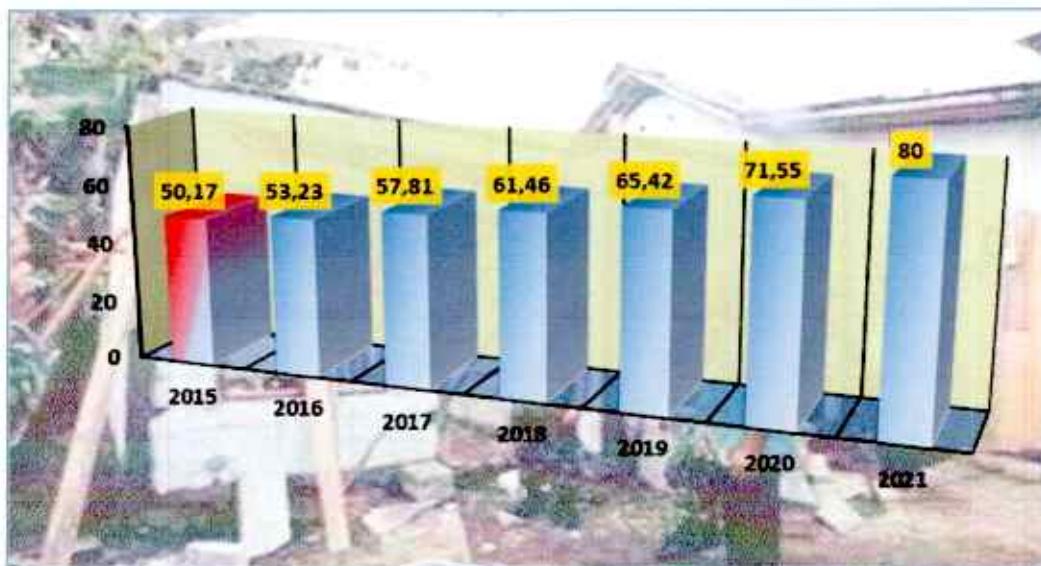
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	71,55	89±1	80	89,87	90	88,89	Tinggi
Rata-rata Capaian			89,87			88,89		

Berdasarkan tabel diatas realisasi indikator kinerja Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari target $89\pm1\%$ terealisasi 80% atau hanya tercapai sebesar 89,87%. Apabila realisasi indikator kinerja Presentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka ada peningkatan sebesar 8,45 %, dimana pada tahun 2020 realisasi dari indikator ini sebesar 71,55%. Adapun capaian indikator kinerja Presentase MBR yang Menghuni Rumah Layak Huni tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian tahun 2022 baru mencapai 88,89%.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kategori pendapatan pada kelompok desil I sampai IV sesuai data BDT Tahun 2015 sebanyak 106.197 Rumah Tangga. Rumah tangga tersebut menempati rumah baik yang layak huni maupun tidak layak huni. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut data BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2015 sejumlah 52.921 unit dan jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 53.276 unit. Dengan demikian, rasio MBR yang menghuni Rumah Layak Huni sesuai data BDT (Basis Data Terpadu) tahun 2015 adalah 50,17%.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.28
Persentase MBR Yang Menghuni Rumah Layak Huni
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2021



Sumber Data : DPKPLH Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (*trend*) meningkat dari 2015 sampai dengan 2021. Sampai dengan tahun 2021, MBR yang menghuni rumah layak huni sejumlah 84.958 dari 106.197 rumah tangga dalam kategori MBR. Adapun perkembangan pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan rumah layak huni dengan indikator persentase MBR yang menghuni rumah layak huni sebagai berikut

Tabel 3.13
Pencapaian Indikator Prosentase MBR Yang Menghuni Rumah Layak Huni
Tahun 2015 -2021

Tahun	MBR yang menghuni RTLH	MBR yang menghuni RLH	Persentase
2015*	52.921	53.276	50,17
2016	49.666	56.531	53,23
2017	43.956	61.389	57,81
2018	41.157	65.270	61,46
2019	36.950	69.477	65,42
2020	34.249	71.538	71,55
2021	21.239	84.958	80

*) MBR Tahun 2015 sejumlah 106.197

Peningkatan capaian MBR yang menghuni RLH didukung oleh anggaran yang bersumber dari DAK, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBDesa maupun anggaran



CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari Perusahaan, Perbankan, Baznas, Komunitas dan Perorangan.

Tabel 3.14
Realisasi Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Banjarnegara
Dari Berbagai Sumber Anggaran Tahun 2021

NO	SUMBER DANA	REALISASI
1	APBD KABUPATEN	171
2	APBD PROVINSI	408
3	DANA ALOKASI KHUSUS	135
4	APBN/BSPS	1.523
5	APBDesa	25
6	CSR	268
	Jumlah Total	2.530

Sumber data : DPKPLH Kabupaten Banjarnegara

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni sebesar Rp. 223.881.400,00 terealisasi sebesar Rp. 177.786.100,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 46.095.300,00 atau 20,59%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Kawasan Pemukiman.

Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang ditempuh penduduk pada rentang usia >25 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kendala-kendala yang dihadapi dan program pembangunan di bidang pendidikan. Nilai rata-rata lama sekolah yang besar menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka pengetahuan dan kualitas penduduk akan meningkat.

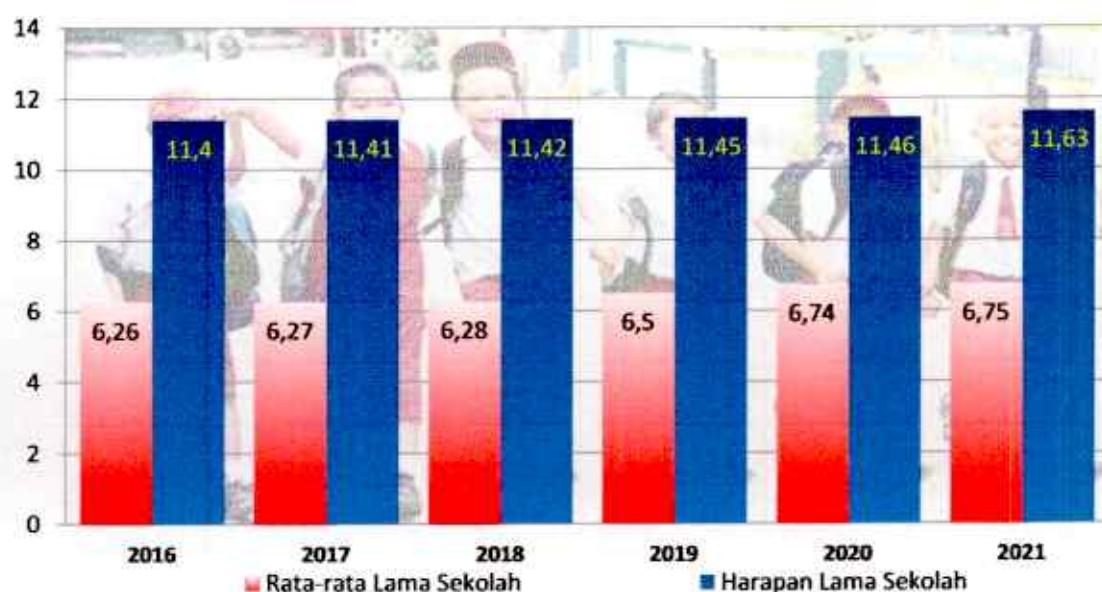
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,74	6,57 s.d 6,65	6,75	101,56	6,65 s/d 6,72	100,44	Sangat Tinggi
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,8 ± 0,2	11,63	98,56	11,9±0,2	97,73	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100,06			99,085	

Pada tahun 2021, indikator kinerja Angka Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 6,57 sampai dengan 6,65 tahun dan dapat direalisasikan sebesar 6,75 tahun atau target telah terpenuhi. Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka mengalami kenaikan sebesar 0,01 %. Hal ini diartikan bahwa rata rata penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang usia 25 tahun ke atas baru bisa mengenyam pendidikan setara dengan jenjang SMP kelas satu semester satu. Apabila realisasi tahun 2021 dibandingkan dengan akhir RPJMD, maka realisasi tahun 2021 telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2022.

Grafik berikut ini akan menyajikan data Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 3.29
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Jawa Tengah

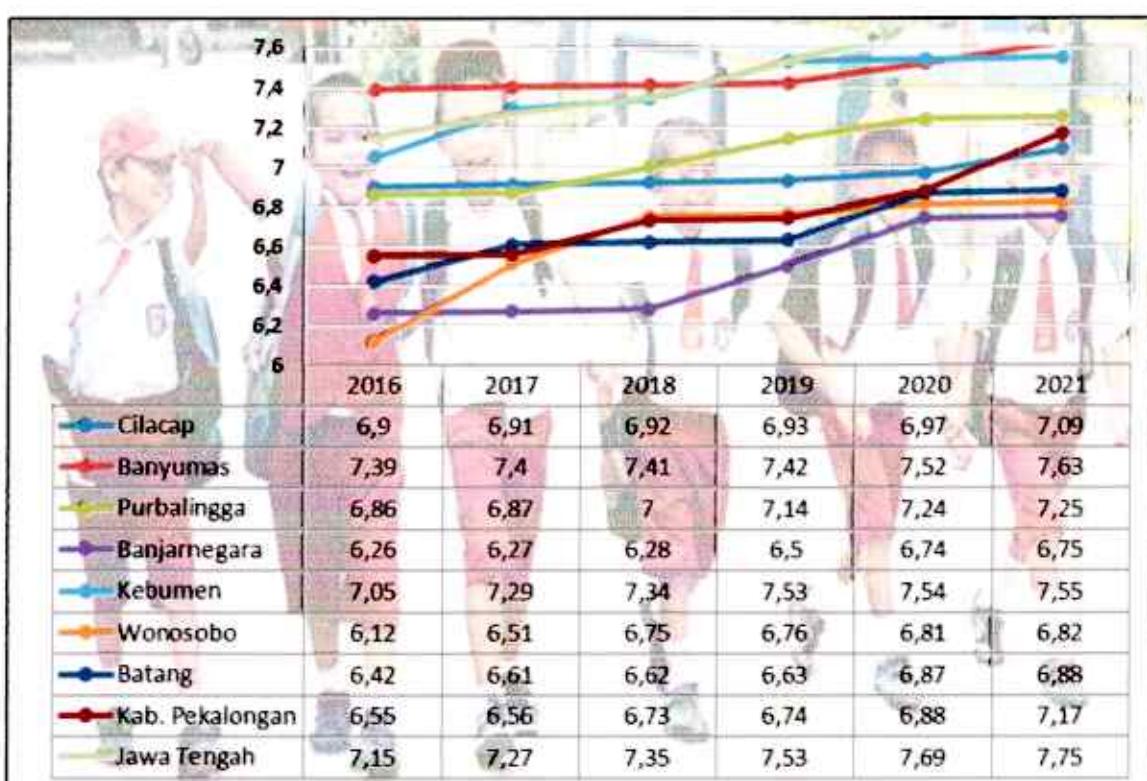
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa rata – rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selama enam tahun

terakhir atau 2016 sampai dengan 2021 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 0,49 tahun atau rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan kinerja dan usaha yang konsisten dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan lama sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Apabila realisasi indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Tengah, maka realisasi indikator ini lebih rendah 1 tahun, dimana capaian realisasi indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 7,75. Sedangkan Perbandingan data capaian Kabupaten/Kota yang ada di eks Karisidenan Banyumas dan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara dapat disajikan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3.30

Perbandingan Posisi Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten di Eks Karisidenan Banyumas, yang Berbatasan Langsung dengan Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2021



Sumber Data : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Angka Rata-rata Sekolah Kabupaten Banjarnegara masih berada dibawah Kabupaten yang berada di Eks Karisidenan Banyumas dan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara serta provinsi Jawa Tengah.

Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :



- 1) Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan.
- 2) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau faktor kemiskinan yang menyebabkan masyarakat lebih mementingkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dibandingkan dengan sekolah.
- 3) Adanya budaya pada sebagian masyarakat yang menanggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, sehingga menikah pada usia dini.
- 4) Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan menangani jenjang pendidikan SMP (usia 13 s.d. 15 tahun) adapun penduduk usia 16 tahun keatas merupakan usia pada jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan pada urusan Pendidikan Dasar (jenjang SD dan SMP) dimana batasan usia adalah 7-15 Tahun.

Ketercapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2021 tidak lepas dari peranan Pendidikan kesetaraan yang semakin baik, yaitu dengan mendorong penduduk usia diatas 25 tahun untuk menempuh jalur Pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C). Selain itu, pendidikan vokasi melalui program keaksaraan dan kewirausahaan desa juga diarahkan agar masyarakat bisa mengenyam Pendidikan yang dipadukan dengan ketrampilan kerja/*life skill*. Dalam rangka mendukung ketercapaian RLS di Kabupaten Banjarnegara, kebutuhan fasilitas pendidikan formal secara bertahap tiap tahunnya telah dipenuhi. Di samping itu, berbagai program pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara turut berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi penerus terutama anak-anak untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dirasakan sangat membantu siswa dalam hal pembiayaan pendidikan utamanya pendidikan formal, karena dengan adanya program tersebut siswa terutama dari sekolah negeri dibebaskan dari biaya bulanan sekolah. Disamping itu, Program Indonesia Pintar (PIP) yang juga merupakan program pemerintah secara nasional maupun Beasiswa Siswa Miskin (BSM) yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah juga telah berperan dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikannya terutama pada pendidikan formal sehingga dapat terhindar dari putus sekolah. Sasaran PIP ditujukan untuk membantu kebutuhan pribadi siswa dalam menunjang kegiatan sekolah antara lain untuk pembelian seragam sekolah, sepatu sekolah dan biaya transportasi sekolah.

Selain hal tersebut, Program Pendidikan Nonformal/Kesetaraan merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah. Dengan pemberdayaan satuan Pendidikan luar sekolah melalui Pendidikan kesetaraan, masyarakat usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan mengengah kita fasilitasi dengan Pendidikan kesetaraan, yaitu melalui penyelenggaraan pembelajaran pada Kelompok Belajar (Pokjar) Paket A setara SD, Paket



B setara SMP, Paket C setara SMA. Gerakan ayo belajar untuk semua umur yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah. Selain hal tersebut masih perlu di tingkatkan upaya gotong royong untuk memotivasi agar anak-anak usia sekolah kembali sekolah dengan Gerakan Ayo Sekolah.



Kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran perlu ditingkatkan sehingga siswa akan tertarik untuk belajar di sekolah, selain itu sarana dan prasarana tercukupi sehingga akan mendukung pembelajaran yang menarik.

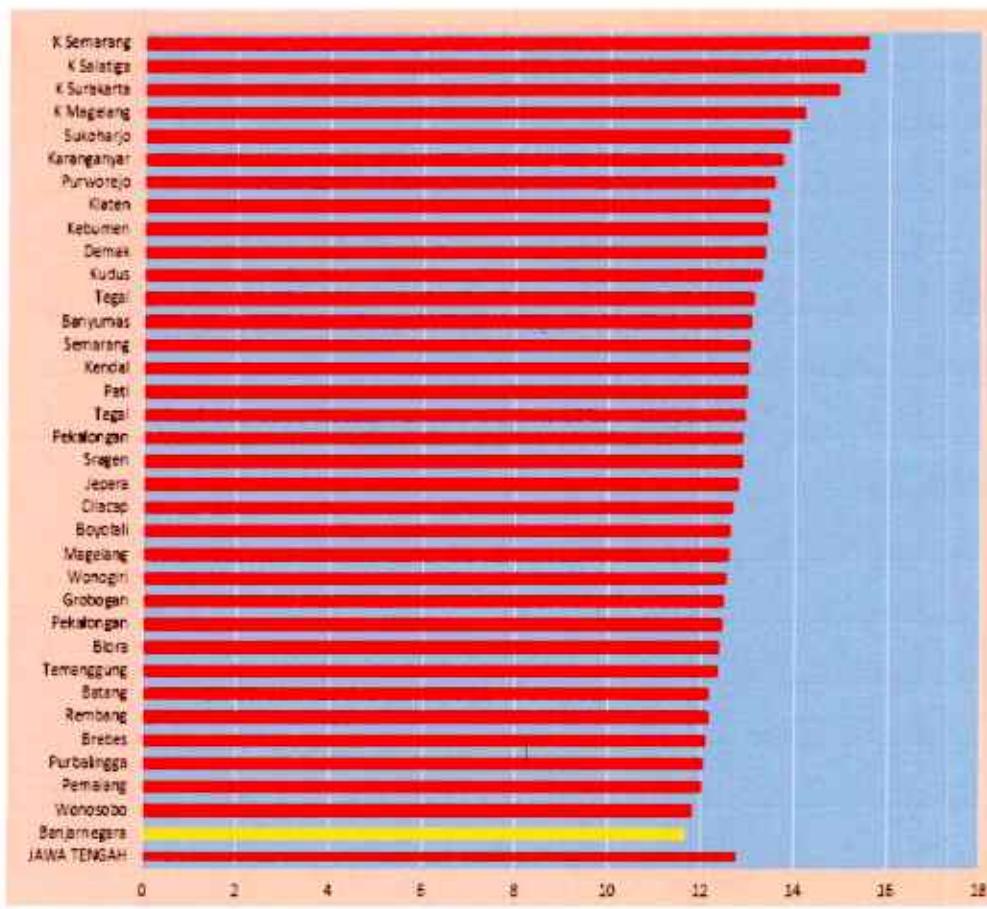
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 adalah sebesar 11,63 tahun atau mencapai 98,56 % dari target $11,8 \pm 0,2$. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 11,63 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA kelas 2 semester I.

Intervensi kebijakan pembangunan pendidikan pada sekarang ini akan dapat berpengaruh pada angka capaian HLS. Hasil dari capaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sejak Tahun 2016, HLS penduduk Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan sebesar 0,05 tahun dari 11,40 tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,46 tahun 2020. Capaian realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, maka capaian Kabupaten Banjarnegara masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah, yaitu 12,7 tahun masih terdapat selisih 1,24 tahun.

Dengan adanya pandemi *covid-19* sejak tahun 2021, banyak anak sekolah yang keluar (*drop out*) dan banyak yang tidak bersekolah, karena takut tertular virus *covid-19* sehingga adanya kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara *daring*. Adapun kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran dari rumah peserta didik tidak bisa belajar secara maksimal dikarenakan berbagai hambatan, misalkan daerah-daerah pegunungan yang kurang maksimal penerimaan sinyal internet, anak diajak serta orang tuanya merantau karena dirumah tidak ada yang mengawasi. Maka faktor adanya pandemi *Covid-19* yang mulai merebak tahun 2020 dan berlanjut tahun 2021 sangat mempengaruhi capaian indikator ini pada tahun 2021.

Apabila dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara menempati posisi terendah pada ketercapaian indikator HLS seperti terlihat dari grafik berikut.

Grafik 3.31
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari grafik diatas diketahui bahwa dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara menempati posisi paling akhir.

Masih rendahnya HLS di Kabupaten Banjarnegara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Belum meratanya jumlah layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK).
- 2) Biaya operasional siswa yang relatif tinggi (transport menuju ke sekolah) sebagai imbas belum terpenuhinya jumlah layanan pendidikan menengah.

Strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah :

- 1) Model pendidikan berbasis masyarakat dengan berbagai pendekatan antara lain pendekatan kewilayahan, potensi lokal serta nilai budaya dan tradisi melalui program kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga non formal/PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).



- 2) Menjamin operasional pendidikan terhadap siswa rawan putus sekolah dalam bentuk beasiswa.
- 3) Pemenuhan daya tampung siswa khususnya jenjang pendidikan menengah melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB).

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan sebesar Rp. 181.046.392.408,00 terealisasi sebesar Rp. 177.786.100,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 176.892.965.451,00 atau 2,29%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

1. Program pengelolaan Pendidikan.
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Angka usia harapan hidup	Tahun	74,18	74,01	74,28	100,36	74,08	100,26	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					100,36		100,26	

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam perumusannya idealnya usia harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Spesific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun – tahun.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk.

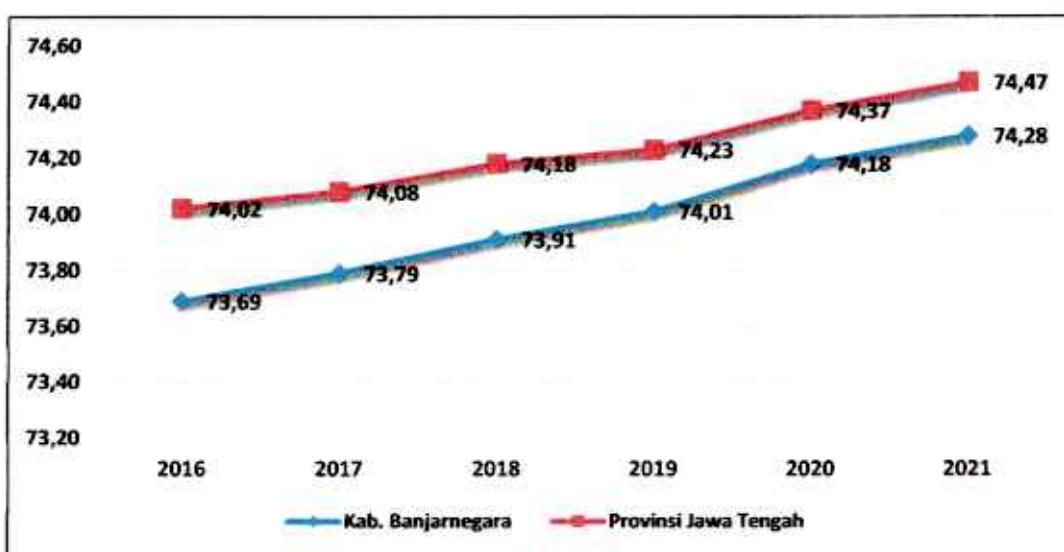
Target Usia Harapan Hidup masyarakat Banjarnegara pada tahun 2021 adalah 74,01 tahun terealisasi 74,28 tahun atau tercapai 100,36%, dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai dengan rata-rata 100,26%. Realisasi

pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,1, yaitu dari 74,18 tahun 2020 menjadi 74,28 tahun 2021.

Selama lima tahun terakhir (2016 – 2021), Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara menunjukkan *trend* peningkatan yaitu 73,69. Tahun pada tahun 2016 sampai dengan 74,28 pada tahun 2021 dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,118. Jika dibandingkan pada capaian Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Banjarnegara menduduki urutan ke-25. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa tahun 2021 maka terpaut 0,19, dimana capaian tingkat provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara.

Ketercapaian indikator Usia Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 3.32
Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 – 2021



Sumbe Datar : BPS Provinsi Jawa Tengah

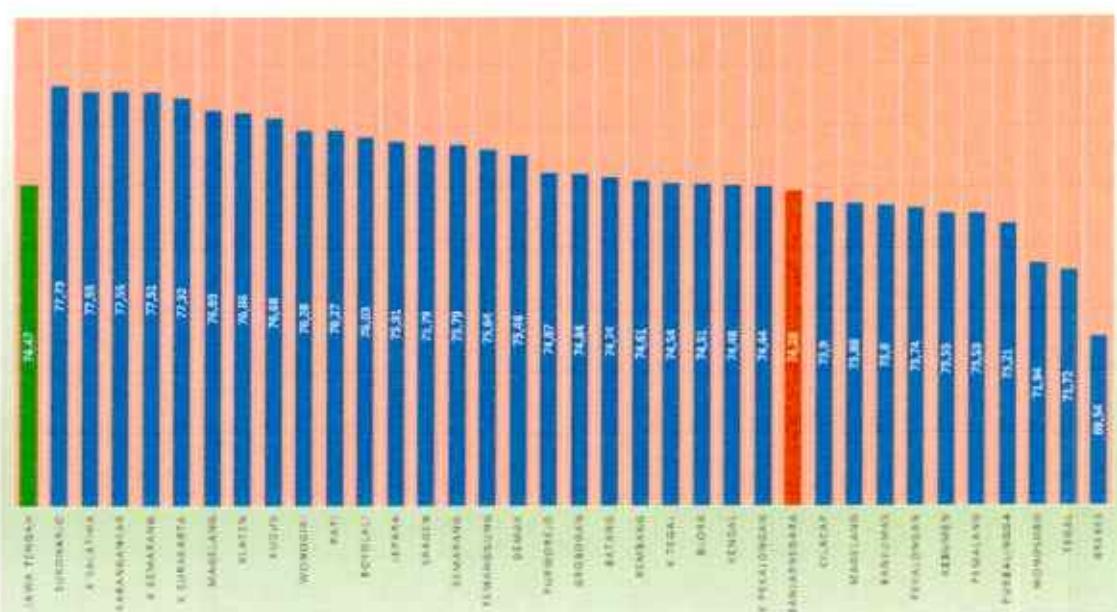
Faktor yang mempengaruhi pencapaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara, yaitu melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar, dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari upaya dalam menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat, upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), upaya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.



Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup, yaitu program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program peningkatan pelayanan dan sumber daya kesehatan.

Berikut ini disajikan perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Grafik 3.34
Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 119.568.009.079,00 terealisasi sebesar Rp. 88.455.473.859,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 31.112.535.220,00 atau 26,02%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 3. Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Jumlah Penduduk diatas Garis Kemiskinan

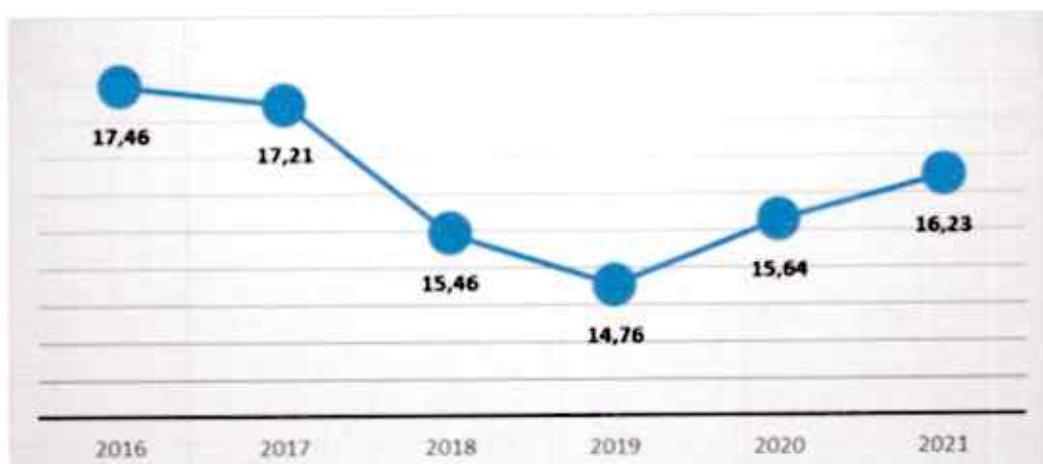
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase penduduk miskin	%	15,64	15,2 s.d 14,6	16,23	93,22	14,6	88,83	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian			93,22			88,83		

Angka Kemiskinan, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 15,2 s/d 14,6 persen dan terealisasi sebesar 15,23 % atau tercapai sebesar 93,22%. Ralisasi tahun 2021 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 0,59% atau sejumlah 5,240 jiwa, dimana pada tahun 2020 tercatat penduduk miskin sejumlah 144.950 jiwa atau 15,64%, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sejumlah 150.190 jiwa atau 16,23%.

Perkembangan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir 2016-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.34
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021**

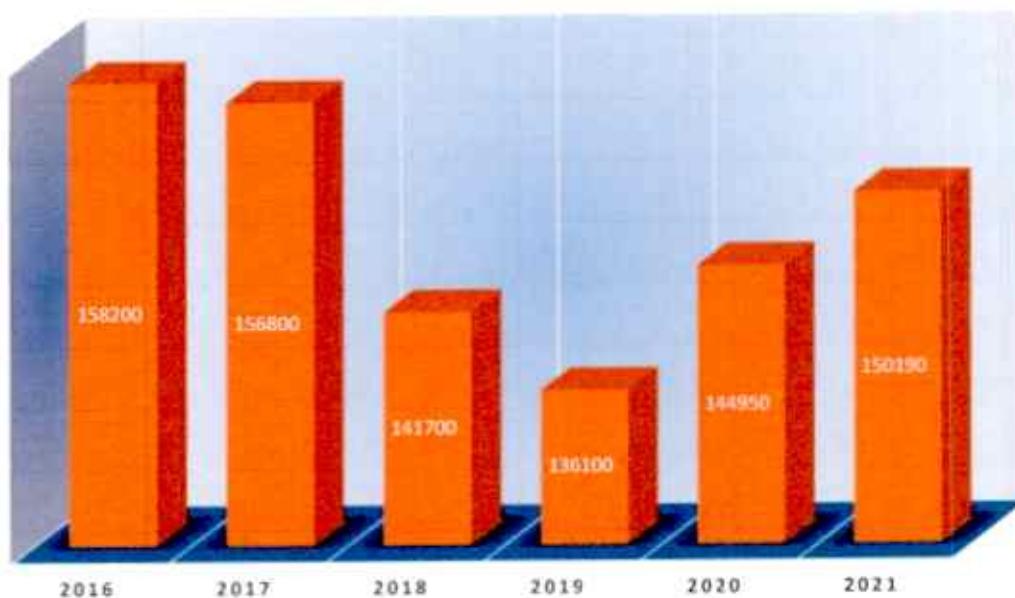


Sumber Data : BPS Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan *trend* menurun rata-rata

sebesar 0,90/tahun. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase kemiskinan yang signifikan yaitu sebesar 0,88%, kemudian tahun 2021 naik menjadi 16,23%. Kenaikan ini terjadi salah satu faktornya adalah karena dampak pandemi covid-19. Kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 berdampak langsung pada sektor ekonomi dan sosial di masyarakat, dimana terjadi penurunan pendapatan masyarakat karena adanya pembatasan akses dalam skala besar yang mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami penurunan penghasilan bahkan kehilangan pekerjaan. Adapun jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.36
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016 - 2021

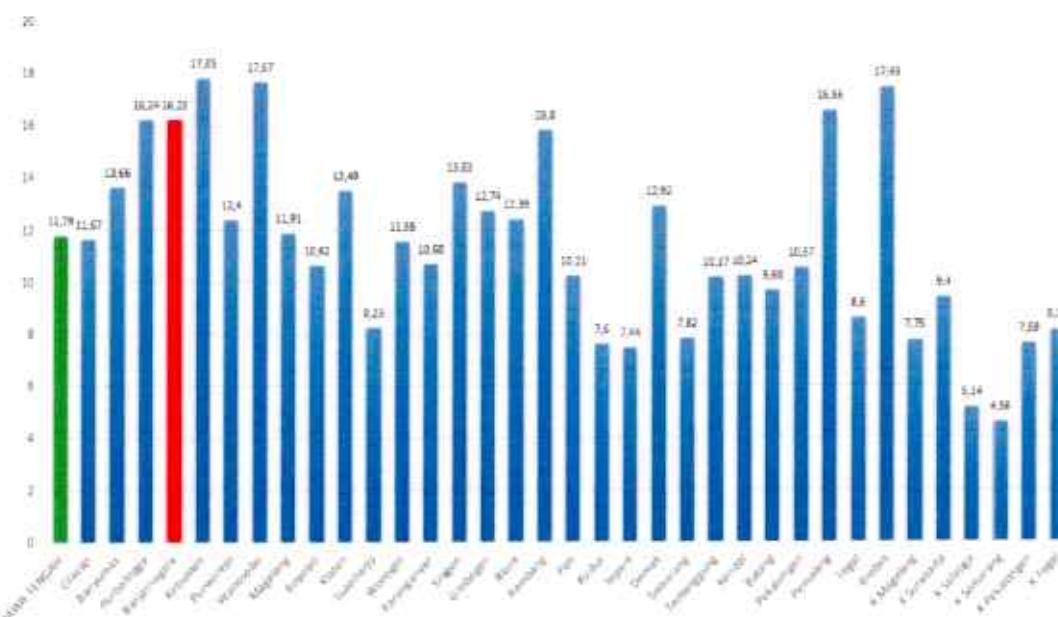


Sumber data : BPS Jawa Tengah

Capaian penurunan angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara di bandingkan dengan Kabupaten / Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah, berada di ranking 30 tahun 2019. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Kabupaten di eks Karsidenan Banyumas dan daerah yang berbatasan langsung, maka Kabupaten Banjarnegara berada di atas Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Purbalingga.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.37
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
Tahun 2021





Banjarnegara melakukan identifikasi anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, CSR, maupun dari masyarakat dalam hal ini BAZ. Dana-dana tersebut digolongkan kedalam 4 strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Melakukan sinergitas kebijakan dan program yang mendukung pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan memadukan seluruh program menjadi titik penting dalam penurunan angka kemiskinan. Terdapat satu hal yang mungkin bisa dilakukan yaitu memperbaiki proporsi anggaran pada strategi 2 dan strategi 3 agar akselerasi penurunan semakin baik.

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Penduduk diatas Garis Kemiskinan sebesar Rp. 742.682.400,00 terealisasi sebesar Rp. 661.254.486,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 81.427.914,00 atau 10,96%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Program Rehabilitasi Sosial

Sasaran 6 :**Meningkatnya Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase Penurunan PMKS	%	6	-0,2	7,55	-35,75	-0,2	-35,75	Sangat Rendah
Rata-Rata Capaian					-35,75		-35,75	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi : Anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum (ANH), anak jalanan, anak



dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, komoditas adat terpencil.

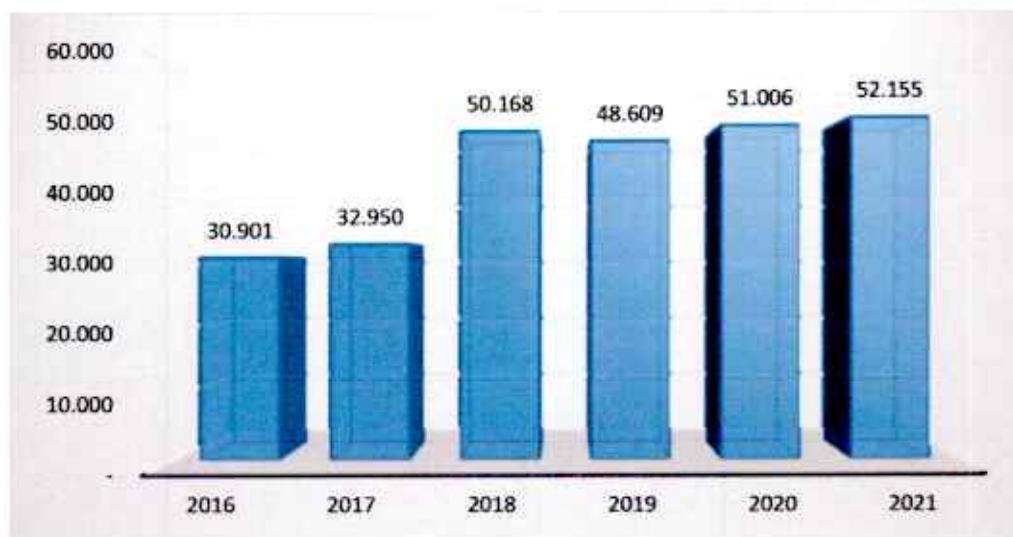
Penurunan PMKS tahun 2020 ditargetkan sebesar 0,2 % dari 90.809 jiwa, terealisasi sebesar -7,75% atau meningkat sebesar 6.862 PMKS menjadi 97.671 PMKS. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2021 tidak terjadi penurunan PMKS melainkan terjadi penambahan atau peningkatan PMKS. Dari jumlah penambahan sebesar 6.862 PMKS tersebut jenis PMKS yang paling besar dalam penambahan PMKS adalah fakir miskin dan korban bencana.

Peningkatan jumlah fakir miskin yang sangat signifikan pada tahun 2021 salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi *covid-19*. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada awal tahun 2020 yang sangat cepat menyebabkan kematian di beberapa daerah di Indonesia dan negara-negara lain. Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai Bencana Nasional (bencana non alam) *covid-19* dan berupaya melakukan pencegahan penyebaran *covid-19* dengan memberlakukan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pencegahan penyebaran *covid-19* yang salah satunya adalah pembatasan pergerakan masyarakat mengakibatkan ekonomi masyarakat menjadi melambat. Keadaan ini juga berimbas pada pendapatan masyarakat yang semakin berkurang dan akibat bidang sosial adalah semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Dimana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara menjadi 16,23%, sedangkan jumlah masyarakat yang terdampak dari penyebaran *covid-19* melalui Bantuan Langsung Tunai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar 16.658 yang merupakan masyarakat dari golongan 1-4 dari tingkat kesejahteraan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kenaikan setiap tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik. 3.37
Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara

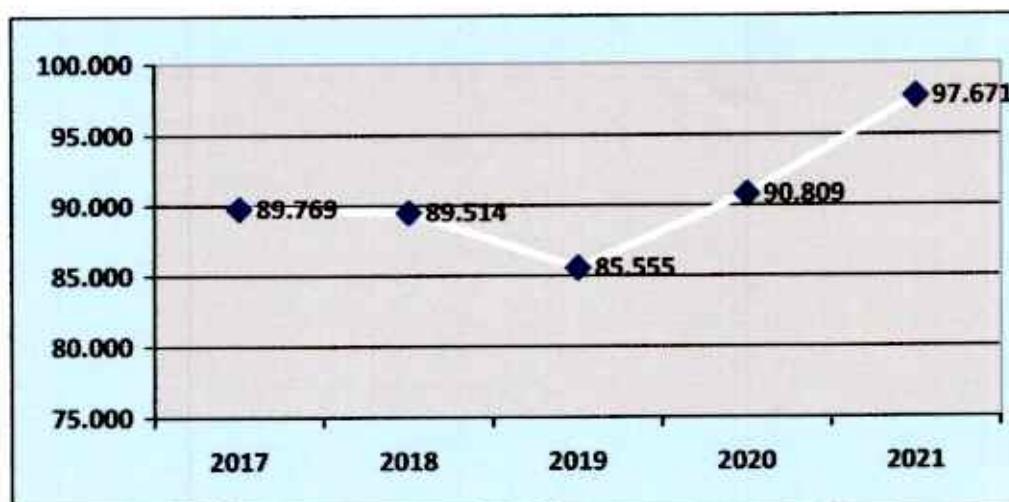
Penanganan PMKS di Kabupaten Banjarnegara, dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, yaitu sudah melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berpengaruh pada penurunan jumlah PMKS. Masyarakat baik secara perseorangan, lembaga atau komunitas turut serta melakukan penanganan PMKS. Penanganan berupa pendampingan, pemberian informasi atau akses yang digunakan oleh PMKS atau berupa bantuan langsung kepada PMKS.

Semakin meningkatnya kemampuan manajerial lembaga lembaga kesejahteraan sosial serta meningkatnya kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluhan Sosial, Pekerja Sosial Perlindungan anak, TAGANA (Taruna Siaga Bencana) juga mendorong penanganan kesejahteraan sosial semakin luas. Akses informasi dan edukasi bagi PMKS juga akan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya.

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 penanganan PMKS sudah baik, dimana setiap tahunnya mengalami penurunan, tetapi di tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi covid-19 jumlah PMKS kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik. 3.38
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2021



Sumber Data : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 1.437.881.900,00 terealisasi sebesar Rp. 1.211.640.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 226.240.950,00 atau 15,96%. Sasaran Strategis ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

C. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Alokasi anggaran pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 835.815.881.747,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 749.520.842.228,- atau sebesar 89,68%, sedangkan rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 106,93%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarneagara tahun 2021 sangat efektif.

Capaian akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,82 % dari tahun 2020. Dimana pada tahun 2020 dari alokasi anggaran Rp. 856.923.398.836,- telah terealisasikan Rp. 809.812.168.969,- atau sebesar 94,50% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 85,2 % atau efektif. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II.



BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RPJMD 2017-2022 yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi, dilaksanakan melalui 12 (dua belas) tujuan dan 13 (tiga belas) indikator tujuan, 28 (dua puluh delapan) sasaran dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tahun 2021 tercapai 106,93 % atau dalam kategori “**Sangat Tinggi**”. Dari 12 (dua belas) tujuan yang diukur dengan 13 (tiga belas) indikator tujuan rata-rata tercapai 106,69 % atau dalam kategori ‘**Sangat Tinggi**’ dengan rincian 8 (delapan) indikator tercapai dengan hasil sangat tinggi, 4 (empat) indikator tercapai dengan hasil tinggi dan 1 (satu) indikator dengan hasil sangat rendah. Sementara rata-rata capaian dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran adalah sebesar 107,17% atau kategori ‘**Sangat Tinggi**’ dengan rincian 20 (dua puluh) indikator telah tercapai dengan hasil sangat tinggi, 5 (lima) indikator tercapai dengan hasil tinggi, 3 (tiga) indikator tercapai dengan hasil sedang dan 3 (tiga) indikator tercapai dengan kriteria sangat rendah.

Adapun indikator tujuan dengan kategori sangat rendah adalah indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian kinerja -24,44 %, sedangkan indikator sasaran dengan kategori sangat rendah adalah indikator Pertumbuhan Sektor Industri dengan capaian kinerja sebesar -27,71%, Indikator Pertumbuhan Sektor Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar -58,07% dan indikator presentase Penurunan PMKS dengan capaian kinerja -35,75%.

Pada dasarnya dengan merebaknya *Corona Virus Diasese 2019* pada sejak tahun 2020 sangat berdampak pada capaian kinerja indikator kinerja Tujuan dan Sasaran, karena kebijakan-kebijakan diterapkan secara nasional dalam rangka penanganan *Corona Virus Diasese 2019* berdampak langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran. Sehingga mengakibatkan capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran sangat rendah.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator dalam kategori sedang maupun sangat rendah, secara intensif dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Sektor Industri

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri adalah ada beberapa hal perlu dilakukan terutama berkaitan dengan kemudahan berusaha dan efisiensi dalam rantai nilai proses industri terutama dalam peningkatan daya saing produk manufaktur di era revolusi industri 4.0, atau di era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja



dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru.

2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Upaya pencapaian indikator pertumbuhan sektor perdagangan dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas ekonomi pada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor sebagai jenis usaha yang paling banyak dilakukan di Kabupaten Banjarnegara melalui pembangunan jejaring dan pemanfaatan teknologi. Selain itu aktivitas pada sektor lain juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.

a. Persentase Penurunan PMKS

Adapun Langkah-langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam meringankan beban masyarakat sebagai dampak dari pandemi virus *corona 19* adalah dengan melaksanakan program bantuan social yang pendanaannya berasal dari Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara. Adapun program bantuan sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST). BST terbagi dari 3 (tiga) yaitu BST Kementerian, JPS Provinsi Jawa Tengah dan BST Kabupaten. Untuk BST, sasaran masuk dalam Basis Data Kemiskinan dan tidak menerima program PKH maupun BPNT. Jumlah KPM penerima BST Kementerian Sosial yaitu sebanyak 30.810 KPM dengan jumlah bantuan Rp.300.000 per bulan. Untuk JPS provinsi mendapatkan Rp.200.000 per bulan dengan jumlah KPM 5.567 untuk BST Kabupaten, jumlah KPM penerima sebanyak 65.075 dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 300.000 per bulan.

Pencapaian target kinerja dari 28 Sasaran Strategis 2017-2022 untuk tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 835.815.881.747,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 749.520.842.228,- atau sebesar 89,68%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 86.295.038.519,- data per 31 Desember 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Banjarnegara, Maret 2022

PLH. BUPATI BANJARNEGARA

WAKIL BUPATI





BUPATI BANJARNEGARA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDHI SARWONO
Jabatan : Bupati Banjarnegara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Banjarnegara, 2021

BUPATI BANJARNEGARA



BUDHI SARWONO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIRI, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	78,75
2.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	41,05
3.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka	68,68
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%	0
5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	68,75

MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	79
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan desa berkembang	%	3

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	71 s.d. 73
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luasan Sawah yang teralir jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	17.003
3.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian Nilai Tukar Petani (umum)	%	2,7 s.d. 3,7 103 s.d. 104
4.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3
5.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB Persentase koperasi sehat	%	13 s.d. 14 37 s.d. 38
6.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	15 s.d. 17,5
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 4,6
8.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%	7 s.d. 8
9.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	8,3 s.d. 9
10.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	3 ± 1
11.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	0,44



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFektif, Efisien, Produktif, Transparan dan Akuntabel dengan Tenaga Profesional”

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP
2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,38

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTARATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHIAN HAK DASAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	> 93
2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	89 ± 1
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,57 s.d. 6,65
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,8 ± 0,2
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,01
5.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	15,2 s.d. 14,6



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
6.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	0,2

Jumlah Anggaran

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.079.942.021.032,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.841.176.227,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.191.689.955,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	191.880.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.236.633.500,00	APBD
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.452.900,00	APBD
7.	Program Pengelolaan Pendidikan	169.601.569.935,00	APBD
8.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.995.604.700,00	APBD
9.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	12.875.000,00	APBD
10.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	175.851.100,00	APBD
11.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.656.209.700,00	APBD
12.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100.000.000,00	APBD
13.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.853.996.863,00	APBD
14.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.539.100,00	APBD
15.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	567.135.100,00	APBD
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	477.903.200,00	APBD
17.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	35.732.808.000,00	APBD
18.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	26.311.902.000,00	APBD
19.	Program Penataan Bangunan Gedung	1.614.325.000,00	APBD
20.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100.000.000,00	APBD
21.	Program Penyelenggaraan Jalan	190.096.194.000,00	APBD
22.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	482.448.000,00	APBD
23.	Program Pengejolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.981.812.500,00	APBD



No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
24.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.290.958.000,00	APBD
25.	Program Pengembangan Permukiman	1.427.460.900,00	APBD
26.	Program Pengembangan Perumahan	2.644.919.500,00	APBD
27.	Program Kawasan Permukiman	5.637.730.900,00	APBD
28.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	171.616.600,00	APBD
29.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	215.572.900,00	APBD
30.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	721.138.600,00	APBD
31.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.386.400,00	APBD
32.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	22.063.900,00	APBD
33.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	34.750.300,00	APBD
34.	Program Pengelolaan Sampah	3.466.194.900,00	APBD
35.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	328.942.100,00	APBD
36.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyeleman Non Kebakaran	20.454.800,00	APBD
37.	Program Penanggulangan Bencana	1.307.857.000,00	APBD
38.	Program Pemberdayaan Sosial	1.505.276.500,00	APBD
39.	Program Rehabilitasi Sosial	1.449.845.800,00	APBD
40.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	418.885.500,00	APBD
41.	Program Penanganan Bencana	400.141.700,00	APBD
42.	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	107.335.800,00	APBD
43.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	178.275.000,00	APBD
44.	Program Perlindungan Perempuan	36.615.300,00	APBD
45.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	98.390.000,00	APBD
46.	Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	54.302.500,00	APBD
47.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	55.357.500,00	APBD
48.	Program Perlindungan Khusus Anak	40.334.700,00	APBD
49.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	165.185.000,00	APBD
50.	Program Penempatan Tenaga Kerja	16.111.600,00	APBD
51.	Program Hubungan Industrial	113.186.000,00	APBD
52.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.000.000,00	APBD
53.	Program Pelayanan Penanaman Modal	81.170.000,00	APBD
54.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	429.462.000,00	APBD
55.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulian dan Kemandirian Pangan	150.000.000,00	APBD
56.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	492.296.680,00	APBD
57.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	88.148.500,00	APBD



No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
58.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	69.730.000,00	APBD
59.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.597.951.400,00	APBD
60.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	65.879.900,00	APBD
61.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42.957.000,00	APBD
62.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.509.954.600,00	APBD
63.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.500.135.100,00	APBD
64.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	165.748.900,00	APBD
65.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	211.245.300,00	APBD
66.	Program Penyuluhan Pertanian	2.389.449.000,00	APBD
67.	Program Penatagunaan Tanah	5.000.000,00	APBD
68.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	393.133.606.500,00	APBD
69.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.873.799.750,00	APBD
70.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.507.163.700,00	APBD
71.	Program Pendaftaran Penduduk	1.562.284.100,00	APBD
72.	Program Pencatatan Sipil	224.166.500,00	APBD
73.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	232.369.000,00	APBD
74.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.151.489.000,00	APBD
75.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	46.185.000,00	APBD
76.	Program Pengembangan Ekspor	17.529.200,00	APBD
77.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	65.748.750,00	APBD
78.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	339.083.100,00	APBD
79.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	103.061.300,00	APBD
80.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	39.515.000,00	APBD
81.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	16.526.700,00	APBD
82.	Program Penataan Desa	75.000.000,00	APBD
83.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	45.500.000,00	APBD
84.	Program Administrasi Pemerintah Desa	4.230.178.740,00	APBD
85.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	188.050.000,00	APBD
86.	Program Pengendalian Penduduk	1.380.400.000,00	APBD
87.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.859.708.000,00	APBD
88.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejakteria (KS)	971.200.000,00	APBD
89.	Program Penyalenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.777.440.500,00	APBD
90.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.601.636.100,00	APBD



No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
91.	Program Aplikasi Informatika	2.518.180.700,00	APBD
92.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	182.132.000,00	APBD
93.	Program Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	230.740.200,00	APBD
94.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8.515.000,00	APBD
95.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	22.886.700,00	APBD
96.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	16.567.600,00	APBD
97.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	214.350.000,00	APBD
98.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	189.012.200,00	APBD
99.	Program Pengembangan UMKM	85.000.000,00	APBD
100.	Program Pengembangan Kebudayaan	697.950.000,00	APBD
101.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	19.830.000,00	APBD
102.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.546.557.428,00	APBD
103.	Program Pemasaran Pariwisata	227.390.000,00	APBD
104.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	51.678.500,00	APBD
105.	Program Pembinaan Perpustakaan	444.865.200,00	APBD
106.	Program Pengelolaan Arsip	292.579.000,00	APBD
107.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.355.186.500,00	APBD
108.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.603.718.800,00	APBD
109.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.375.091.700,00	APBD
110.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	150.001.100,00	APBD
111.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	927.212.500,00	APBD
112.	Program Penelitian dan Pengembangan	282.903.500,00	APBD
113.	Program Kepegawaian Daerah	1.482.702.800,00	APBD
114.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.718.600.000,00	APBD
115.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	357.175.000,00	APBD
116.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	206.707.900,00	APBD
117.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	32.017.400,00	APBD
118.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.633.458.000,00	APBD
119.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.396.845.000,00	APBD
120.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	96.959.800,00	APBD



No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
121.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	998.112.300,00	APBD
	JUMLAH	2.177.798.013.660,00	

BUPATI BANJARNEGARA





PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	78,75	70	88,89
2.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	41,05	38,97	94,93
3.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka	68,68	89,36	130
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%	0	76,15 (2019) 76,11 (2019)	100 100
5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	68,75	73,20*	106,47

*Tahun 2020



MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	79	82,56	100,31
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B	B*	100
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan desa berkembang	%	3	4,31	143,67

*Tahun 2020

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	71 s.d. 73	81,23	111,27
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luasan Sawah yang teralir jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	17.003	17.323	101,88
3.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,7 s.d. 3,7	3,06*	100
		Nilai Tukar Petani (umum)	%	103 s.d. 104	102,45	99,46
4.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3	13,92	464



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	13 s.d. 14	10,07*	77,46
		Persentase koperasi sehat	%	37 s.d. 38	27,55	74,46
6.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	15 s.d. 17,5	22,08	147,2
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 4,6	5,86	72,61
8.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%	7 s.d. 8	-1,94*	-27,71
9.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	8,3 s.d. 9	-4,82*	-58,07
10.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	3 ± 1	2,18	127,33
11.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	0,44	0,492*	88,18
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69	62,36	90,36

*Tahun 2020



MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KEOLAH KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL”

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP*	100
2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,38	15,04	160,34

*Tahun 2020

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	> 93	89	95,70
2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	89 ± 1	80	89,89
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,57 s.d 6,65	6,75	101,50
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,8 ± 0,2	11,63	98,56
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,01	74,28	100,36
5.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	15,2 s.d 14,6	16,23	88,84
6.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	-0,2	7,55	-35,75

**REALISASI ANGGARAN :**

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Non Program		14.384.078,00	100
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.811.813.780,00	3.791.641.338,00	99,47
3	Program Aplikasi Informatika	2.636.706.700,00	2.334.960.134,00	88,56
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.143.006.300,00	7.350.526.902,00	80,40
5	Program Hubungan Industrial	79.321.000,00	72.917.600,00	91,93
6	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.186.457.300,00	1.136.658.578,00	95,80
7	Program Kawasan Pemikiman	223.881.400,00	177.786.100,00	79,41
8	Program Kepegawaian Daerah	1.445.986.600,00	885.771.550,00	61,26
9	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.850.200,00	447.948.286,00	86,67
10	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	1.637.409.700,00	1.059.510.030,00	64,71
11	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	154.350.000,00	139.535.500,00	90,40
12	Program Pelayanan Penanaman Modal	9.560.000,00	8.820.300,00	92,26
13	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	18.455.000,00	18.455.000,00	100,00
14	Program Pemasaran Pariwisata	222.693.500,00	217.262.700,00	97,56
15	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.075.000,00	8.511.600,00	93,79
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	968.045.000,00	915.465.505,00	94,57
17	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10.950.000,00	9.800.000,00	89,50
18	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	159.130.000,00	156.464.700,00	98,33
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	803.452.200,00	535.410.100,00	66,64
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.414.800,00	9.413.500,00	70,17
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	168.224.600,00	146.224.600,00	86,92
22	Program Pemberdayaan Sosial	768.919.000,00	720.533.050,00	93,71
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	122.602.200,00	115.995.600,00	94,61
24	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	944.163.100,00	832.559.450,00	88,18



NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
25	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.261.400,00	961.400,00	76,22
26	Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	82.348.000,00	67.072.750,00	81,45
27	Program Pembinaan Keluarga Berencana	5.806.153.000,00	4.573.084.381,00	78,76
28	Program Pembinaan Perpustakaan	426.482.700,00	410.367.082,00	96,22
29	Program Pemenuhan Hak Anak	46.825.500,00	43.944.500,00	93,85
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.935.173.060,00	79.185.369.769,00	73,36
31	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	772.620.200,00	587.218.400,00	76,00
32	Program Penanganan Bencana	251.651.600,00	149.291.500,00	59,32
33	Program Penanganan Kerawanan Pangan	10.026.800,00	6.347.950,00	63,31
34	Program Penanggulangan Bencana	689.289.500,00	642.981.100,00	93,28
35	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	90.990.000,00	88.821.600,00	97,62
36	Program Penataan Bangunan Gedung	1.481.617.000,00	1.377.287.246,00	92,96
37	Program Penataan Desa	74.250.000,00	74.250.000,00	100
38	Program Penatagunaan Tanah	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60
39	Program Pencatatan Sipil	164.226.500,00	164.226.500,00	100
40	Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	14.202.300,00	14.202.300,00	100
41	Program Pendaftaran Penduduk	1.353.255.080,00	1.352.577.580,00	99,95
42	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.210.439.700,00	30.052.708.900,00	99,48
43	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	11.617.600,00	11.117.600,00	95,70
44	Program Pendidikan dan Pelatihan	2.768.211.200,00	2.660.605.541,00	96,11
45	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	157.200.500,00	137.377.100,00	87,39
46	Program Penempatan Tenaga Kerja	14.911.600,00	14.911.600,00	100
47	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	50.335.000,00	35.085.000,00	69,70
48	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.165.000,00	3.965.000,00	95,20
49	Program Pengawasan Keamanan Pangan	50.390.000,00	40.189.660,00	79,76



NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
50	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.442.000,00	36.138.728,00	96,52
51	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	104.742.500,00	101.820.000,00	97,21
52	Program Pengelolaan Arsip	268.582.000,00	261.284.000,00	97,28
53	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.424.841.250,00	1.228.376.450,00	86,21
54	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	35.497.500,00	7.880.200,00	22,20
55	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.102.389.300,00	1.691.163.900,00	80,44
56	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum	59.568.500,00	58.470.700,00	98,16
57	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	211.398.300,00	210.116.560,00	99,39
58	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	705.753.600,00	680.323.400,00	96,40
59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.099.778.600,00	996.680.200,00	90,63
60	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.170.790.800,00	1.097.127.200,00	93,71
61	Program Pengelolaan Pendidikan	150.835.952.708	146.840.256.551,00	97,35
62	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.137.981.400,00	1.115.076.480,00	97,99
63	Program Pengelolaan Persampahan	905.170.350,00	647.329.600,00	71,51
64	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	39.412.600,00	27.154.400,00	68,90
65	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	12.496.700,00	6.796.700,00	54,39
66	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	136.632.500,00	110.940.100,00	81,20
67	Program Pengembangan Ekspor	11.879.200,00	11.879.200,00	100
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	45.500.000,00	45.250.000,00	99,45
69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	636.752.200,00	518.262.430,00	81,39
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	73.581.100,00	57.545.800,00	78,21
71	Program Pengembangan Kebudayaan	260.993.100,00	194.216.200,00	74,41
72	Program Pengembangan Pemukiman	1.407.175.900,00	1.300.864.900,00	92,45
73	Program Pengembangan Perumahan	157.154.100,00	116.556.000,00	74,17
74	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36.053.999,00	36.046.400,00	99,98



NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
75	Program Pengembangan UMKM	79.000.000,00	39.506.000,00	50,01
76	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	70.305.300,00	-	-
77	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	32.545.000,00	26.185.000,00	80,46
78	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	132.402.850,00	103.398.850,00	78,09
79	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	388.327.000,00	223.232.900,00	57,49
80	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	21.166.800,00	21.153.500,00	99,94
81	Program Pengendalian Penduduk	1.358.668.000,00	1.358.068.000,00	99,96
82	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.475.000,00	1.475.000,00	100
83	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	107.379.700,00	80.245.100,00	74,73
84	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	24.640.300,00	20.140.300,00	81,74
85	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42.644.500,00	41.000.350,00	96,14
86	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	24.652.400,00	14.997.200,00	60,83
87	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	18.076.700,00	16.676.700,00	92,26
88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	1.332.754.328,00	1.295.042.075,00	97,17
89	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	404.484.180,00	311.968.380,00	77,13
90	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Kesehatan	10.584.180.719,00	8.661.185.834,00	81,83
91	Program Peningkatan Kerjasama Desa	36.440.000,00	34.718.000,00	95,27
92	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	476.041.600,00	475.917.894,00	99,97
93	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	421.044.800,00	241.671.400,00	57,40
94	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	91.730.000,00	82.270.000,00	89,69
95	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.188.900,00	13.938.900,00	69,04



NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
96	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	29.815.000,00	29.795.000,00	99,93
97	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.252.473.200,00	1.223.111.000,00	97,66
98	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.844.603.343,00	232.707.543.822,00	87,54
99	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.163.793.800,00	2.647.976.822,00	83,70
100	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	530.015.700,00	458.769.901,00	86,56
101	Program Penyelenggaraan Jalan	173.095.778.500,00	168.000.851.972,00	97,06
102	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.279.247.900,00	1.269.906.900,00	99,27
103	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.791.743.500,00	1.744.970.398,00	97,39
104	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	186.596.000,00	181.116.000,00	97,06
105	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	436.972.500,00	389.224.304,00	89,07
106	Program Penyelenggaraan Pengawasan	268.336.000,00	267.811.000,00	99,80
107	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	232.273.400,00	226.137.400,00	97,36
108	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	94.660.200,00	87.841.250,00	92,80
109	Program Penyuluhan Pertanian	2.124.107.350,00	1.735.482.235,00	81,70
110	Program Perekonomian dan Pembangunan	615.230.400,00	396.180.765,00	64,40
111	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	278.161.300,00	73.376.300,00	26,38
112	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	151.234.100,00	9.194.100,00	6,08
113	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	110.308.600,00	108.122.700,00	98,02
114	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	191.479.100,00	128.510.200,00	67,11
115	Program Perlindungan Khusus Anak	41.866.700,00	41.700.468,00	99,60
116	Program Perlindungan Perempuan	28.575.300,00	27.175.300,00	95,10
117	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	129.870.400,00	124.423.500,00	95,81
118	Program Rehabilitasi Sosial	225.832.200,00	213.306.200,00	94,45
119	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	245.203.100,00	73.508.156,00	29,98



NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
120	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	38.510.000,00	38.258.000,00	99,35
121	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	56.481.250,00	56.281.250,00	99,65
122	Prpgram Pengelolaan Sumber Daya Air	27.262.934.000,00	23.994.420.143,00	88,01
	JUMLAH	835.815.881.747,00	749.520.843.228,00	89,68

Banjarnegara, Maret 2022





**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SESUAI PERDA NO. 24 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO.2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TIPE
1	A. SEKRETARIAT DAERAH: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Bagian Pemerintahan b. Bagian Hukum c. Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan a. Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam b. Bagian Administrasi Pembangunan c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Asisten Administrasi Umum a. Bagian Organisasi b. Bagian Umum STAF AHLI: 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia	B
2	SEKRETARIAT DPRD	B
3	C. INSPEKTORAT	A
	D. DINAS DAERAH:	
4	1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	A
5	2 Dinas Kesehatan	B
6	3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
7	4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	A
8	5 Satuan Polisi Pamong Praja	B
9	6 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A
10	7 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
11	8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
12	9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
13	10 Dinas Perhubungan	B
14	11 Dinas Komunikasi dan Informatika	B
15	12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	C
16	13 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A
17	14 Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	A
18	15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A
	E. BADAN DAERAH:	
19	1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	A
20	2 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	A
21	3 Badan Kepegawaian Daerah	B
22	4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
23	5 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	C
	F. KETENTUAN LAIN-LAIN:	
24	1 Rumah Sakit Umum Daerah	



NO.	NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	TIPE
G.	KECAMATAN: (Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan)	
25	1 Kecamatan Susukan	A
26	2 Kecamatan Purwareja Klampok	A
27	3 Kecamatan Mandiraja	A
28	4 Kecamatan Purwanegara	A
29	5 Kecamatan Bawang	A
30	6 Kecamatan Banjarnegara	A
	1 Kelurahan Argasoka	
	2 Kelurahan Karangtengah	
	3 Kelurahan Wangon	
	4 Kelurahan Semampir	
	5 Kelurahan Sokanandi	
	6 Kelurahan Parakancanggah	
	7 Kelurahan Semarang	
	8 Kelurahan Krandegan	
	9 Kelurahan Kutabanjarnegara	
31	7 Kecamatan Sigaluh	A
	Kelurahan Kalibenda	
32	8 Kecamatan Madukara	A
	1 Kelurahan Kenteng	
	2 Kelurahan Rejasa	
33	9 Kecamatan Banjarmangu	A
34	10 Kecamatan Wanadadi	A
35	11 Kecamatan Rakit	A
36	12 Kecamatan Punggelan	A
37	13 Kecamatan Karangkobar	A
38	14 Kecamatan Pagetan	A
39	15 Kecamatan Pejawaran	A
40	16 Kecamatan Batur	A
41	17 Kecamatan Wanayasa	A
42	18 Kecamatan Kalibening	A
43	19 Kecamatan Pandanarum	A
44	20 Kecamatan Pagedongan	A